

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**DIPA NUSANTARA AIDIT
DAN
PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1950-1965**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Sejarah**



Disusun oleh:

Nama : Retno Anggraini

NIM : 021314037

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2006**

**DIPA NUSANTARA AIDIT
DAN
PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1950-1965**

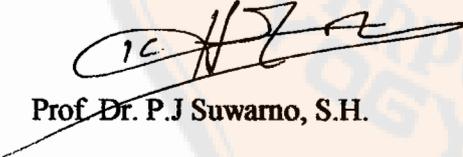
Oleh:

Retno Anggraini

021314037

Telah disetujui oleh:

Pembimbing I


Prof. Dr. P.J Suwarno, S.H.

Tanggal 7 Oktober 2006

Pembimbing II


Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th

Tanggal 7 Oktober 2006

**DIPA NUSANTARA AIDIT
DAN
PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1950-1965**

Dipersiapkan dan ditulis oleh :

Nama : Retno Anggraini

NIM: 021314037

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 7 Oktober 2006

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Panitia Penguji

Nama Lengkap	
Ketua	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.
Sekretaris	: Drs. B. Musidi, M.Pd.
Anggota	: Prof. Dr. P.J Suwamo, S.H.
Anggota	: Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th.
Anggota	: Drs. A.K. Wiharyanto, M.M.

Tanda Tangan



Yogyakarta, 7 Oktober 2006

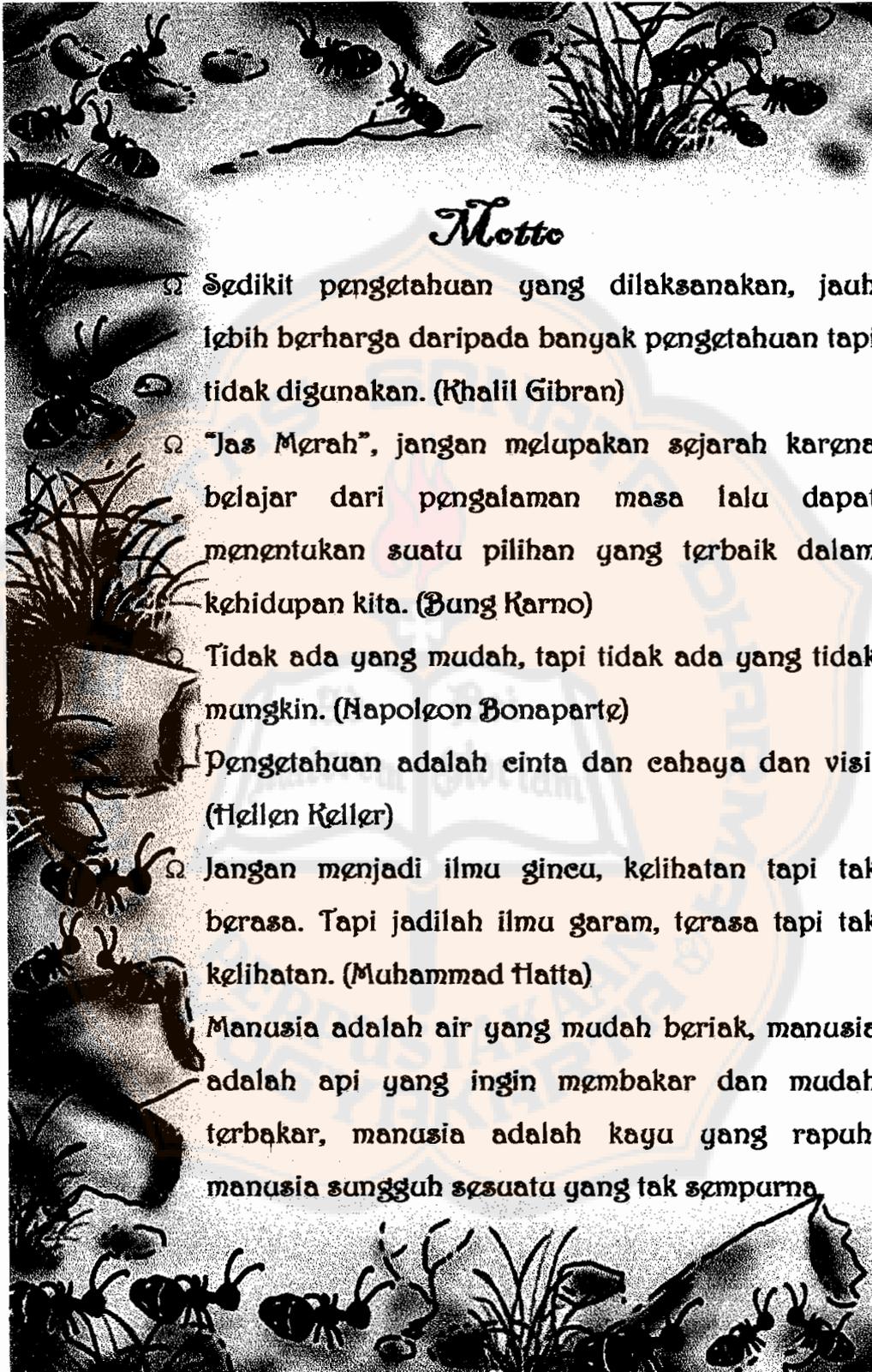
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Sanata Dharma

Dekan



Drs. Farsisius Sarkim, M.Ed., Ph.D.



Motto

Ω Sedikit pengetahuan yang dilaksanakan, jauh lebih berharga daripada banyak pengetahuan tapi tidak digunakan. (Khalil Gibran)

Ω "Jas Merah", jangan melupakan sejarah karena belajar dari pengalaman masa lalu dapat menentukan suatu pilihan yang terbaik dalam kehidupan kita. (Bung Karno)

Ω Tidak ada yang mudah, tapi tidak ada yang tidak mungkin. (Napoleon Bonaparte)

Ω Pengetahuan adalah cinta dan cahaya dan visi. (Hellen Keller)

Ω Jangan menjadi ilmu gineu, kelihatan tapi tak berasa. Tapi jadilah ilmu garam, terasa tapi tak kelihatan. (Muhammad Hatta)

Ω Manusia adalah air yang mudah beriak, manusia adalah api yang ingin membakar dan mudah terbakar, manusia adalah kagu yang rapuh, manusia sungguh sesuatu yang tak sempurna.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala syukur kepada Allah S.W.T.

Skripsi ini aku persembahkan untuk.....

✦ *Kedua Ortu ku tercinta...*

✦ *Adikku Ria Dwi Hap Sari tersayang...*

✦ *Seseorang yang terkasih...*

✦ *Keluarga besar di Belitung*



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

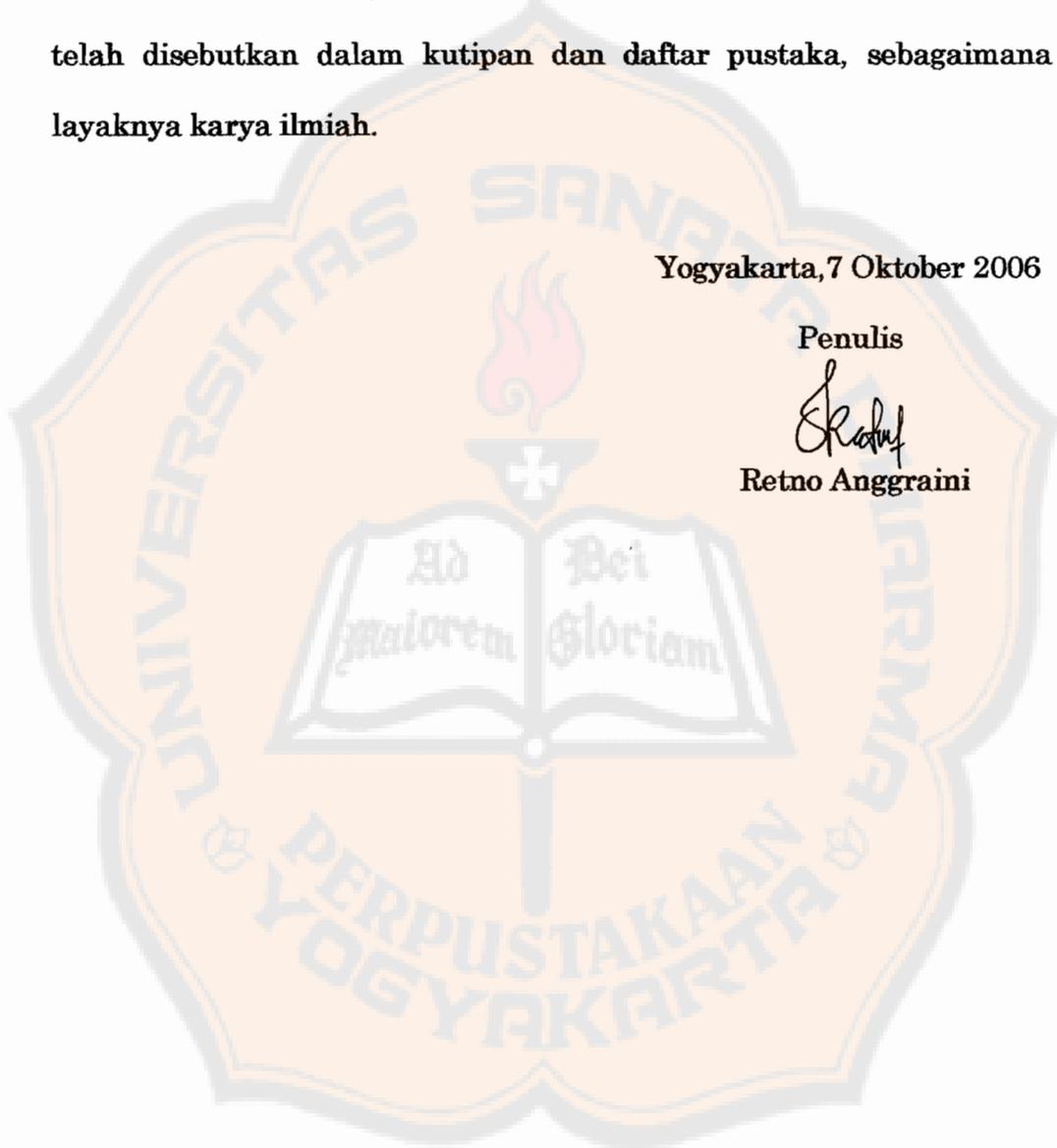
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya atau bagian karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 7 Oktober 2006

Penulis



Retno Anggraini



ABSTRAK
DIPA NUSANTARA AIDIT DAN PARTAI KOMUNIS INDONESIA
1950-1965

Oleh: Retno Anggraini

Skripsi yang berjudul “Dipa Nusantara Aidit dan Partai Komunis Indonesia 1950-1965” memiliki tujuan untuk membahas serta menganalisa tiga permasalahan pokok yaitu: 1. Apa yang melatar belakangi munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia; 2. Bagaimana peranan D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia dalam membangun Partai Komunis Indonesia tahun 1950-1965; 3. Bagaimana pengaruh perkembangan PKI terhadap situasi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia.

Dalam penulisan skripsi ini metode yang digunakan adalah metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, psikologis, politik, sosial dan personal. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa yang melatarbelakangi munculnya D.N Aidit menjadi pemimpin PKI adalah dipengaruhi oleh faktor keluarga yang demokratis dan mendorong sepenuhnya karir Aidit dalam bidang politik, selain itu juga Aidit memiliki sifat kharismatik, berpandangan jauh, ulet, pekerja keras dan memiliki strategi-strategi jitu dalam mendorong kemajuan partai. (2) Kemunculan Aidit dalam kancah politik, telah memberikan perubahan besar bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia. Aidit selalu mengupayakan cara-cara terbaik untuk membangun kembali PKI. Posisi PKI semakin mantap dan peran serta dalam panggung politik Indonesia semakin berkibar, saat Aidit mulai menjalin hubungan nan mesra dengan presiden Sukarno lewat demokrasi terpimpin. (3) Kondisi perekonomian Indonesia yang selalu mengalami pasang surut telah menyebabkan kesengsaraan rakyat. Dengan kondisi yang demikian mendukung itu, PKI membujuk kaum buruh tani untuk menciptakan masyarakat sosialis komunis. PKI juga mulai mengadakan aliansi dengan PNI, NU dan juga Masyumi. Usaha aliansi ini banyak memberikan pengaruh berarti dalam perkembangan PKI.

ABSTRACT

**DIPA NUSANTARA AIDIT AND THE INDONESIAN COMMUNIST PARTY
1950- 1965**

By : Retno Anggraini

The mini thesis titled “Dipa Nusantara Aidit And The Indonesian Communist Party 1950- 1965” had purposes to discuss and to analyze three major problems, namely: 1. What formed the background of the D.N Aidit’s appearance as the leader of the Indonesian Communist Party; 2. What roles D.N Aidit played in developing the Indonesian Communist Party (PKI) in 1950-1965; and 3. What effects PKI had on the social-economic and political situations in Indonesia.

In this mini thesis writing, the method used was historical method including heuristic, resource critiques, interpretation and historiography. The approach used was historical, psychological, political, social and personal approaches. This mini thesis writing was descriptive-analytical in nature.

The results of this research were as follows. (1) Factors formed the background of D.N Aidit’s appearance as the leader of PKI, was his familial factor that was democratic and totally supporting his career in political field. Moreover, Aidit had characters of charismatic, far-forward looking, preserving, hard worker, and had precise strategies in supporting the party’s progress. (2) The appearance of Aidit in political field had made great changes for the developing of PKI. Aidit was always making the best efforts to rebuild PKI. The position of PKI was steadier and the participation in the Indonesian political stage was more spreading when Aidit began to make close relationship with President Sukarno through the guided non-parliamentary democracy. (3) The ups and downs of the Indonesian economic conditions had made people suffering. With these conditions, PKI persuaded waged farmers to create socialist-communist society. PKI also began to make alliance with PNI, NU as well as Masyumi. These alliances were significant for the developing of PKI.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan izin-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Dipa Nusantara Aidit dan Partai Komunis Indonesia 1950-1965”.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana pendidikan sejarah di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar, berkat bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sanata Dharma yang telah memberi ijin penelitian atas penulisan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan pandangan dalam penulisan skripsi.
4. Bpk. Prof. Dr. P.J Suwarno, SH., selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia membimbing dalam mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
5. Bpk. Drs. Sutarjo Adisusilo, J.R., S.Th., selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia membimbing dalam mengoreksi skripsi ini hingga selesai.
6. Ibu. Th. Sumini yang telah membantu penulis ketika mengalami kesulitan dalam belajar dan selalu memberikan saran dan nasehat-nasehat yang membangun.
7. Segenap dosen yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
8. Sekretariat yang telah membantu penulis dalam mengurus administrasi pendidikan.
9. Karyawan perpustakaan yang telah membantu penulis dalam menyediakan berbagai buku yang berguna dalam penulisan skripsi ini.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

10. Kedua orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil dan dengan penuh kesabaran serta kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Firstodia Q.A yang selalu memberi perhatian, do'a, semangat, kesabaran dan kesetiaan.
12. Kakakku Le'Teen, yang telah memberi warna dalam kehidupanku dan membantuku dimasa-masa sulit.
13. Teman-temanku Njoo, Odil, Linul, Catur, Olin, Mbak Yani, Riandy, Heri-Etik, Le-la-Ayak, Kak Rina-Nubin terima kasih atas kerja sama, semangat, dukungan, teman bertukar pikiran dan hari-hari indah bersama kalian.
14. Teman-teman seperjuangan angkatan 2002 yang baik, yang telah mendorong dan menyemangati penulis untuk menyelesaikan studi dan skripsi ini.
15. Teman-teman kos rumah tingkat, terima kasih atas doa' dan semangatnya.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata dengan menyadari segala kekuatan dan kelemahan, maka segala kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini, penulis terima dengan senang hati. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Penulis



DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Pernyataan Keaslian Karya	vi
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran	xiv
BABI PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	16
D. Tinjauan Pustaka	17
E. Kajian Teori	24
F. Hipotesis	44
G. Metode dan Pendekatan Penelitian.....	45
H. Sistematika penulisan	51

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB II LATAR BELAKANG MUNCULNYA D.N AIDIT SEBAGAI

PEMIMPIN PKI	53
A. Latar Belakang Sosial Budaya	54
1. Latar Belakang Keluarga	54
2. Latar Belakang Pendidikan	58
3. Watak dan Kpribadian	61
B. Latar Belakang Politik	65

BAB III PERANAN D.N AIDIT SEBAGAI PEMIMPIN PKI DALAM MEMBANGUN PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1950- 1965 **74** |

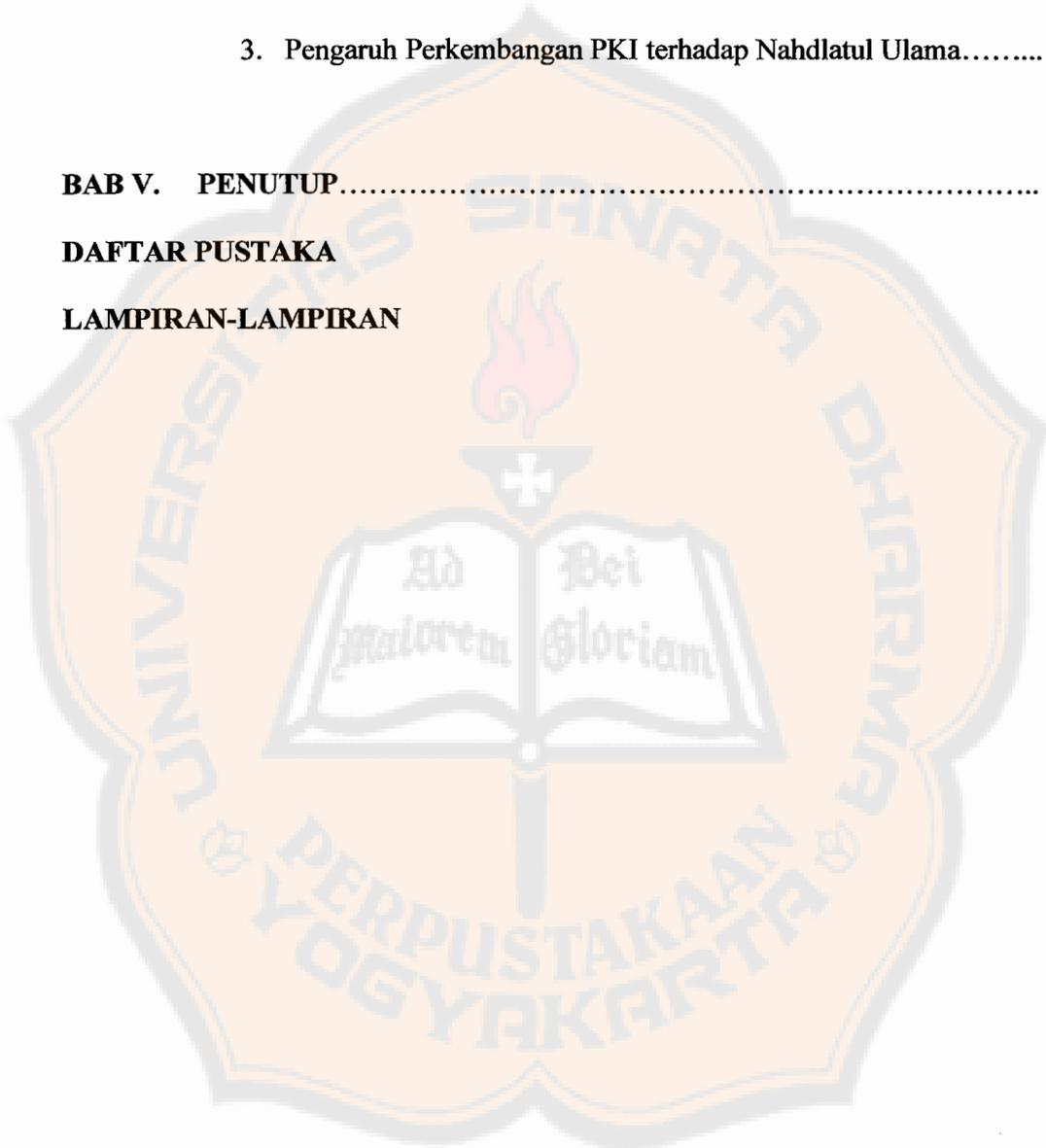
A. Peranan D.N Aidit pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959).....	74
1. Wajah baru dalam membangun partai	75
2. Strategi Front Nasional	79
3. Merebut Suara Pemilu 1955	87
B. Peranan D.N Aidit Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965).....	99

BAB IV PENGARUH PERKEMBANGAN PKI TERHADAP SITUASI SOSIAL-EKONOMI DAN POLITIK DI

INDONESIA.....	121
A. Pengaruh PKI Terhadap Situasi Sosial-Ekonomi.....	121

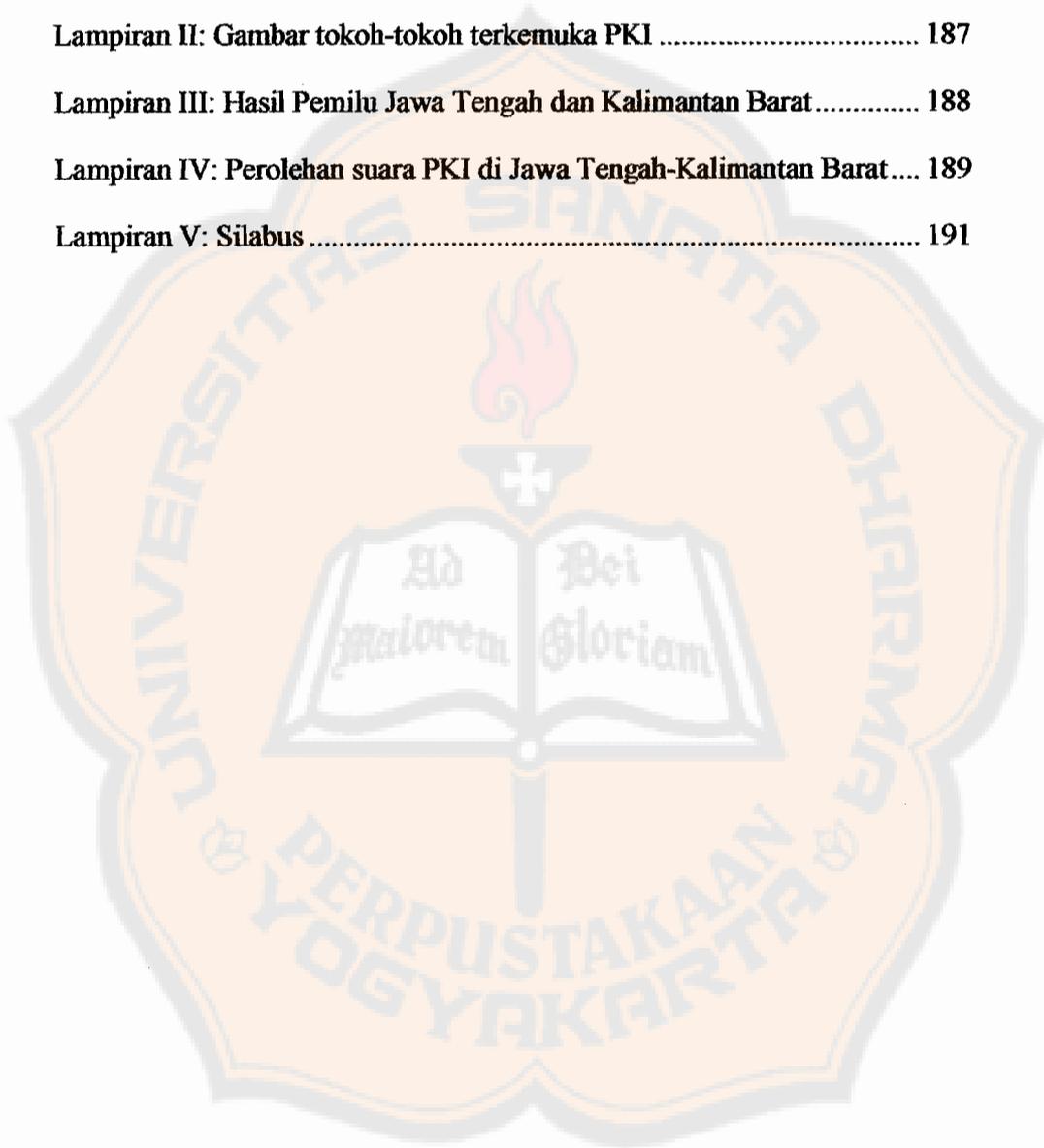
PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

B. Pengaruh PKI Terhadap Situasi Politik.....	135
1. Pengaruh Perkembangan PKI terhadap PNI (Partai Nasional Indonesia).....	140
2. Pengaruh Perkembangan PKI terhadap Masyumi.....	151
3. Pengaruh Perkembangan PKI terhadap Nahdlatul Ulama.....	158
 BAB V. PENUTUP.....	 173
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I: Gambar D.N Aidit.....	186
Lampiran II: Gambar tokoh-tokoh terkemuka PKI	187
Lampiran III: Hasil Pemilu Jawa Tengah dan Kalimantan Barat	188
Lampiran IV: Perolehan suara PKI di Jawa Tengah-Kalimantan Barat....	189
Lampiran V: Silabus	191



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proklamasi kemerdekaan telah dibacakan oleh Ir. Sukarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan itu bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai bangsa yang bebas dari penjajahan. Dengan proklamasi ini, perjuangan bangsa Indonesia bukan berarti telah selesai. Proklamasi justru harus dipandang sebagai titik awal perjuangan untuk mengisi kemerdekaan guna mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa. Dalam mewujudkan upaya ini kita hendaknya menyadari bahwa masih adanya ancaman, hambatan dan gangguan terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia.

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus itu dapat dikatakan bahwa keadaan dalam negeri Indonesia belum stabil. Hal ini disebabkan karena terdapatnya oknum-oknum atau golongan-golongan tertentu yang ingin menggeser kedudukan Pancasila dan UUD 1945 sebagai falsafah dan dasar negara, serta ingin menggeser kedudukan pemerintah republik Indonesia yang sah. Rongrongan itu tidak hanya bersifat politis, tetapi juga bersifat militer dan keagamaan.

Sejarah merupakan dialog yang tak pernah selesai antara masa sekarang dan lampau, suatu proses interaksi yang berkesinambungan antara sejarahwan dan fakta-fakta yang dimilikinya. Jadi tidak ada tulisan atau buku sejarah yang final. Bila ditemukan sumber atau fakta baru, buku

sejarah yang lama direvisi. Demikian pula halnya dengan kasus Gerakan Tiga Puluh September 1965 (G 30 S).

Ketika kita berbicara mengenai peristiwa 65, maka yang terbayang dalam benak kita adalah peristiwa “pemberontakan PKI” yang meletus pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan sebutan gerakan 30 September (G 30 S/PKI).

Peristiwa pemberontakan PKI telah lama berlalu. Tetapi peristiwa G 30 S ini masih ramai diperdebatkan berbagai kalangan. Dari segi kuantitas, peristiwa ini memang merupakan salah satu tema yang paling banyak dibicarakan para akademisi sosial politik. Ratusan karya ilmiah berupa buku, monograf dan artikel mengenai peristiwa berdarah itu telah ditulis orang. Tapi, banyak orang yang sepertinya tetap merasa tidak pernah puas. Sejumlah pertanyaan masih tetap menggantung.¹ Siapa sesungguhnya dalang dibalik semua ini? Untuk kepentingan apa? Mengapa?.

Setiap tahun seluruh bangsa Indonesia selalu diajak bernostalgia dan menengok kekejaman komunis di Indonesia, hal itu sangat tampak sekali dimasa-masa keemasan Soeharto. Setiap tahun menjelang bulan September, biasanya ada semacam ritual dimana sejumlah pejabat akan mulai mengingatkan adanya bahaya laten komunisme. Realitas lama seolah-olah hidup kembali sebagai realitas baru. Dan tepat pada tanggal 30 September televisi nasional akan membawa ritual mencapai klimaksnya lewat pemutaran film penghianatan G30S PKI dan pengibaran bendera setengah

¹ Stanley, 1995, *Bayang-Bayang PKI*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta, hal1.

tiang diseluruh Indonesia. Dan keesok harinya, 1 Oktober. Hari kesaktian Pancasila diperingati, hari dimana upaya membangun Komunis di Indonesia berhasil dipatahkan dan bendera merah putih pun akan dikibarkan setiang penuh.

Gerakan komunis di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang seringkali diwarnai gelombang pasang surut. Dalam kurun waktu pergolakan pergerakan nasional pada awal abad ke-20, gerakan komunis bersama dengan gerakan lainnya yang dilandasi oleh berbagai ideologi seperti islam dan nasionalisme, mengekspresikan diri dalam bentuk aksi perlawanan terhadap penguasa kolonial.²

Nama Partai Komunis Indonesia (PKI) sendiri baru dipakai pada tahun 1920, sebagai kelanjutan dari organisasi yang bernama *Indische Sociaal Democratische Vereeniging* (ISDV). Sehingga dapat ditelusuri bahwa akar komunis di Indonesia dapat dilacak sampai pada masa sebelum tahun-tahun pertama abad ke dua puluh dan pada saat didirikannya ISDV atau *Perkumpulan Social Demokrat Hindia* tersebut.

Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) didirikan pada tahun 1914 oleh seorang Belanda yang bernama Sneevliet. ISDV adalah organisasi politik yang tujuannya memperbesar dan memperkuat gerakan komunis.³ Sneevliet bersama dengan teman-temannya orang-orang Belanda

² Subhan, Sd, 1996, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hal 6.

³ Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), 1988, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta, hal 9.

diantaranya Bransteder, Dekker, Ir. Baar dan Van Burink berusaha untuk mendekati rakyat, terutama dari kaum petani dan buruh.

Sejak dulu, mayoritas masyarakat Indonesia terdiri dari petani. Kaum petani telah menderita akibat penjajahan Belanda dalam banyak segi, yang pertama dan paling berat adalah mereka menderita akibat diterapkannya bentuk perpajakan. Sewaktu itu petani terpaksa menjadikan sepertiga sampai setengah tanah mereka tersedia untuk dipakai perkebunan gula. Karena dipaksa bayar pajak, makin banyak tanah dipakai, dan petani makin terpuruk dalam kemiskinan dan makin tergantung pada sistem kapitalis.

Pada waktu itu sudah banyak organisasi-organisasi yang berdiri jauh sebelum Sneevliet datang. Organisasi tersebut diantaranya adalah Budi Oetomo yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 adapun sebagian besar anggota-anggotanya adalah dokter-dokter Jawa dan para priyayi. Organisasi selanjutnya yang berdiri adalah bertitik berat bukan pada nasionalisme ataupun program politik, melainkan pada agama. Kira-kira 90% penduduk Indonesia menganut Islam, dan Islam merupakan institusi utama dari masyarakat tradisional yang gagal dilembagakan Belanda dalam kontrolnya yang tidak langsung. Oleh karena itu Islam menjadi pusat perlawanan anti pemerintahan asing, walaupun aslinya oposisi ini belum matang dan tanpa bentuk (tidak ada program politik). Adapun organisasi Islam ini berawal dengan pembentukan Serikat Pedagang Islam pada tahun 1911.

Pada tahun 1912 berdirilah organisasi yang menuntut kemerdekaan Indonesia yang bernama *Indische Partij* yang didirikan pada tanggal 6

September 1912 oleh Douwes Dekker, Dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Surjaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi ini tidak dapat bertahan lama, pada tahun 1913 organisasi ini dilarang karena tuntutan kemerdekaan itu, dan sebagian besar anggotanya dibuang ke Nederland.

Pada tahun 1913, di bawah pimpinan Tjokroaminoto, membuang "Pedagang" dari namanya menjadi Serikat Islam untuk merengkuh dukungan massa. Tujuan Serikat Islam adalah untuk memajukan perdagangan bagi bangsa Indonesia. Meski tidak ada gagasan perjuangan nasionalis, tak terelakkan SI memegang peran pemegang kepercayaan perjuangan nasional. Keanggotaannya tumbuh dengan dahsyat, sampai ratusan ribu. Cabang-cabang SI bukan saja di seluruh Jawa tetapi juga sampai ke pulau-pulau luar Jawa.⁴

Usaha Sneevliet di Indonesia telah meletakkan landasan/pondasi bagi PKI yaitu membentuk nukleus kaum sosialis (dimulai dari pekerja asing berkebangsaan Belanda), membangun gerakan sarekat buruh dan melakukan intervensi ke dalam gerakan nasionalis. Dalam memperluas pengaruhnya Sneevliet berusaha untuk berkoalisi dengan Serikat Islam (SI), namun tidak berhasil. sehingga usaha Sneevliet untuk meluaskan pengaruhnya dapat dikatakan belum berhasil. Pada tanggal 23 Mei 1920 diputuskan untuk merubah nama ISDV menjadi partai comunis Hindia, tujuh bulan kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan ketuanya adalah dari kalangan

⁴ *Ibid*, hal 10.

orang Indonesia sendiri yaitu Semaun. Bersama teman-temannya, Semaun mulai menyebarkan paham komunis keseluruh lapisan masyarakat.

Usaha PKI memperluas pengaruhnya ternyata menuai keberhasilan. Sebagai contoh adalah PKI mengadakan infiltrasi kedalam Sarekat Islam dan menyebabkan perpecahan cabang SI itu menjadi cabang "SI Merah" dan "SI Putih". SI Putih yang berdasarkan agama dan jelas-jelas menentang adanya perjuangan radikal, tidak mendapat massa dan segera hancur. Sedangkan SI Merah berhaluan Komunis, yang kemudian berganti nama menjadi Sarekat Rakyat dan mencapai puncaknya dengan beranggotakan 60.000 orang.

PKI kemudian menjadi partai massa yang memiliki pengaruh yang luas. Sampai pada akhirnya PKI harus tergelincir pada suatu pemberontakan antara tahun 1926-1927. pemberontakan itu meletus dimana-mana, antara lain: di Banten, Batavia, Priyangan dan juga di Sumatera. Namun pemberontakan ini dapat ditumpas habis-habisan oleh pemerintah Hindia Belanda. Para pemimpin PKI ini banyak yang ditangkap dan ada juga yang lari keluar negeri yaitu Muso.

Dengan ditumpasnya PKI oleh Belanda, maka PKI benar-benar mati dan tidak dapat bangun kembali dalam kurun waktu yang cukup lama. Namun pada tahun 1935, PKI mulai dibangun kembali dengan pulangnya Muso ke Indonesia. Ia kemudian mulai membangun PKI ini secara sembunyi-sembunyi dan tanpa terduga dengan gerakan bawah tanah itu PKI berhasil membangun kembali kekuatannya.

Pada tanggal 21 Oktober 1945, PKI muncul kembali dibawah pimpinan Moh.Yusuf⁵. Ia dan pengikutnya telah bekerjasama dengan gerakan Komunis jaman Jepang. Ia juga tidak mempunyai hubungan dengan PKI 1926 atau PKI Muso 1935 yang illegal. Kekuatan PKI kembali ditunjukkannya pada tahun 1948, yang terkenal dengan pemberontakan PKI di Madiun. Namun lagi-lagi pemberontakan yang dilakukan PKI ini gagal bahkan mulai mengancam keeksistensian PKI di bumi Indonesia.

Pada tahun-tahun pertama revolusi, nasib republik yang baru merdeka ini benar-benar jatuh dan bangun, dimana pasukan-pasukan Republik berhasil merebut suatu wilayah, kemudian harus kehilangan dan akhirnya berhasil merebutnya kembali, sebelum akhirnya terjadi pergeseran medan perjuangan, dari medan pertempuran kemedan perundingan.

Dalam tahun-tahun tersebut secara mencolok PKI di asosiasikan dengan tipe perjuangan bersenjata diatas dengan sejumlah alasan, tak kurang diantaranya adalah adanya suatu sikap yang kurang mendapat dukungan bahwa suatu perjuangan kemerdekaan mau menerima mereka yang berpandangan Barat jika perjuangan tersebut diasosiasikan dengan gerakan Komunis. Meskipun demikian, PKI dapat saja berperan serta didalam revolusi sebagai sebuah kekuatan yang bersatu melawan imperialisme asing, yakni Belanda.⁶

Masa-masa revolusi itu sendiri (1945-1949) merupakan sebuah periode yang penuh dengan kekacauan dan selama periode ini PKI kembali

⁵ G. Moedjanto, 1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 1*, Kanisius, Yogyakarta, hal126.

⁶ Peter Edman, 2005, *Komunisme ala Aidit*, Center For Information Analysis, hal 46.

melakukan berbagai aktivitasnya secara terbuka setelah dua puluh tahun bergerak dibawah tanah. Keanggotaannya pun berkembang pesat, namun yang terpenting adalah masuknya sejumlah pemuda kedalam jajarannya. Hal ini menandai kemunculan generasi baru dalam partai tersebut. Hal ini kemudian semakin mengkristal pada tahun 1950-an, sebuah periode ketika politik massa semakin menggejala dalam tubuh PKI. Kepemimpinannya pun muncul dari kelompok pemuda ini yang berisikan para tokoh penting seperti D.N Aidit, yang ingin segera menggantikan kelompok tua yang dipandang hanya merintangi kemajuan partai saja.⁷ Sebagaimana digambarkan oleh Aidit karena harus berhadapan dengan kenyataan bahwa:

Kelemahan-kelemahan partai dalam lingkup politik, ideologi dan organisasi telah mengakibatkannya tidak mampu memberikan sebuah kepemimpinan bagi situasi obyektif yang pada saat itu sesungguhnya amat penting.⁸

Nama tokoh D.N Aidit mungkin tak asing lagi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, namun siapa dan bagaimana latar belakang kehidupannya banyak orang yang belum tahu. Tokoh ini dilahirkan pada tanggal 30 Juli 1923 di Belitung tepatnya di Tanjung Pandan. Amat, merupakan panggilan akrabnya. Nama aslinya adalah Achmad Aidit yang kemudian mengganti nama menjadi Dipa Nusantara Aidit. Motivasi untuk berganti nama bukanlah hal yang mengada-ada. Kata Dipa Nusantara terinspirasi dari seorang pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro sedangkan nusantara adalah nama terdahulu Indonesia. Dengan demikian

⁷ *Ibid*, hal 57-58.

⁸ *Ibid*, hal 46.

nama Dipa Nusantara adalah untuk menghormati perjuangan Diponegoro dan untuk memberi inspirasi Aidit dalam usahanya membebaskan negara Nusantara.⁹

Sejak usia belia, Aidit memang telah menunjukkan kecintaannya terhadap dunia politik. Ia sangat aktif dalam mengikuti berbagai organisasi nasional di Indonesia, sebut saja Gerindo. Ia pun menunjukkan rasa kecintaan terhadap politik itu dengan mulai mempelajari aliran Marxist.

Kepemimpinan D.N Aidit atas PKI telah membawa partai tersebut pada suatu arah yang jelas-jelas berbeda sebagian besar pendahulunya, yang telah memberinya sentuhan khas Indonesia dengan jelas. Hal ini benar-benar menunjukkan keterputusannya secara menyeluruh dengan masa lalunya. PKI menjadikan partai ini adalah partai petani, kelas pekerja atau kaum proletariat yang hanya menempati proporsi yang kecil dalam keseluruhan masyarakat. Sebagai suatu partai yang memimpikan memiliki basis pada masyarakat petani, sudah semestinya apabila kebijakan-kebijakan PKI dibumikan pada tuntutan-tuntutan dan kebutuhan masyarakat petani.¹⁰

PKI mengalami sebuah kebangkitan kembali sebagai bagian dari proses yang berkesinambungan yang bermula sejak kelahiran partai tersebut untuk pertama kalinya walaupun dengan dua kali kemunduran besar pada tahun 1926 dan 1948 namun akhirnya dapat kembali bangkit dengan mereformasi kebijakan-kebijakan partai namun tetap mempertahankan tujuan partai yaitu menuju masyarakat yang sosialis.

⁹ Sobron Aidit, 2003, *Aidit: Abang, Sahabat dan Guru Masa Pergolakan*, Yayasan Nuansa Cendikia, Bandung, hal 19-20.

¹⁰ *Ibid*, hal 4.

Lahirnya PKI adalah lahirnya suatu partai kelas buruh Indonesia dan perkembangan partai ini adalah perkembangan sejarah kelas buruh Indonesia dalam memimpin kaum tani dan massa rakyat lainnya dalam perjuangan perwira melawan imperialisme dan kaki tangannya dalam perjuangan untuk menumbangkan kekuasaan reaksioner dan mendirikan kekuasaan rakyat yang bersendikan persekutuan mayoritas dari rakyat yaitu persekutuan kaum buruh dan tani, hanya kekuasaan rakyat yang demikian ini memungkinkan tercapainya Indonesia sosialis dikemudian hari.¹¹

Pengaruh Aidit sebagai seorang teoritis utama dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah partai setelah tahun 1950/1951, berperan sangat besar terhadap penentuan haluan kebijakan yang diambil oleh partai, dan dari sini secara tidak langsung berpengaruh pada keberhasilan partai dalam melipatgandakan jumlah anggotanya dan meningkatkan pengaruhnya.

Pada bulan Maret 1954 telah diadakan kongres nasional ke V PKI untuk menjawab semua permasalahan revolusi Indonesia, pembangunan partai dan strategi untuk mengeratkan hubungan PKI dengan massa. Berdasarkan analisa dalam kongres ini PKI berkewajiban untuk membentuk front persatuan yaitu kaum buruh, kaum tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional untuk mengalahkan kaum imperialis, kelas tuan tanah. Untuk menggalang front ini maka harus menarik kaum tani.¹² Dan dalam tahun ini juga dilangsungkan sidang pleno ke II *Central Comitte* yang memutuskan untuk memperluas front persatuan dengan cara PKI harus lebih aktif bekerja

¹¹ D.N Aidit, 1955, *Lahirnya PKI Dan Perkembangannya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 404.

¹² *Ibid*, hal 434.

sama dengan partai nasionalis dan partai islam. Dengan demikian PKI tidak akan henti-hentinya bekerja untuk memperluas dan memperkuat front persatuan nasional.

Masa demokrasi liberal sungguh-sungguh dimanfaatkan Aidit. Langkah pertamanya yang dilakukannya adalah menghilangkan citra buruk PKI dengan cara beraliansi ketubuh partai politik yang penting pada waktu itu yakni PNI. Dengan bergabungnya PKI dan PNI diharapkan partai-partai politik lain tidak lagi curiga dan anti PKI lagi. Upaya ini berhasil dan sejumlah tokoh mulai bekerja sama dengan PKI. Kerjasama ini mencapai puncaknya dalam usaha menjatuhkan kabinet Wilopo.

Diawal tahun 1957 sistem politik Indonesia berada dalam keadaan krisis. Krisis itu melanda kabinet yang kemudian disusul pergolakan-pergolakan daerah¹³. Bagi Sukarno kesulitan-kesulitan politik yang dihadapi pada masa itu lebih disebabkan oleh sistem multi partai daripada faktor-faktor lain.¹⁴

Meskipun D.N Aidit seorang marxis dan anggota komunis internasional, Aidit tetap mengikuti paham marhaenisme Sukarno. Dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginannya untuk merebut kekuasaan.

Ideologi marhaenisme merupakan konsep pemikiran Sukarno yang bertujuan untuk mewujudkan sosialisme Indonesia yaitu sosialisme yang disesuaikan dengan alam Indonesia terutama didasarkan pada suatu

¹³ Nazaruddin Syamsuddin (ed), 1988, *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta, hal 173.

¹⁴ *Ibid*, hal 174.

dorongan kaum tani kecil yang sedikit banyak berdiri sendiri. Kecintaan Sukarno pada persatuan dan kesatuan bangsa tercermin dalam gagasannya yang menggabungkan tiga aliran politik yaitu nasionalisme, islamisme dan marxisme dalam satu wadah nasakom.

Peluang PKI untuk tumbuh dan berkembang semakin besar, dengan kebijakan Sukarno pada waktu itu yaitu dengan politik nasakom (nasionalis, agama dan komunis) sebagai upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang pada saat itu terbagi dalam tiga kekuatan yaitu kaum nasionalis, agamais dan komunis. Politik nasakom tersebut memberikan kesempatan bagi ketiga kekuatan itu untuk saling mengembangkan diri dan menyatukan ideologi itu dalam wadah-wadah partai politik. Ketiga kekuatan ini juga yang telah memberikan dukungan terhadap ide-ide dan perjuangan Sukarno untuk melanggengkan kekuasaannya selama bertahun-tahun. Di dalam perkembangannya, ide dan perjuangan Sukarno banyak didukung oleh kaum komunis dan sosialis terutama dalam konsep marhaenisme, yang dekat dengan ide sosialis dan komunis.

Bagi Sukarno gerakan-gerakan Islam, marxis dan nasionalis di Indonesia berasal dari suatu dasar yang sama yaitu hasrat kebangsaan untuk melawan setiap bentuk penindasan baik dalam bidang politik maupun ekonomi.¹⁵

Usaha Sukarno untuk menyatukan ketiga ideologi itu dapat dikatakan gagal. Hal ini dikarenakan antara ketiga kalangan itu saling bertentangan.

¹⁵ Badri Yatim, 1985, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Rekonstruksi Islam Nasionalis*, Inti Sarana Aksara, Jakarta, hal 35.

Kalangan agama menuduh kalangan komunis tidak bertuhan sedangkan kalangan komunis menuduh kalangan nasionalis pro liberalisme. Dengan pertentangan-pertentangan seperti itu memberi sebuah angin segar bagi pihak lain yang memang menghendaki berakhirnya kekuasaan Sukarno. Maka skenario-skenario politik misterius mulai berperan didalamnya dan peristiwa 1965 merupakan puncak dari segala pertentangan ideologis itu.

Pada saat Sukarno berkuasa, PKI merupakan partai massa yang besar. Berkat agitasi Aidit mengadakan propaganda yang mampu menarik massa, maka pada tanggal 29 September 1955 pada pemilu yang pertama PKI mampu menempatkan posisinya masuk dalam empat partai besar setelah Masyumi, PNI dan NU. Walaupun PKI mendapatkan suara yang cukup besar dalam pemilihan umum tetapi PKI tidak berhasil duduk dalam kabinet yang terbentuk setelah pemilihan umum.¹⁶ Suasana yang kurang menguntungkan bagi PKI ini membuat presiden Sukarno secara terbuka menyatakan keinginannya agar PKI diikutsertakan dalam kabinet dengan demikian sikap presiden Sukarno itu telah banyak menolong PKI dalam proses perkembangan politik Indonesia selanjutnya.

Situasi politik yang tidak stabil pada masa demokrasi konstitusional berpengaruh pada sering terjadinya pergantian kabinet dengan program pemerintah yang berbeda-beda. Ketidakstabilan politik yang terjadi menyebabkan demokrasi konstitusional runtuh. Sebagai penggantinya, Sukarno kemudian memilih demokrasi terpimpin yang diharapkan akan

¹⁶ Abdul Gafur, 1987, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal, 222.

sanggup mengakhiri krisis politik serta memulihkan ketertiban. Namun sayangnya penerapan demokrasi ini tidaklah berjalan mulus hal ini dikarenakan segala tindak tanduk kegiatan politik selalu mendapatkan pengawasan yang ketat oleh pihak militer.

D.N Aidit memang tokoh komunis yang lebih menonjol dari kawan-kawannya. Dia tidak senang dengan kawan-kawannya yang agak kalem, sekalipun mereka itu para seniornya. Contohnya dengan Alimin, Semaun dan Tan Ling Djie. Langkah-langkah yang diambil D.N Aidit hampir sama dengan yang dilakukan Sneevliet pada tahun-tahun menjelang 1920-an. Gerakan-gerakan PKI pada tahun 1960-an sangat efektif. Dia dapat merangkul PNI. Dia bisa bergandengan tangan dengan NU. Dia bisa menyusup ke dalam organisasi-organisasi buruh, organisasi-organisasi wanita (Gerwani), kedalam organisasi mahasiswa (CGMI) dan juga kedalam organisasi wartawan (PWI) serta kantor berita ANTARA.¹⁷

Ketegangan politik semakin meningkat pada tahun 1965. Hubungan Presiden Sukarno dengan Angkatan darat semakin tegang karena adanya perbedaan sikap terhadap PKI. PKI semakin dekat dengan Presiden Sukarno untuk dijadikan tempat berlindung dan anti terhadap Angkatan Darat. Pada bulan Juli 1965 kesehatan Sukarno memburuk, maka PKI yang keselamatannya banyak tergantung pada Sukarno merasa cemas sehingga PKI berusaha merebut kekuasaan.

¹⁷ Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), *op.cit*, hal 66.

Secara politik, keberhasilan PKI mendorong memperbesar ambisi politiknya. Maka pada tanggal 30 September 1965 PKI mengadakan sebuah pemberontakan. Walaupun telah secara nyata PKI melakukan pemberontakan namun Sukarno tidak bertindak tegas terhadap PKI. Ketidak tegasan ini membuat berakhirnya masa kekuasaan Sukarno. Aksi-aksi Tritura meletus sebagai usaha menjatuhkan Sukarno.

D.N Aidit lebih memilih daerah Jawa Tengah terutama di daerah Surakarta dengan pusat di Solo sebagai kubu pertahanan. Dalam menjalankan aksi pemberontakannya, Aidit mengalami kegagalan. Adapun Kegagalan ini disebabkan oleh keadaan yang belum matang ditambah tidak adanya bantuan dari kekuatan komunis internasional. Di samping itu sikap Aidit yang hanya menilai Pancasila sebagai *figure heads*, huruf mati semata-mata, merendahkan faktor nasionalisme dan agama serta kurang menyatunya jiwa dan kepribadian nasional sehingga hal itu membawanya ke lembah kehancuran.¹⁸ Namun Aidit tetaplah sang arsitek dalam merancang sebuah perubahan-perubahan baru dalam tubuh Partai Komunis Indonesia. Dengan pengaruhnya yang demikian itu, ia dapat mengarahkan PKI dalam upaya-upayanya membangun sebuah partai massa yang besar. Sehingga PKI menjadi partai terbesar no 3 didunia setelah RRC dan Rusia. PKI merupakan sarana untuk memperjuangkan tujuan-tujuan marxisme didalam masyarakat Indonesia.

¹⁸ Soebekti, 1966, *Hari-hari Terakhir Aidit*, Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, hal 6.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia ?
2. Bagaimana peranan D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia dalam membangun Partai Komunis Indonesia tahun 1950-1965?
3. Bagaimana pengaruh perkembangan PKI terhadap situasi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Sesuai dengan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mendeskripsi dan menganalisis latar belakang munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia
2. Untuk mendeskripsi dan menganalisis peranan D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia dalam membangun Partai Komunis Indonesia tahun 1950-1965
3. Untuk mendeskripsi dan menganalisis pengaruh perkembangan Partai Komunis Indonesia terhadap situasi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia.

2. Manfaat Penulisan

1. Bagi Sanata Dharma

Untuk melaksanakan salah satu Tridharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian yaitu bahwa penelitian untuk ilmu pengetahuan sosial.

2. Bagi Dunia Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dapat menambah perbendaharaan informasi tentang sejarah nasional. Khususnya mengenai peranan tokoh D.N Aidit dalam membangun Partai Komunis Indonesia.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan teori yang telah didapatkan di bangku kuliah kedalam praktek dunia nyata dan dapat menambah pengetahuan khususnya mengenai D.N Aidit dan peranannya dalam Partai Komunis Indonesia.

4. Bagi para pembaca

Dapat meningkatkan minat pada sejarah Indonesia dan dapat memperluas cakrawala sejarah khususnya mengenai tokoh D.N Aidit dan Partai Komunis Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Sumber (sumber sejarah disebut juga data sejarah; bahasa Inggris datum dalam bentuk tunggal, data bentuk jamak; bahasa Latin datum berarti

pemberian) yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis.¹⁹

Sumber sejarah berdasarkan sifatnya dibagi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah kesaksian dari seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau dengan panca indera yang lain atau dengan alat mekanik seperti telepon dan lain-lain untuk mengetahui suatu peristiwa.²⁰

Adapun didalam penulisan ini sumber primer yang dipakai adalah berupa sumber tertulis yang diperoleh melalui buku-buku/artikel. Adapun beberapa buku-buku/artikel yang digunakan oleh penulis adalah:

Mengatasi Kelemahan Kita

Artikel ini ditulis oleh D.N Aidit, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1959. Artikel ini menguraikan bagaimana pemerintahan kabinet Sukiman melarang PKI tumbuh dibumi Indonesia. Sehingga Ia melancarkan gerakan *razia Agustus* yang dilakukan secara diam-diam. Akibatnya dalam waktu beberapa hari saja banyak anggota-anggota PKI yang ditangkap dan dimasukkan didalam penjara. Artikel ini juga menguraikan kelemahan-kelemahan yang masih ada dalam tubuh PKI dan usaha-usaha untuk mengatasinya diantaranya adalah dengan mempersenjatai anggota partai, memperkuat pimpinan kolektif, meningkatkan kewaspadaan dan keberanian. Artikel ini juga menguraikan keberhasilan gerakan ini yang ditunjukkan dengan banyaknya anggota PKI yang dikeluarkan dari penjara.

¹⁹ Kuntowijoyo, 2001, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta, hal 96.

²⁰ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, UI Press, Jakarta , hal 35.

Front Persatuan Nasional dan Sejarahnya

Buku ini ditulis oleh D.N Aidit pada tahun 1952, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1959. Buku ini menguraikan sejarah pembentukan front nasional dan reaksi dari masyarakat Indonesia yang tidak menyetujui pembentukan Front persatuan tersebut, karena dianggap akan meletakkan Indonesia dibawah kekuasaan asing. Buku ini juga menguraikan bagaimana bantahan Aidit terhadap fitnah itu dan mempertegas bahwa pembentukan front nasional tersebut benar-benar untuk melawan penjajah.

Lahirnya PKI dan Perkembangannya

Buku ini ditulis oleh D.N Aidit pada tahun 1955, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1959. buku ini menguraikan sejarah singkat perkembangan PKI yang penuh dengan pergolakan. Dimulai dari sejarah berdirinya PKI pada tahun 1920 dan perkembangannya sampai tahun 1955. Buku ini juga menguraikan bagaimana perjuangan PKI yang penuh dengan kerja keras dan pengorbanan untuk tetap mempertahankan tugas pokok partainya yaitu memperluas Front Persatuan Nasional dan pembangunan partai untuk mewujudkan cita-citanya.

Kaum buruh Indonesia Berjuang untuk hak-haknya

Buku ini ditulis oleh D.N Aidit, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1959. Buku ini menguraikan tentang pekerjaan Sarekat Buruh dan juga menganalisa bagaimana gerakan-gerakan kaum buruh Indonesia lebih mengutamakan perjuangan politik dibanding perjuangan sosial ekonomi. Didalam buku ini sangat menekankan akan pentingnya perjuangan sosial

ekonomi kaum buruh dilakukan secara bersamaan dengan perjuangan politik. Juga dijelaskan pentingnya menggalang persatuan kaum buruh untuk perjuangan revolusioner menuju Indonesia merdeka.

Perkuat Persatuan Nasional dan Perkuat Partai

Buku ini ditulis oleh D.N Aidit, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1959. Dalam buku ini menguraikan tugas-tugas partai yang harus terus diemban dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya terutama untuk terus menggalang Front Persatuan Nasional yang anti imperialisme, anti feodalisme dan meneruskan pembangunan partai yang meluas diseluruh Indonesia dan memiliki massa yang banyak. Dalam buku ini juga menegaskan betapa pentingnya memelihara disiplin yang sama bagi semua anggota agar partai tetap dicintai rakyat dan menjadi kebanggan rakyat.

Menuju Indonesia Baru

Tulisan ini adalah sebuah pidato yang diucapkan oleh D.N Aidit pada tanggal 23 Mei 1953, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1955. Dalam pidato ini Aidit menjelaskan tonggak-tonggak pokok dalam sejarah perjuangan pembebasan bangsa Indonesia dan menunjukkan jalan untuk mencapai Indonesia baru, dimana rakyat berkuasa akan nasibnya sendiri. Pokok-pokok pikiran tersebut kemudian dirumuskan Aidit sebagai rencana program PKI.

Hari Depan Gerakan Tani Indonesia

Buku ini ditulis oleh D.N Aidit, diterbitkan oleh Yayasan Pembaruan pada tahun 1959. Buku ini menguraikan bagaimana jalan keluar untuk membantu gerakan tani yang pada waktu itu menunjukkan kemacetan organisasi dan aksi-aksi kaum tani yang belum meluas serta belum dipimpin dengan baik. Buku ini juga menguraikan kritikan Aidit terhadap nasionalisasi tanah yang tidak sesuai dengan revolusi Indonesia.

Aidit... Abang, Sahabat dan Guru Masa Pergolakan

Buku ini ditulis oleh Sobron Aidit, yang merupakan adik kandung D.N Aidit. diterbitkan oleh Yayasan Nuansa Cendikia pada tahun 2003. Buku ini menguraikan riwayat hidup Aidit, mulai dari masa kecil, masa pendidikan, awal kariernya dan perjalanan kariernya dalam membangun partai PKI.

Selain sumber primer di atas, ada juga sumber sekunder yang dapat mendukung penulisan skripsi ini. Sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang bukan merupakan saksi pandang mata yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Atau secara singkatnya sumber sekunder adalah kesaksian dari kesaksian orang lain yang tidak sejaman dengan peristiwa/sumber yang diperoleh.

Adapun dalam penulisan ini, buku-buku/majalah yang termasuk sumber sekunder adalah:

Komunisme ala Aidit

Buku ini ditulis oleh Peter Edman, diterbitkan oleh *Center For Information Analysis* pada tahun 2005. Buku ini menguraikan tentang perjuangan Aidit

dalam memimpin PKI dan peranannya dalam usaha membangun PKI menjadi partai yang besar di Indonesia dan menjadi partai Komunis terbesar no 3 di dunia setelah RRC dan Rusia. Buku ini juga menguraikan langkah-langkah yang ditempuh Aidit untuk membangun PKI dan menguraikan akhir perjuangan Aidit yang berakhir dengan kegagalan kudeta pada tahun 1965.

Aidit dan Partai pada tahun 1950

Artikel ini ditulis oleh Jacques Leclerc dan dimuat pada majalah Prisma no 7 tahun 1982. Artikel ini menjelaskan bagaimana keterlibatan Aidit dalam PKI yang memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan partai sehingga menjadi partai yang diakui keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Artikel ini juga menguraikan siapa sosok Aidit sebenarnya dan latar belakang ketertarikannya pada ajaran Marx.

Hari-hari Terakhir Aidit

Buku ini ditulis oleh Soebekti, diterbitkan oleh Kedaulatan Rakyat pada tahun 1966. buku ini menguraikan kegagalan kudeta oleh PKI di Jakarta dan juga didaerah-daerah lainnya seperti di Jawa. Buku ini juga menguraikan keberhasilan dalam penumpasan PKI yang dilakukan oleh pasukan militer Indonesia yang bekerja sama dengan rakyat. Buku ini juga menguraikan tempat persembunyian Aidit yang sangat ideal dan juga akhir dari perjuangan Aidit sebagai ketua PKI.

Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia

Buku ini diterbitkan oleh Lembaga Studi Ilmu-ilmu kemasyarakatan pada tahun 1988. Buku ini menguraikan perjalanan PKI yang dimulai dari kebangkitan PKI pada tahun 1920, kehancuran PKI pada tahun 1926 dan 1948 dan kebangkitan kembali PKI pada tahun 1950 atas prakarsa D.N Aidit menjadi partai yang besar dan kembali hancur pada tahun 1965 atas kegagalan kudeta yang dihalangi oleh TNI-AD.

Gerakan 30 September pemberontakan Partai Komunis Indonesia

Buku ini diterbitkan oleh Sekretariat RI pada tahun 1994. Buku ini menceritakan tentang latar belakang timbulnya pemberontakan PKI, aksi-aksi yang dilakukan PKI untuk menyukseskan gerakan 30 Septemhernya dan gerakan penumpasan-penumpasan yang dilakukan oleh ABRI.

Protes Kaum Muda; Kisah bubarnya PKI, Jatuhnya Soekarno dan tenggelamnya KAMI

Buku ini ditulis oleh Yozar Anwar, diterbitkan oleh P.T Variasi Jaya pada tahun 1982. Buku ini menceritakan tentang latar belakang terbentuknya KAMI dan aksi-aksinya dalam menuntut dibubarkannya PKI dan melarang PKI untuk muncul kembali di bumi Indonesia. Buku ini juga menguraikan tindakan KAMI yang menuntut turunnya Sukarno yang dianggap tidak tegas dalam menumpas gerakan 30 September tersebut.

Matinya Aidit

Buku ini ditulis oleh Rosamona, diterbitkan oleh Inkopak-Hazera pada tahun 1967. Buku ini menceritakan siapa tokoh Aidit, perjalanan kariernya dan peranan pentingnya sebagai penentu kebijaksanaan dalam pembangunan PKI. Buku ini juga menceritakan kegagalan perjuangan Aidit dalam gerakan PKI di Jakarta dan Jawa tengah dan menceritakan keberhasilan ABRI dalam menangkap Aidit ditempat persembunyiannya yang merupakan akhir dari hidupnya.

Siapa Menabur Angin Akan Memuai Badai

Buku ini ditulis oleh Soegiarso, diterbitkan oleh Sri Murni pada tahun 1988. Buku ini menceritakan tentang latar belakang munculnya gerakan 30 September dan juga menguraikan adanya peran Sukarno didalamnya yang dianggap juga terlibat dalam gerakan itu.

E. Kajian Teori

Sebelum masuk pada pembahasan skripsi yang berjudul D.N Aidit dan PKI 1950-1965, maka perlu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penulisan ini. Konsep tersebut adalah D.N Aidit dan PKI (Partai Komunis Indonesia). Penjelasan konsep ini sangat penting karena merupakan landasan berpikir dan sebagai pembatasan masalah.

1. D.N Aidit

Dipa Nusantara Aidit adalah tokoh utama pencetus perebutan kekuasaan di Indonesia melalui gerakan 30 September yang gagal.



Diakhir hayatnya Ia menjabat ketua Komite Sentral Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Menteri Koordinator, Wakil ketua MPRS. Dibawah pimpinannya PKI menjadi partai Komunis terbesar didunia setelah RRC dan Rusia.²¹

Aidit sangat menekankan bahwa Marxisme merupakan pedoman untuk bertindak, bukannya dogma yang kaku. Kepemimpinannya membawa suatu pragmatis baru bagi PKI yang memungkinkan partai ini segera menjadi salah satu partai politik terbesar.²²

D.N Aidit memang tokoh Komunis yang lebih menonjol dari kawan-kawannya. Dia tidak senang dengan kawan-kawannya yang agak kalem, sekalipun mereka itu para seniornya. Contohnya dengan Alimin, Semaun dan Tan Ling Djie. Semaun dan Alimin sudah terlalu tua untuk mengikuti arus jaman.

Langkah-langkah yang diambil D.N Aidit hampir sama dengan yang dilakukan Sneevliet pada tahun-tahun menjelang 1920-an. Gerakan-gerakan PKI pada tahun 1960-an sangat efektif. Dia bisa merangkul PNI. Dia bisa bergandengan tangan dengan NU. Dia bisa menyusup ke dalam organisasi-organisasi buruh, organisasi-organisasi wanita (Gerwani), kedalam organisasi mahasiswa (CGMI) dan juga kedalam organisasi wartawan (PWI) serta kantor berita ANTARA.²³

Dipa Nusantara Aidit atau yang bernama asli Achmad Aidit, lahir pada tanggal 30 Juli 1923 di Tanjungpandan di Pulau Belitung.

²¹ *Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid I*, 1988, Cipta Adi Pustaka, Jakarta, hal 146.

²² M.C Ricklefs, 2005, *Sejarah Modern Indonesia 1200-2004*, Serambi, Jakarta, hal 478.

²³ Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), *op.cit*, hal 66.

Merupakan penggerak utama dalam arena politik Indonesia sampai tahun 1965 yang juga merupakan tahun kematiannya di Solo, tepatnya pada tanggal 23 November. Awal kariernya telah dimulai pada tahun 1939 yaitu menjadi pemimpin Persatuan Timur Muda yang anggotanya adalah orang-orang miskin keturunan Cina, Arab dan golongan minoritas lainnya. Kemudian bergabung dengan barisan muda Gerindo. Awal ketertarikannya pada PKI dimulai saat salah seorang pemimpin PKI yaitu Muhammad Yusuf memberinya satu eksemplar buku karangan Karl Marx, *Das Kapital*. Tahun 1943 Ia memutuskan untuk bergabung dengan PKI.

Strategi Aidit bersifat defensif, karena PKI secara luas tidak dipercaya oleh banyak pihak dikalangan elit politik dan militer. Tujuan utamanya adalah melindungi partai ini dari pihak-pihak yang mengharapkan kehancurannya, apapun penyesuaian-penyesuaian teoritis atau aliansi-aliansi politik harus dilakukan untuk itu.²⁴

Saat Aidit mulai aktif dalam Partai Komunis Indonesia ini, suatu sentuhan baru mulai dirasakan dalam partai ini, suatu perubahan besar terjadi dalam sejarah partai ini. Aidit memandang sudah saatnya PKI tidak lagi sembunyi-sembunyi. PKI sudah saatnya mengambil sikap aktif ditengah-tengah massa dalam rangka membangun sebuah front bersatu lebih luas dan bukannya membatasi diri²⁵. Jalan yang ditempuh Aidit

²⁴ M.C Ricklefs, *op.cit*, hal 479.

²⁵ Peter Edman, *op.cit*, hal 67.

memang berhasil, terbukti pada saat pemilu 1955 PKI menduduki peringkat lima besar.

Di bawah pimpinan Aidit, PKI berkembang pesat padahal ketika ia mengambil alih partai, PKI baru saja mengalami kehancuran akibat pemberontakan Madiun. Sekonyong-konyong pada pemilu 1955, PKI meraih 32 kursi parlemen, merupakan kekuatan keempat setelah PNI, Masyumi dan NU.

Kemenangan yang dicapai PKI dalam pemilihan umum tahun 1955 sebagai hasil upaya agitasi dan propaganda D.N Aidit sungguh sesuatu yang luar biasa, jika diingat kembali pada tujuh tahun sebelumnya PKI pernah mengkhianati bangsa Indonesia. Dengan kemenangan itu, PKI berusaha kembali untuk mewujudkan tujuan politiknya yang telah gagal mereka capai pada tahun 1948, yakni membentuk negara dan masyarakat komunis.²⁶

Dengan dimulainya era demokrasi terpimpin, sebuah periodisasi baru dalam sejarah PKI pun dimulai. Masa demokrasi terpimpin ini berusia enam atau tujuh tahun, dan dalam periode ini PKI telah diperbaharui dan terkonsolidasikan dengan dibawah kepemimpinan Aidit dapat menikmati kebebasan terbesarnya²⁷.

²⁶ Moerdiono, 1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 28.

²⁷ Peter Edman, *op.cit*, hal 121.

2. PKI (Partai Komunis Indonesia)

PKI merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang menganut ideologi komunis. Maka dalam hal ini akan diuraikan konsep partai politik dan komunis.

a. Partai politik

Menurut Miriam Budiarjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁸

Partai politik adalah organisasi artikulatif yang terdiri-dari pelaku-pelaku politik yang aktif dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda.²⁹ Dengan demikian partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan masyarakat politik yang luas.

Lahirnya partai politik di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan di awal abad ke-20. Partai politik yang lahir didalam masa

²⁸ Miriam Budiarjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta, hal 14.

²⁹ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 32.

itu memiliki tiga aliran politik utama yaitu Islam, Nasionalis dan Sosialis/Marxis. Adapun parpol yang beraliran Islam contohnya adalah SI (Sarekat Islam) pada tahun 1912 yang dipimpin oleh Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto, parpol yang beraliran komunis adalah PKI (Partai Komunis Indonesia) dan parpol yang beraliran nasionalis contohnya adalah PNI (Partai Nasional Indonesia).

Setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, kelahiran partai politik makin banyak dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah no X tanggal 3 November 1945. sejak itu berdiri berbagai partai politik berdasar agama baik islam maupun Kristen/Khatolik dan agama lain, misalnya Masyumi, PSII, Perti, NU, Partindo dan Partai Khatolik. Kemudian lahir pula berbagai parpol berdasarkan kebangsaan misal PNI, PI dan lain-lain. Selain itu juga partai dengan dasar Marxisme/Komunisme antara lain PKI, Partai Murba dan Partai Buruh.

Pada tahun 1950, sistem pemerintahan presidensiil berdasar UUD 1945 berubah menjadi sistem parlementer berdasar UUD sementara tahun 1950. Dalam pemilu pertama tahun 1955 muncul empat partai besar yang memiliki tiga aliran politik yang utama yaitu Masyumi dan NU (mewakili partai agama), PNI (mewakili aliran kebangsaan/nasionalis) dan PKI (mewakili aliran Marxisme/Komunisme). Tetapi karena situasi politik bertambah buruk dengan terjadinya pemberontakan di beberapa daerah,

terjadinya kemerosotan ekonomi dan tidak berhasilnya konstituante merumuskan UUD baru pengganti UUD S 1950 maka Presiden Sukarno mengumumkan dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan Indonesia kembali ke UUD 1945 dengan sistem presidensiil.

b. Komunisme

Istilah komunisme mengandung dua pengertian. Pertama, ada hubungannya dengan komune (*commune*), satuan dasar bagi wilayah negara yang berpemerintahan sendiri, dengan negara itu sendiri sebagai federasi dari komune-komune itu. Bersamaan dengan itu, dan ini merupakan pengertian kedua dari istilah komunisme, ia menunjukkan milik atau kepunyaan bersama.³⁰ Komunisme juga dimengerti sebagai sistem sosial politik, ideologi dan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai marxisme.³¹

Komunisme itu merupakan suatu gerakan Marxis, malahan satu-satunya Marxis yang bersifat murni. Menurut materialisme sejarah, bentuk-bentuk masyarakat disebabkan alat-alat produksi yang terdapat pada suatu masa. Contohnya sebelum terdapat mesin, maka masyarakat industri yang kita kenal sekarang tidak mungkin ada, tetapi sesudah ada mesin-mesin timbulnya “masyarakat industri” tidak terhalang lagi.³²

³⁰ Deliar Noer, *Pemikiran Politik Negeri Barat*, Mizan, Bandung, Bab XII hal 3.

³¹ Miriam Budiardjo, 1982, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, hal 87.

³² J. Hul Sebos, 1955, *Komunisme, Pengaduan, Djanji atau Ancaman?*, Pembangunan Jakarta, Jakarta, hal 26.

Komunisme juga dapat dikatakan sebagai gerakan dan kekuatan politik partai-partai komunis yang sejak Revolusi Oktober 1917 dibawah pimpinan W.I Lenin menjadi kekuatan politis dan ideologis internasional. Istilah komunisme ini juga dapat dipakai untuk “ajaran komunisme” atau “marxisme leninisme” yang merupakan ajaran atau “ideologi” resmi komunisme. Marxisme merupakan salah satu komponen dalam sistem ideologis komunisme.³³

Timbulnya faham komunis dilatarbelakangi oleh situasi sosial pada awal abad ke-19 di Eropa Barat, ketika kaum buruh hidup dalam keadaan sangat menyedihkan. Sistem kapitalisme yang mendominasi perkembangan sektor industri dan lebih mengutamakan keuntungan ekonomis, telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kehidupan kaum buruh. Dengan demikian yang nampak dalam kapitalisme adalah sistem pemerasan seperti halnya feodalisme dan perbudakan. Buruh dibayar dengan harga pasar penuh dari tenaganya, dan hanya dibayar sebesar itu, yang tidak mencerminkan nilai sesungguhnya sebagaimana dihasilkan oleh tenaga kerjanya.³⁴

Dengan adanya ketidakadilan itu, telah menimbulkan ketegangan antara dua kelas yang ada dalam masyarakat industri. Ketegangan ini memunculkan perjuangan kelas dan pada akhirnya perjuangan kelas

³³ Franz Magnis Suseno, 1999, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 5.

³⁴ Sutarjo Adisusilo, 2005, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik Sampai Yang Modern*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, hal 163.

ini akan menghasilkan suatu masyarakat tanpa kelas di mana sarana-sarana produksi menjadi milik bersama. Dengan perkataan lain, perjuangan kelas mutlak perlu untuk mewujudkan masyarakat komunis. Dan dalam masyarakat yang telah mencapai komunisme penuh, prinsip ekonomi telah meningkat menjadi “setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima sesuai dengan kebutuhannya”.³⁵

Adapun marxisme dipahami sebagai ajaran atau doktrin yang bersumber pada gagasan-gagasan Karl Marx. Ajaran Karl Marx pada dasarnya menitik beratkan pada empat ide, yaitu:

- a. Sistem kapitalisme mengakibatkan sekelumit kecil orang kaya hidup dalam kemewahan yang berlimpah, sedangkan kaum pekerja/buruh yang teramat banyak jumlahnya hidup dalam kesengsaraan.
- b. Cara untuk merombak ketidakadilan adalah dengan melaksanakan suatu kelas sosialis, yaitu sistem di mana alat-alat produksi dikuasai oleh negara, bukannya pribadi swasta.
- c. Pada hematnya, satu-satunya jalan yang paling baik untuk melaksanakan sistem sosialis ini adalah lewat revolusi kekerasan.

³⁵ Michael Hart, 1985, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal 162.

d. Untuk mewujudkan suatu sistem sosialis harus dibentuk kediktatoran partai komunis dalam jangka waktu yang memadai.³⁶

Didalam masyarakat timbul perbedaaan kelas-kelas. Perkataan kelas ini adalah perkataan yang penting sekali dalam marxisme. Di dalam suatu masyarakat tiap-tiap manusia tergantung hidupnya dari alat-alat produksi berada dalam kekuasaan dari suatu golongan manusia yang kecil jumlahnya. Pertentangan kelas inilah menurut Marx yang menyebabkan segala kesengsaraan dan segala perjuangan dalam sejarah.³⁷ Terbaginya masyarakat menjadi kelas atas dan kelas bawah tersebut merupakan salah satu ciri khas masyarakat kapitalis. Kelas atas adalah para pemilik alat-alat produksi, kelas bawah adalah kaum buruh. Kelas atas adalah kelas sosial yang yang menguasai bidang produksi, kelas bawah adalah mereka yang harus tunduk terhadap kekuasaan kelas atas. Adapun kedudukan yang mereka dapat adalah mereka tidak perlu bekerja sendiri, karena dapat hidup dari pekerjaan kelas bawah. Buruh hanya diberi pekerjaan apabila ia bekerja demi keuntungan pemilik. Pekerjaan yang melebihi waktu yag diperlukan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri merupakan keuntungan si pemilik. Karena itu hubungan antara kelas atas dan

³⁶ *Ibid*, hal 88.

³⁷ *Ibid*, hal 12.

kelas bawah pada hakikatnya merupakan hubungan penghisapan tenaga kerja kelas buruh.³⁸

Adapun yang menjadi tujuan sistem ekonomi kapitalis adalah uang dan bukan barang yang diproduksi. Makin banyak keuntungan sebuah perusahaan, makin kuat kedudukannya selanjutnya di pasar, dan sebaliknya. Dengan demikian setiap majikan dengan sendirinya akan menekan biaya tenaga kerja buruh. Tampak bahwa hubungan kerja dalam sistem produksi kapitalis tidak stabil. Karena para pemilik menguasai bidang ekonomi, mereka dapat memenangkan kepentingan mereka terhadap kepentingan kelas buruh. Tetapi begitu kekuasaan kelas atas berkurang, hubungan sosial tidak dapat stabil lagi, kelas buruh secara otomatis akan semakin mampu memenangkan kepentingan mereka, sehingga akhirnya terjadi revolusi dan hak milik pribadi dapat mereka hapuskan.³⁹

Dengan semakin timbulnya kesadaran akan eksploitasi yang mereka derita dan perasaan senasib sepenanggungan, membuat semangat juang mereka semakin kokoh dan tak terpatahkan. Mereka tidak akan membiarkan diri mati, mereka akan memberontak, mereka akan menjalankan revolusi sosialis. Revolusi itu pada permulaannya akan bersifat politis yaitu merebut kekuasaan negara dan mendirikan "diktatur proletariat". Artinya menggunakan kekuasaan negara untuk menindas kaum kapitalis untuk mencegah mereka memakai

³⁸ Franz Magnis Suseno, *op.cit*, hal 115.

³⁹ *Ibid*, hal 117.

kekayaan dan fasilitas luas yang masih mereka kuasai untuk menggagalkan revolusi ini dan mengembalikan keadaan lama. Setelah itu hak milik atas tanah dan atas pabrik-pabrik serta alat-alat produksi lain dicabut dan dialihkan ke negara.

Apabila sisa-sisa perbedaan kelas dalam masyarakat sudah hilang, maka dengan sendirinya diktatur proletariat juga hilang karena tidak ada kelas yang perlu diawasi dan ditindas lagi. Dengan demikian produksi sudah terpusat dalam tangan-tangan individu yang berasosiasi, maka kekuasaan umum kehilangan sifat politisnya. Negara lama kelamaan menghilang. Jadi dengan merebut kekuasaan dan menghapus hak milik pribadi, proletariat akhirnya menciptakan masyarakat tanpa kelas. Dalam masyarakat tanpa kelas, negara tidak dihapus namun negara menjadi layu dan mati sendiri.⁴⁰

Menurut Karl Marx, untuk melakukan revolusi guna membentuk sebuah masyarakat komunis penuh, maka inti kekuatan kaum revolusioner harus didasarkan pada kekuatan kaum proletar. Analisa Karl Marx untuk menempatkan kaum proletar/buruh sebagai kekuatan revolusi, didasarkan atas dua alasan, yaitu:

- a. Jumlah kaum proletar/buruh cukup besar dan mereka yang merasakan langsung penderitaan akibat sistem kapitalisme di Eropa pada waktu itu.

⁴⁰ *Ibid*, hal 169-170.

- b. Kaum proletar/buruh banyak bermukim di wilayah perkotaan, sehingga tenaga mereka dapat digunakan secara efektif untuk merebut pusat-pusat kekuasaan pemerintah di kota-kota.

Lebih lanjut, dalam analisisnya Karl Marx juga menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil oleh kaum revolusioner untuk mewujudkan masyarakat komunis, setelah kemenangan politis berhasil dicapai. Menurut Karl Marx, setelah kemenangan politis berhasil dicapai, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk pemerintahan diktator proletariat. Setelah itu pemerintahan diktator proletariat harus segera melancarkan proses nasionalisasi dan sosialisasi alat-alat produksi serta penghapusan hak milik dan sistem kapitalisme. Setelah diadakan proses nasionalisasi alat-alat produksi serta penghapusan hak milik dan sistem kapitalisme diharapkan secara bertahap akan terbentuklah fase masyarakat komunis penuh, dimana berlaku prinsip ekonomi: setiap orang memberi sesuai dengan kemampuannya dan menerima balas jasa sesuai dengan kebutuhannya atau dengan kata lain berlaku prinsip sama rata, sama rasa.⁴¹

Marxisme adalah suatu ajaran pembebasan, di mana diajarkan bahwa manusia dapat menentukan perjalanan sejarah dan menghentikan segala penindasan dan segala pertentangan kelas. Inilah panggilan istimewa kepada kaum proletariat, yang akan

⁴¹ Sutarjo Adisusilo, *op.cit.*, hal 166-167.

membentuk masyarakat komunis, dimana tidak akan ada lagi penindasan dan ketidakadilan. Khususnya sebagai ajaran pembebasan, marxisme merupakan daya penarik yang kuat bagi beribu-ribu manusia.

Di dalam marxisme Rusia, pada akhirnya terdapat perpecahan yaitu adanya sayap kanan dan sayap kiri. Sayap kanan berpikir terus dalam garis marxis satu. Sayap kanan ini kemudian bernama Mensjewiki. Mereka menumpahkan perhatiannya kearah mengorganisir kaum buruh dan sarekat-sarekat sekerja. Terdapat juga paham kritis terhadap marxisme yang seolah-olah menggambarkan revisiois di Eropa Timur. Pada sayap kiri seluruh titik berat terletak dalam aksi revolusioner. Marxisme merupakan kepercayaan yang mutlak atas panggilan revolusi dan penghidupan komunis dikemudian hari. Sayap kiri ini bernama Bolsjewis. Pemimpin besar dari marxisme Bolsjewis ini adalah Lenin.

Pada dasarnya Lenin melakukan penyempurnaan terhadap gagasan-gagasan Karl Marx dalam hal peranan partai, petani dan revolusi. Dalam masalah kepartaian Lenin tidak sepaham sepenuhnya dengan Marx. Dalam pemikiran Marx partai itu hendaknya mempunyai massa yang banyak dan terdiri dari kaum buruh yang fanatik terhadap ajaran komunis. Sedangkan menurut Lenin partai itu haruslah kecil, militant dan terdiri dari "*professional revolutionaries*" untuk memimpin kaum proletar. Kalau sekarang

disebut partai kader. Partai seperti itulah yang mungkin merupakan alat yang ampuh untuk mewujudkan masyarakat komunis. Lenin tidak setuju sepenuhnya dengan apa yang dikemukakan Marx tentang revolusi. Menurut Marx revolusi komunis harus menitikberatkan pada kekuatan kaum proletar dan dilakukan dinegara dimana sektor industrinya mempunyai kedudukan yang cukup dominan. Namun menurut Lenin, revolusi komunis dapat dilakukan dinegara agraris yang sektor industrinya belum berkembang. Revolusi ini dapat dilakukan dengan bantuan kaum petani yang akan mendukung perjuangan kaum proletar yang jumlahnya belum cukup besar. Tetapi menurut Lenin, kekuatan utama atau inti kekuatan kaum revolusioner tetap harus dipegang oleh kaum proletar.⁴²

Paham komunis dengan begitu tidak dapat terlepas dari ajaran marxisme. Di mana masyarakat yang diinginkan dari pandangan tersebut adalah terciptanya masyarakat yang tanpa kelas, sehingga tidak ada perbedaan sosial dalam masyarakat yang memicu adanya konflik-konflik sosial, maka faktor-faktor produksi yang ada dalam suatu negara dikuasai sepenuhnya oleh negara.

Cina merupakan suatu negara yang juga mengikuti paham komunis, tetapi paham komunis tersebut telah dimodifikasi oleh Mao Zedong. Apabila negara-negara Eropa yang mengikuti paham komunis gerakannya diorientasikan pada kaum buruh pabrik, tetapi

⁴² *Ibid*, hal 172-173.

Cina gerakannya lebih ditekankan pada kaum petani. Hal ini disebabkan karena kondisi Cina pada waktu itu masyarakatnya sebagian besar adalah petani, sementara industri Cina kurang berkembang.

Mulanya Mao berpegang pendapat, kaum buruh industri dikota-kota merupakan basis terkuat penyokong Partai Komunis, ini sejalan dengan teori Marx. Tapi sekitar tahun 1952, Mao berkesimpulan soko guru partai berasal dari kaum tani, bukan buruh. Anggapan ini ada dasarnya, karena selama pertempuran dengan rejim nasionalis Mao selalu berada dipedesaan. Gagasan ini diterapkan tatkala dia menjadi kepala Negara. Sewaktu Stalin berkuasa di Rusia umumnya pembangunan manitik beratkan pada sektor produksi industri, Mao umumnya menarik perhatian lebih besar pada pembangunan sektor pertanian dan pedesaan. Meski begitu, pembangunan industri Cina dibawah Mao dapat maju dengan pesatnya.

Dengan demikian menurut Mao Zedong, revolusi di Cina, harus mendasarkan diri pada kekuatan dan dukungan kaum tani. Lebih lanjut Mao Zedong memaparkan bahwa titik berat revolusi harus difokuskan atau dimulai dari desa-desa bukan dari kota-kota.⁴³Pandangan Mao untuk menempatkan kaum tani sebagai inti kekuatan revolusi komunis, didasari atas beberapa alasan yaitu:

⁴³ Arifin Bey, 1953, *Dari Sun Yat Sen ke Mao Tse Tung*, Tinta Mas, Jakarta, hal 18.

- a. Jumlah kaum tani cukup besar, dan mereka yang mengalami langsung penderitaan akibat sistem oligarki tuan tanah dan sistem politik di Cina pada waktu itu.
- b. Hanya kaum tanilah yang sanggup menyediakan bahan makanan dan bahan mentah lainnya untuk kepentingan revolusi. Selain itu, jumlah petani yang cukup besar dapat digunakan sebagai anggota tentara kaum revolusioner.

Dalam bukunya, *demokrasi baru*, yang ditulis pada bulan November 1938, Mao juga menerangkan mengenai tindakan-tindakan yang perlu diambil kaum revolusioner setelah kemenangan politis berhasil dicapai. Menurut Mao, setelah kemenangan politis berhasil dicapai, maka kaum revolusioner harus segera membentuk pemerintahan koalisi demokrasi yang unsur-unsurnya terdiri dari kaum tani, kaum buruh, kaum borjuis dan kaum kapitalis nasional.⁴⁴

Dalam bidang ekonomi, tindakan yang perlu segera dilaksanakan adalah tetap mengakui hak milik dan melegalkan sistem kapitalisme. Namun sistem kapitalisme yang dibiarkan hidup adalah sistem kapitalisme nasional. Yang dimaksud sistem kapitalisme nasional menurut Mao adalah sistem kapitalisme yang lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan umum/nasional, daripada mencari keuntungan ekonomis semata. Dalam sistem kapitalisme ini akan diwujudkan suatu bentuk hubungan baru yang saling menguntungkan

⁴⁴ Armin Pane, *Tiongkok Zaman Baru*, Arbati, Jakarta, hal 52.

antara pihak pengusaha dan buruh. Disatu pihak, pengusaha harus melindungi kepentingan dan hak-hak- buruh. Di lain pihak, buruh harus meningkatkan kualitas kerja dan pengabdian terhadap pengusaha di mana ia bekerja. Sedangkan dalam bidang agraria, langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan usaha *land reform* (pembagian tanah) untuk kepentingan kaum petani kecil. Menurut hemat Mao Zedong, sistem kapitalisme nasional dan pelaksanaan *land reform* secara optimal, secara bertahap akan membuka jalan bagi terbentuknya masyarakat komunis penuh. Jadi revolusi komunis di Cina pada dasarnya merupakan revolusi demokrasi borjuis, bukan revolusi sosialisme proletar.

Penentuan peran militer sebagai kekuatan yang dinamis dari perkembangan revolusi telah dikemukakan secara jelas oleh Lenin dan Stalin. Ketertarikan Lenin dengan model militer sedikit banyak telah mempengaruhi Mao. Seperti pada dasar negara sebagai kepentingan umum dari militer yang ditegaskan seterusnya oleh Lenin. Sumbangan Mao disini dalam pengembangan konsep dari “perang rakyat” yang berlarut-larut dan strategi dari perang gerilya petani.

Kekuatan politik, Mao mengemukakan bahwa partai berhak atas senjata dan senjata tidak akan pernah dan tidak diperbolehkan untuk memimpin partai. Dia menegaskan dalam kata lain, di atas kesatuan militer dan politik dan subordinasi dari yang lebih dulu untuk yang

terakhir. Aktivitas militer bukan untuk tujuan pengganti dan bukan menduduki lebih dulu maupun bentuk lain dari aktivitas atau kegiatan selanjutnya, mesti dinilai oleh kriteria politik dan operasi militer dan merupakan suatu bentuk politik yang nyata.

Indonesia adalah salah satu negara yang pernah dijajah oleh kaum kapitalis asing dan feodal asing. Hal ini dilihat dari banyaknya modal swasta yang mendominasi Indonesia dan adanya sistem ekonomi feodal yang mendominasi masyarakat petani sehingga menghambat kemajuan Indonesia. Dengan demikian perlu diadakan revolusi untuk menumbangkan kedua pengaruh asing itu.

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa PKI adalah sebuah partai politik di Indonesia yang menganut ideologi marxisme-leninisme, dimana tujuannya adalah menuju masyarakat Indonesia yang sosialis yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat dan psikologi serta kebudayaan Indonesia. Kaum buruh dan petani merupakan mayoritas penduduk Indonesia, sehingga menjadi soko guru utama dalam revolusi itu.

Adapun paham komunis yang diterapkan oleh Aidit pada dasarnya tidak terlalu bertumpu pada paham komunis yang dikembangkan oleh Karl Marx, ataupun paham komunis yang dikembangkan Mao. Namun Aidit memadukan antara keduanya menjadi marxisme yang khas Indonesia yang memiliki berbagai ciri

khas khusus pribumi. Dengan demikian varian komunisme yang diterapkan di Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan dengan konsep aslinya yang berasal dari daratan Eropa. Meskipun tetap mempertahankan berbagai prinsip dasar marxisme.

Dengan demikian saat PKI berada dibawah kepemimpinan Aidit, masyarakat petani adalah sasaran utama kegiatan partai walaupun tak menutup kemungkinan kaum buruh juga menjadi sasaran utamanya. Alasannya adalah terkait dengan penduduk Indonesia sebagian besar adalah para buruh dan tani yang kemudian menjadi basis gerakan revolusinya. Hal tersebut dikarenakan kaum tani dan buruh inilah tenaga produktif yang menentukan dalam menyukseskan triprogram pemerintah yakni sandang, pangan dan papan.

Sesuai dengan lambang PKI yang melukiskan berpadunya palu dan arit maka palu manifestasinya dari kaum buruh dan arit adalah kaum tani yang keduanya dibina oleh PKI sebagai soko guru yang tidak terpisahkan. Kaum buruh diberi wadah Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan basis PKI terutama adalah kaum buruh perkotaan dan buruh perusahaan pertanian. Kemudian partai ini juga melebarkan sayap ke sektor-sektor kemasyarakatan lainnya, termasuk kaum tani dan memberi wadah Barisan Tani Indonesia.

F. Hipotesis

Yang dimaksud dengan hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang harus diuji kebenarannya. Seringkali peneliti tidak dapat memecahkan permasalahannya hanya dengan sekali jalan. Permasalahan itu akan diselesaikan segi demi segi dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk tiap-tiap segi, dan mencari jawaban melalui penelitian yang dilakukan.⁴⁵

Dalam penelitian, hipotesis merupakan pedoman bagi penelitian. Dengan adanya hipotesis, maka langkah pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan lebih terarah. Adapun hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Kalau keluarga mendukung dan selalu aktif dalam organisasi nasional maka, D.N Aidit mengawali kariernya dalam politik tingkat nasional
2. Kalau kepiawaiannya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan partai dan memelihara hubungan baik dengan Sukarno berhasil, maka D.N Aidit sebagai ketua Partai Komunis Indonesia mempunyai peranan besar dalam memimpin PKI.
3. Kalau PKI dapat berkembang di Indonesia, maka PKI akan dapat bersaing dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang sosial-ekonomi dan politik di Indonesia.

⁴⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, P.T Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal 62.

G. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penulisan

Dalam mengkaji peranan Aidit dalam perkembangan Partai Komunis Indonesia 1950-1965 ini, penulis menggunakan metode sejarah. Metode sejarah itu merupakan suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau secara imajinatif dari fakta-fakta yang diperoleh melalui proses historiografi. Dalam skripsi ini metodologi penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif analisis.

Deskriptif analisis merupakan pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan obyek pemikiran pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak/sebagaimana adanya. Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan yang sebenarnya. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta/sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴⁶

Metode adalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Hal ini sangat bermanfaat bagi sejarawan untuk

⁴⁶ Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 63.

merekonstruksi peristiwa masa lampau secara imajinatif berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui historiografi.⁴⁷

Adapun tahap-tahap yang digunakan dalam metode penelitian ini mencakup lima tahapan yaitu:

1. Heuristik (pengumpulan sumber)

Sebelum melakukan penulisan, maka satu hal penting yang harus dilakukan adalah pengumpulan sumber, baik itu sumber primer maupun sekunder. Heuristik adalah proses pengumpulan data untuk keperluan subyek yang diteliti.⁴⁸

Adapun sumber data penelitian ini, baik yang primer maupun sekunder dapat diperoleh dari literatur yang terdapat di perpustakaan Sanata Dharma dan perpustakaan Ignatius yang berupa buku-buku, majalah dan dokumen. Adapun contoh dari sumber primer dalam penulisan ini adalah buku-buku/artikel yang ditulis dari D.N Aidit sendiri seperti misalnya lahirnya PKI dan perkembangannya, kaum buruh Indonesia berjuang untuk hak-haknya, konfrontasi peristiwa Madiun 1948-peristiwa Sumatera 1956 dan lain-lain. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diantaranya adalah komunisme ala Aidit yang ditulis oleh Peter Edman, langkah merah: gerakan PKI 1950-1955 yang ditulis oleh Subhan, hari-hari terakhir Aidit yang ditulis oleh Soebekti dan lain-lain.

⁴⁷ Louis Gottschalk, 1975, *Mengerti Sejarah*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 35.

⁴⁸ *Ibid*, hal 32.

2. Kritik sumber

Sumber yang dikumpulkan harus sesuai dengan jenis sejarah yang akan ditulis. Setelah semua sumber yang diperlukan sudah terkumpul maka dilakukan kritik terhadap sumber yang diambil. Tujuannya adalah untuk melihat tingkat otensitas (keaslian sumber) dan tingkat kredibilitas sehingga terhindar dari kepalsuan dan ketidakeaslian.

Kritik sumber ini terdiri-dari kritik intern dan juga kritik ekstern. Kritik intern dilakukan dengan menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya/menilai kebenaran dari isi buku/dokumen itu. Pada umumnya kritik intern ini dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber yang didapat sehingga dapat memperoleh fakta yang jelas. Sedangkan kritik ekstern digunakan untuk mengetahui keaslian sumber yang digunakan untuk penulisan. Kritik ekstern ini dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan yang digunakan, sifat bahan, gaya penulisan, bahasa yang dipakai, jenis huruf yang digunakan untuk membuktikan keasliannya itu. Hasil dari kritik sumber berupa fakta-fakta yang merupakan unsur untuk melakukan rekonstruksi.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah langkah yang perlu dilakukan yaitu untuk mengurangi unsur subyektivitas dalam suatu penulisan sejarah. Atau dengan kata lain interpretasi merupakan penafsiran terhadap fakta-fakta yang telah diuji kebenarannya dan menganalisis sumber untuk

menghasilkan suatu rangkaian peristiwa. Untuk itu analisis sumber ini dilakukan dengan menjelaskan data-data yang ada atau menguraikan informasi dan mengkaitkannya antara satu dengan yang lainnya.

4. Historiografi

Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Historiografi adalah suatu proses rekonstruksi dari rentetan peristiwa masa lampau yang merupakan suatu totalitas perjalanan sejarah yang utuh, yang didalamnya mengandung aspek kronologis sehingga memberi kemudahan dan penjelasan kepada penulis dan pembaca mengenai urutan waktunya. Dalam penulisan skripsi ini menyajikan model penulisan deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan melukiskan peranan D.N Aidit dalam membangun Partai Komunis Indonesia tahun 1950-1965. sebuah tinjauan dalam prespektif historis-politis.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi yang berjudul “D.N Aidit dan Partai Komunis Indonesia 1950-1965” adalah pendekatan historis, psikologis, politik, sosial dan personal. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan historis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perjuangan bangsa Indonesia dimasa lalu.

Pendekatan psikologis adalah pendekatan yang berorientasikan pada tingkah laku manusia. Syarat utama dari pendekatan ini adalah

tingkah laku manusia yang berorientasi umum. Masalah dalam pendekatan psikologi ini adalah pada tingkah laku manusia baik tingkah laku dalam maupun tingkah laku luar. Penganalisa dari tingkah laku tersebut mesti membuat ketentuan dengan hadirnya suatu organisme atau sebagai penengah antara rangsangan dari luar dan kemungkinan adanya tanggapan. Seperti yang diketahui pada dasarnya sifat dari manusia adalah halus dan selalu hidup dalam kebersamaan, namun karena adanya rangsangan dari luar yang tidak sesuai dengan sifat dasar manusia tersebut maka sifat manusia yang semula halus akan mengalami perubahan.⁴⁹

Dengan demikian pendekatan psikologis ini penulis gunakan untuk mengkaji biografi D.N Aidit. Melalui pendekatan ini, penulis menguraikan sifat dasar D.N Aidit yang dapat diketahui dari biografi D.N Aidit. Dalam biografi tersebut penulis menguraikan sifat-sifat dasar beliau yang memang memiliki kepribadian ulet, berkemauan keras, militan, berpandangan jauh, keras kepala, dan memiliki sifat sosial yang tinggi. Sehingga hal itu menjadi latar belakang ketertarikannya terjun dalam bidang politik yang dikemudian hari membawanya menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia. Selain itu juga ketertarikannya dalam politik ini juga dipengaruhi oleh faktor keluarga, pendidikan yang ditempuhnya dan pergaulannya dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional.

⁴⁹ Robert F. Berchover, *A Behaviorial Approach to Historical Analysis*, New York: A Free Press Paperback, hal 25.

Pendekatan politik digunakan untuk melihat peranan D.N Aidit dalam membangun Partai Komunis Indonesia sehingga menjadi partai massa yang besar dan untuk mengkaji aspek-aspek yang melandasi pemikirannya dan kebijakan-kebijakannya dalam membangun Partai Komunis tersebut. Contohnya adalah dengan melakukan koalisi dengan partai ternama seperti PNI dan juga memanfaatkan kedekatannya dengan Sukarno untuk dijadikan perisai pelindung dalam gerakannya.

Pendekatan sosial digunakan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang dilakukan D.N Aidit untuk menyebar luaskan ajaran Marxis kepada masyarakat Indonesia. Dalam hal ini Ia melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat khususnya kaum buruh dan tani yang merupakan sumber penindasan dari golongan kapitalis dan borjuasi. Tindakan ini juga dilakukan dalam rangka mempromosikan partainya sebagai partai yang memperjuangkan nasib rakyat kecil. Dengan demikian keberadaan partai ini dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Pendekatan personal digunakan untuk melihat latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan dan watak serta kepribadian D.N Aidit. Jadi pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perilaku dan latar belakang kehidupan D.N Aidit.



H. Sistematika Penulisan

Skripsi yang berjudul “D.N Aidit dan Partai Komunis Indonesia 1950-1965” mempunyai sistematika sebagai berikut:

Bab I. Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, hipotesis, metodologi penulisan, metode dan pendekatan serta sistematikan penulisan.

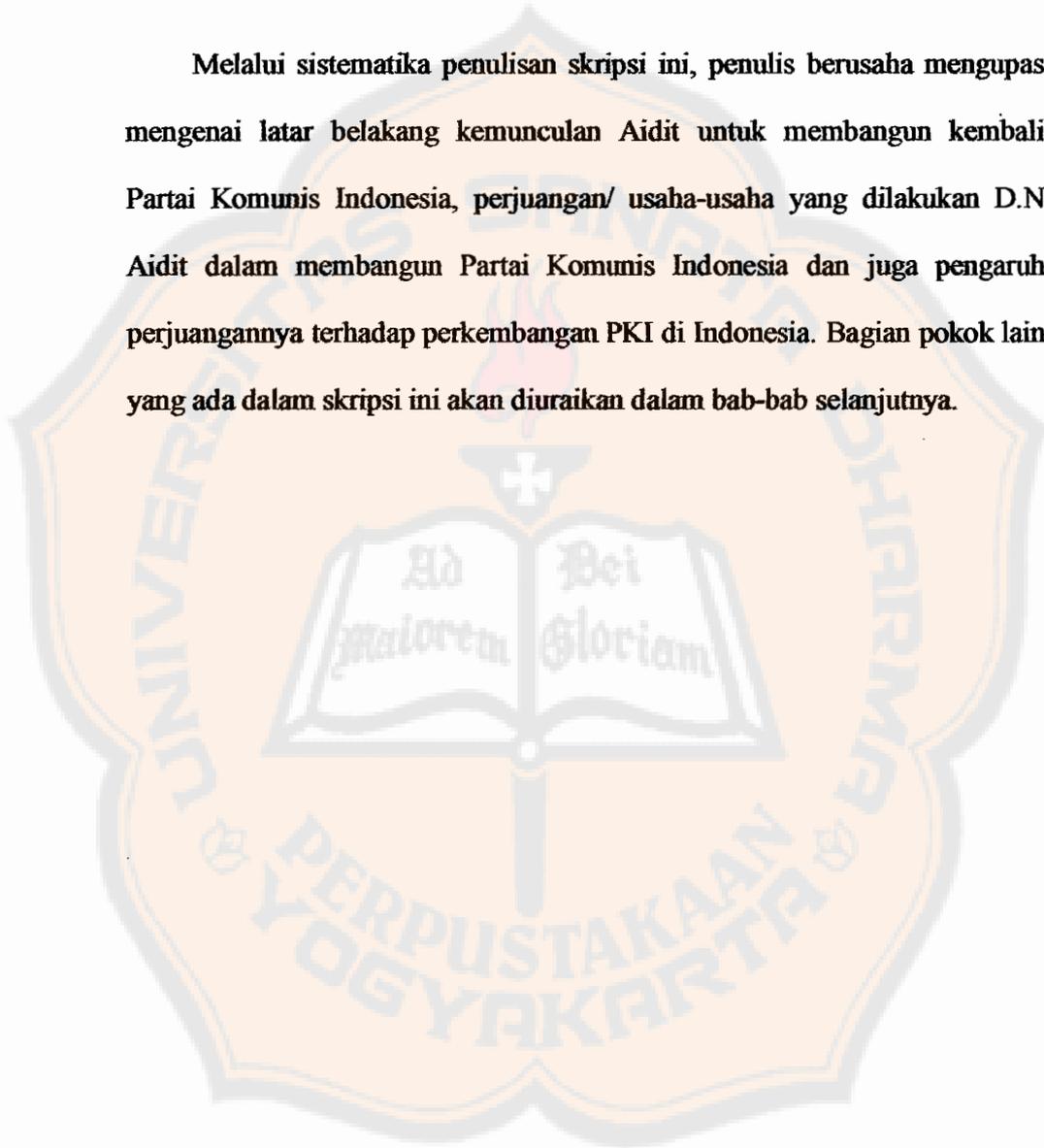
Bab II Bab ini menyajikan uraian tentang latar belakang yang menyebabkan munculnya D.N Aidit untuk membangun kembali PKI, yang terlebih dahulu dijelaskan mengenai biografi Aidit yang mencakup latar belakang keluarga, pendidikan, watak dan kepribadiannya. Kemudian dilanjutkan dengan memberi gambaran situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia dan juga kondisi perpolitikan partai Komunis Indonesia.

Bab III Bab ini menyajikan uraian tentang Peranan D.N Aidit dalam perkembangan Partai Komunis Indonesia yang mencakup usaha-usaha dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali partai tersebut termasuk dalam memelihara hubungan yang baik dengan Sukarno.

Bab IV Bab ini menyajikan uraian tentang pengaruh perkembangan Partai Komunis di Indonesia terhadap situasi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia.

Bab V Bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan dalam Bab II, III, dan IV. Uraian dari permasalahan-permasalahan yang kemukakan akan dibahas dalam bab-bab.

Melalui sistematika penulisan skripsi ini, penulis berusaha mengupas mengenai latar belakang kemunculan Aidit untuk membangun kembali Partai Komunis Indonesia, perjuangan/ usaha-usaha yang dilakukan D.N Aidit dalam membangun Partai Komunis Indonesia dan juga pengaruh perjuangannya terhadap perkembangan PKI di Indonesia. Bagian pokok lain yang ada dalam skripsi ini akan diuraikan dalam bab-bab selanjutnya.



**BAB II
LATAR BELAKANG MUNCULNYA D.N AIDIT
SEBAGAI PEMIMPIN PARTAI KOMUNIS INDONESIA**

Ketika kita berbicara mengenai peristiwa 65, maka yang terbayang dalam benak kita adalah peristiwa pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan gerakan 30 September (G30S/PKI).

Mungkin masih segar dalam ingatan kita, setiap tanggal 30 September pada saat rezim Soeharto berkuasa kita diwajibkan menonton film mengenai peristiwa 65 itu. Karya sutradara ternama, Arifin C. Noer itu begitu mengunggulkan kepahlawanan Soeharto dan begitu mempertontonkan adegan kekejaman PKI dengan lukisan tindakan biadabnya yang amat melanggar hak asasi manusia.

Skenario cerita tersebut masih terus tertanam dalam ingatan kita dan berhasil memprovokasi kebencian yang amat dalam bahwa yang bertanggung jawab dari peristiwa biadab itu adalah ulah tangan-tangan PKI. Namun benarkah PKI yang paling bertanggung jawab dalam peristiwa itu? Sampai kini beragam teori yang diungkapkan belum berhasil menjawab sekelumit pertanyaan itu. Benarkah peristiwa itu dimotori oleh seorang tokoh yang bernama D.N Aidit selaku pimpinan partai komunis itu? Siapa D.N Aidit sesungguhnya, seorang putra terbaik bangsa atau hanya seorang monster?

Mendengar sosok D.N Aidit, pastilah sudah terbayang dengan sosok yang menyeramkan dan sadis. Jika disamakan dengan tokoh dunia, mungkin Aidit dapat disejajarkan dengan tokoh Hitler, Mussolini ataupun Genghis Khan sebagai

tokoh yang paling bertanggung jawab atas hilangnya jutaan nyawa manusia yang tak berdosa. Namun jika ditelusuri lebih jauh dari jejak langkahnya dan gerakan politiknya dapat diketahui bahwa D.N Aidit adalah sosok putera bangsa yang memiliki cita-cita tinggi untuk berjuang memanusiakan manusia. Dia adalah tokoh nasional sekaligus tokoh internasional dan selaras dengan nama yang disandangnya yakni Dipa Nusantara Aidit, pelita nusantara-pelita wong cilik. Karena memang untuk itu Ia berjuang dari sejak muda dengan segala suka dan duka serta lika-liku jalan perjuangan hidupnya.

Banyak yang mengatakan bahwa D.N Aidit itu lahir di Medan, ada pula yang mengatakan dia adalah anak seorang anggota Masyumi, lalu singkatan nama D.N Aidit itu adalah Dja'far Nawawi dan masih berfamily dengan Soeharto. Semua kesimpangsiuran itu tak jelas maksudnya, namun sejarah memiliki keharusan untuk mencari kebenarannya.

Adapun yang menjadi latar belakang munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia adalah sebagai berikut:

A. Latar Belakang Sosial Budaya

1. Latar Belakang Keluarga

Belitung adalah kota kelahiran D.N Aidit, tepatnya di Tanjungpandan pada tanggal 30 Juli 1923⁵⁰. Secara astronomis Pulau Belitung terletak di belahan bumi selatan pada posisi $107^{\circ} 35'-108^{\circ}$ Bujur Timur dan $2^{\circ} 30'-3^{\circ} 15'$ Lintang Selatan. Disebelah Utara daerah ini berbatasan dengan laut Cina Selatan dan disebelah selatan berbatasan

⁵⁰ Sobron, Aidit, *op.cit*, hal 19.

dengan laut Jawa. Sedangkan disebelah Barat berbatasan dengan selat Gaspar dan disebelah Timur berbatasan dengan selat Karimata. Adapun sumber daya alam yang paling terkenal adalah timah dan juga hasil laut, sehingga perekonomian sebagian masyarakatnya juga tergantung dari sektor ini.⁵¹ Dulunya Belitung dikenal dengan nama Keresidenan Bangka Belitung ibukotanya adalah Tanjungpandan, bagian dari Sumatera Selatan. Lalu istilah keresidenan ini dihapus dan jadilah Belitung sebagai kabupaten, bagian dari propinsi Sumatera Selatan. Namun sekarang telah memisahkan dari propinsi Sumatera Selatan itu dan berdiri menjadi propinsi baru dengan nama propinsi Bangka Belitung. Aidit adalah anak sulung dari tujuh bersaudara.

Nama Dipa Nusantara Aidit bukanlah nama asli Aidit. Nama aslinya adalah Achmad Aidit, yang kemudian banyak orang memanggilnya dengan sebutan bang Amat. Dan ketika berumur 17 tahun, dia mengajukan permohonan kepada ayahnya untuk mengubah namanya menjadi Dipa Nusantara yang kemudian disahkan di Notaris Batavia.⁵²

Nama Dipa Nusantara sendiri mengandung makna. Kata Dipa Nusantara terinspirasi dari seorang pahlawan nasional yaitu Pangeran Diponegoro, sedangkan nusantara adalah nama terdahulu Indonesia. Dengan demikian nama Dipa Nusantara adalah untuk menghormati perjuangan Diponegoro dan untuk memberi inspirasi Aidit dalam

⁵¹ Husnial Husin Abdullah, 1983, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka-Belitung*, PT. Karya Uni Press, Jakarta, hal 203-205.

⁵² Sobron, Aidit, *op.cit.*, hal 20.

usahanya membebaskan negara nusantara.⁵³ Hal ini sesuai dengan harapan ayahnya seperti yang diutarakan oleh adiknya, Asahan Aidit bahwa ayahnya berharap bahwa ketika sudah besar nanti Ahmad akan menjadi seorang pemimpin Indonesia dan menjadi kebanggaan seluruh bangsa dan negeri.⁵⁴ Menurut Asahan pula, Ahmad Aidit telah menjadi Dipa Nusantara sejak Ia dilahirkan pada tahun 1923. hal ini terbukti dari ditemukannya akte kelahiran yang dibuat pada tahun 1923 dan ditandatangani oleh ayahnya sendiri. Dokumen yang indah berilustrasi itu masih menggunakan bahasa Melayu kuno, tertulis kalimat yang menyebutkan: *Anak dari Abdullah Aidit yang lahir pada tahun 1923, yang saya beri nama Ahmad, bila dia telah beranjak dewasa akan menggunakan nama: Dipa Nusantara Aidit.*⁵⁵

Ayahnya bernama Abdullah Aidit, seorang mantri kehutanan, pegawai *boschwezen*. Pegawai menengah jawatan kehutanan zaman Belanda. Dengan demikian keluarga Aidit bukanlah orang yang miskin tapi juga jauh dari kaya. Gaji sebagai pegawai negeri pemerintah ketika itu kira-kira 60 gulden, dengan masa dinas sudah puluhan tahun. Ayahnya hanya tamat SD saja dan itupun Sekolah Melayu, bukan sekolah Belanda, HIS (*Hollands Inlandsche School*).⁵⁶ Beberapa tahun kemudian ayahnya diangkat menjadi anggota parlemen mewakili daerah Belitung. Ayahnya

⁵³ Jacques Leclerc, *Aidit dan Partai pada tahun 1950*, pada Prisma tahun 1982.

⁵⁴ Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah, 2005, *Menolak Menyerah (menyingkap tabir keluarga Aidit)*, Era Publisher, Yogyakarta, hal 69.

⁵⁵ Sobron, Aidit, *op.cit*, hal 52.

⁵⁶ *Ibid*, hal 24.

juga salah seorang yang turut aktif memimpin gerakan pemuda melawan Belanda di Belitung.

Aidit termasuk orang yang taat dalam menjalankan perintah agamanya. Sebelum umurnya mencapai belasan dia telah tamat mengaji Al-Quran sebanyak tiga kali. Dia bisa membaca Al-Quran dari bagian depan hingga belakang atau sebaliknya tanpa kesalahan.⁵⁷ Namanya Rachman atau biasa dipanggil busu Rachman, adalah guru mengaji Aidit, tinggal di jalan Belanto no 1 di Pangkallalang Tanjungpandan Belitung.⁵⁸

Hal ini tentunya bertentangan dengan anggapan orang-orang yang menyatakan bahwa Aidit dengan paham Komunis yang dianutnya adalah seorang yang kafir, anti agama dan atheis. Hal itu juga dapat dilihat dari latar belakang keluarganya yang juga tak pernah meninggalkan sholat apalagi ayahnya juga salah seorang pendiri perkumpulan Nurul Islam di Belitung⁵⁹. Ayahnya juga salah seorang pemimpin surau. Dan ayahnya juga menjadi pelopor apabila bulan puasa sekaligus mengajarkan pengajian sesudah tarawih.⁶⁰ Dengan demikian mereka termasuk keluarga yang sangat taat menjalankan ajaran agamanya walaupun bukan termasuk para penganut yang fanatik.

Keluarga Aidit juga termasuk keluarga yang demokratis, membenarkan adanya perbedaan pendapat dan urusan mencari jodoh.

Orang tuanya pun sangat menganjurkan untuk menempuh pendidikan yang

⁵⁷ Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah, *op.cit*, hal 69.

⁵⁸ Sobron, *Aidit, op.cit*, hal 46.

⁵⁹ *Ibid*, hal 34 .

⁶⁰ *Ibid*, hal 46.

setinggi-tingginya orang tuanya selalu mengarahkan untuk mencari ilmu, bersekolahlah dengan sebaik-baiknya agar dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan untuk itu perlu modal dasar yaitu pendidikan yang baik, yang memadai, watak yang luhur-jujur, terbuka dan setia serta militan. Kesemuanya itu ada dalam sikap hidup, pengalaman dan pengenalan. Hati dan pikiran akan berkembang dengan sendirinya. Dan dengan ajaran seperti itu, masing-masing anak-anaknya akan mencari jalan yang akan dan mau ditempuhnya.

2. Latar Belakang Pendidikan

Setelah berhasil menamatkan HIS di Tanjungpandan, maka pada tahun 1936 D.N Aidit meneruskan sekolahnya di Jakarta karena di Belitung pada waktu itu belum ada sekolah lanjutan. Di Jakarta ini dia masuk sekolah dagang atau yang lebih dikenal dengan sebutan *Hendels School*.

Di Jakarta ini tentunya memiliki suasana dan situasi yang berlainan dengan keadaan Belitung. Karena banyak bergaul, dia kemudian masuk dalam organisasi Pertimu (Persatuan Timur Muda) yaitu sebuah organisasi yang diprakarsai oleh Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Dr. A.K Gani. Tak lama kemudian Ia pun menjadi ketua Pertimu tersebut.

Di Jakarta ini dia juga tetap mempertahankan hobbinya dalam mencermati kehidupan kaum buruh. Adapun kalangan perburuhan yang menjadi perhatiannya adalah buruh di Tanjung Priok. Dalam analisisnya

ternyata keadaan kaum buruh di pulau Jawa ini sangat berbeda dengan keadaan buruh di Tanjungpandan (Belitung). Pekerjaan mereka sangat berat dan fasilitas perumahan tak mereka miliki, berlainan dengan keadaan di Belitung, di mana setiap buruh mendapatkan beras setiap bulan sebanyak 24 kg, untuk buruh dan 10 kg untuk isteri dan setiap anak. Buruh di Belitung dengan jatah seperti itu sebenarnya sangat berlebihan. Persinggungan dengan politik dan menghadapi persoalan perburuhan ini telah memicu D.N Aidit untuk lebih memahami keadaan yang lebih banyak dalam penghidupan kaum buruh dan ini pula yang menentukan jalan hidup yang akan digelutinya. Disini dia seolah-olah menemukan jati dirinya.⁶¹

Ketika musim liburan tiba, Aidit pun pulang kampung. Seperti biasanya, liburan ini dia manfaatkan untuk berkunjung ke teman-temannya yang sudah menjadi buruh di pertambangan timah Belitung yang tergabung dalam GMB (*Gemeenschappe Maatschappij Billiton*). Dia banyak bergaul dengan buruh-buruh pertambangan. Disini ia akan mempelajari dan menyelidiki sistem nilai lebih, sistem penghisapan kapitalis dalam hal ini keuntungan GMB (*Gemeenschappe Maatschappij Billiton*). Dari sini banyak timbul pertanyaan, mengapa para pekerja Belanda gajinya begitu besar padahal kerja dan diplomanya sama dengan pekerja Indonesia, dengan demikian gajinya menjadi berbeda bagaikan gunung dengan bukit kecil. Apa ini semua? Kenapa begitu? Bagaimana

⁶¹ Murad Aidit, *Aidit Sang Legenda*, Penerbit Pustaka Pena, Jakarta, 2006, hal 8.

semestinya? nah inilah yang Ia pelajari dan semua ini didiskusikan dalam grup belajarnya yang di Batavia. Dari sinilah mulailah Ia berdekatan dengan politik konkrit dan arah kemana tujuan hidupnya.⁶² Pergaulannya yang begitu luas mulai berhubungan dengan banyak mahasiswa yang bercita-cita patriotik. Bercita-cita memerdekakan diri dari penjajahan Belanda. Hubungannya dengan orang-orang politik pun semakin bertambah banyak. Misalnya dengan Sukarni, Chaerul Shaleh, Adam Malik, Djohar Nur dan tokoh-tokoh pemuda pejuang ketika itu. Aidit juga termasuk dalam lingkungan pemuda API yang bermarkas di Menteng 31. Dia juga muridnya bung Karno, bung Hatta, Mohammad Yamin di Menteng 31, markas pejuang kemerdekaan ketika itu.⁶³

Melihat semangat Aidit yang begitu tinggi, timbul kekhawatiran dari ayahnya. Salah satu surat ayahnya kepadanya menganjurkan agar Aidit memiliki salah satu keahlian yang akan dapat menunjang kehidupannya. Nasehat ini rupanya masuk akal dan akhirnya Ia memilih jahit menjahit sebagai keahlian yang dapat dijadikan pegangan hidup. Ayahnya pun setuju dengan pilihan itu dan mendukung dengan mengirim uang tambahan untuk kursus menjahit. Dia juga mulai mempraktekkan pelajarannya yang Ia dapatkan disekolah dengan merintis perdagangan dengan mendirikan usaha *colporteur* (pencari iklan dan langganan koran).

Saat tentara Belanda dikalahkan oleh tentara Dai Nippon, maka kesibukan politik Aidit mulai terlihat lagi. Gerindo adalah gerakan anti

⁶²Sobron Aidit, *op.cit*, hal 44.

⁶³ *Ibid*, hal 21.

fasis sehingga para pejuangnyanya terpaksa bekerja dibawah tanah. Tentunya gerakan ini harus ekstra hati-hati. Kalau tercium adanya kelompok yang anti fasis maka akan disiksa dan dibunuh. Buat Aidit zaman ini adalah zaman yang penuh dengan kehati-hatian. Mengatur pertemuan diantara para pejuang juga harus diperketat dan ketelitian yang maha tinggi, tetapi perjuangan harus dilanjutkan apapun resikonya. Untuk itu Aidit tidak lagi memikirkan sekolahnya dan dengan sepenuhnya mengabdikan diri pada perjuangan dibawah tanah yang diikutinya.⁶⁴

3. Watak dan Kepribadian

Diantara saudara-saudara yang lain, Aidit memang benar-benar lain. Orangnyanya berpandangan jauh, kemauannyanya luar biasa kuat, ulet, militan dan selalu mementingkan orang banyak.⁶⁵ Seusai menamatkan SD, pada tahun 1936 Ia pergi ke Betawi untuk meneruskan sekolahnya. Di Betawi Ia masuk sekolah dagang, Handels School. Dan hampir setiap tahun dia pulang kampung berlibur.⁶⁶ Namun waktu liburan itu tidak dihabiskan untuk berada dirumah, dia sering menginap dikeluarga ini, keluarga itu. Dan juga berkunjung ke teman-temannya yang sudah menjadi buruh di pertambangan Timah Belitung yang tergabung dalam GMB (*Gemeenschappe Maatschappij Billiton*). Dia banyak bergaul dengan buruh-buruh pertambangan. Tujuannyanya adalah untuk mengamati,

⁶⁴ Murad Aidit, *op.cit*, hal 9-11.

⁶⁵ Sobron, Aidit, *op.cit*, hal 25.

⁶⁶ *Ibid*, hal 24.

menyelidiki, mempelajari, terdorong rasa ingin tahu, mau memahami. Dan ketika itu usianya baru 16 atau 17 tahun.⁶⁷

Keluhuran budi Aidit sangat dikenal masyarakat Belitung pada waktu itu. Perbuatan yang dilakukannya bukanlah hal yang sangat besar, tetapi sangat luhur dan menjangkau hari depan. Selalu saja dia mengadakan perbuatan yang memberikan kesan pada hidup orang lain. Setiap ia pulang berlibur selalu saja perbuatannya yang selalu membuat jasa, membuat orang lain tidak akan melupakan dirinya. Sebagai contoh dimana saja ia menginap saat berlibur ada-ada saja yang dikerjakannya, seperti menanam pisang, menggali sumur, membuat irigasi kecil, membuat kandang ayam dan menyunat anak-anak.⁶⁸

Perbuatan luhur lainnya juga dapat dilihat ketika teman sepermainannya dikeluarkan karena tidak mampu membayar uang sekolah, hal itu membuatnya mogok sekolah. Pemogokkan itu baru berakhir kala ayahnya berjanji membantu temannya yang malang itu untuk meneruskan sekolah.⁶⁹

Sejak masih kecil Aidit memang telah memperlihatkan kecerdasannya dan sifat-sifat yang luar biasa serta perbuatan istimewa lainnya. Sebelum Ia menamatkan sekolah dasar, Ia telah membaca seluruh buku-buku yang tersimpan di bibliotik sekolah yang ratusan banyaknya. Sebelum umurnya mencapai belasan dia telah tamat mengaji Al-Quran

⁶⁷ *Ibid*, hal 25.

⁶⁸ *Ibid*, hal 30.

⁶⁹ Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah. *op.cit*, hal 69.

sebanyak tiga kali. Dia bisa membaca Al-Quran dari bagian depan hingga belakang atau sebaliknya tanpa kesalahan.⁷⁰ Namanya Rachman atau biasa dipanggil busu Rachman, adalah guru mengaji Aidit, tinggal di jalan Belanto no 1 di Pangkallalang Tanjungpandan Belitung.⁷¹

Hal ini tentunya bertentangan dengan anggapan orang-orang yang menyatakan bahwa Aidit dengan paham Komunis yang dianutnya adalah seorang yang kafir, anti agama dan atheis.

Sejak kecil Aidit termasuk anak yang rajin belajar. Banyak temannya yang mengajak bermain-main, tetapi kalau waktunya memang pada waktu belajar dengan jadwal yang ia buat sendiri, tidak ada seorangpun temannya akan berhasil mengeluarkannya dari tempat belajarnya itu. Yang istimewa dari dirinya adalah dalam mendidik diri sendiri secara disiplin yang keras dan ketat. Sangat sulit mengadakan tawar-menawar kalau dia sudah menjadwalkan jam-jam pelajarannya. Kalau dia sedang belajar sangat tekun sangat berkonsentrasi, sehingga sering dia tidak mendengar kalau ada keluarganya yang memanggil-manggil.⁷²

Aidit memiliki perawakan agak pendek, namun tubuhnya tegap dan gempal. Dia juga seorang murid *Zonder* (guru latihan jasmani, bela diri). Dia sangat suka sekali olahraga. Dia juga membangun *restok-ringen* (ring), *halter* dan alat-alat box untuk bertinju. Dia sangat lincah, tetapi karena badannya kecil, ringan, kemauannya untuk belajar tinju dan gulat

⁷⁰ *Ibid*, hal 69.

⁷¹ Sobron, Aidit, *op.cit*, hal 46.

⁷² *Ibid*, hal 50-51.

selalu terhalang. Aidit juga gemar sekali menulis terutama yang berkaitan dengan politik. Hasil tulisannya itu menjadi sebuah gambaran dan masukan bagi anggota-anggota partainya saat ia menjadi ketua PKI di era tahun 1950-an nanti.

Abdullah Aidit adalah nama ayahnya, seorang mantri kehutanan, pegawai *boschwezen*. Pegawai menengah jawatan kehutanan zaman Belanda dan pernah duduk di DPR-RIS mewakili daerah Belitung. Dengan demikian keluarga Aidit bukanlah orang yang miskin tapi juga jauh dari kaya. Gaji sebagai pegawai negeri pemerintah ketika itu kira-kira 60 gulden, dengan masa dinas sudah puluhan tahun. Dengan demikian tak bisa sepenuhnya membiayai Aidit untuk bersekolah di Betawi. Setiap bulan hanya mampu mengirim sebanyak 15-20 gulden. Kekurangannya harus dicari sendiri.

Dalam usaha penambahannya itu ia kemudian membuka usaha perpustakaan dengan nama "Antara" di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Disana ia menjual koran, buku-buku dan apa saja yang penting halal. Aidit sangat suka buku-buku klasik tentang politik dan ekonomi. Dia mempelajari berbagai buku yang sifatnya komunis dan sosialis kiri. Maka ia mulai membaca buku tebal *Das Kapital* karya *Karl Marx*, lalu mulai mengenal dan mempelajari pemikiran *Frederich Engels*, *Vladimir Ilich Lenin*. Bahkan ia juga mencari dan membaca karya-karya *George Wilhem*, *Fuerbach*, *Friedrich Nietzsche*, *Mao Zedong* dan

pemimpin Tiongkok lainnya.⁷³ Dengan demikian itulah pula yang menjadi tujuannya kala pulang liburan ke Belitung. Dimana Ia lebih suka bergaul dengan buruh-buruh timah. Hasil ternama Belitung kala itu memang timah. Dia sangat tekun mempelajari kehidupan kaum buruh, pegawai kecil dan juga orang-orang Belanda. Disana Ia banyak mempelajari dan menyelidiki sistem nilai lebih, sistem penghisapan kapitalis.

B. Latar Belakang Politik

Memasuki tahun 1939, kesadaran politik Aidit mulai tumbuh. Pada tahun itu juga Ia telah menjadi pemimpin dalam Persatuan Timur Muda (Pertimu), keanggotaannya mencakup orang-orang miskin keturunan Cina, Arab dan golongan minoritas lainnya. Pada tahun yang sama Ia pun bergabung dengan Barisan Muda Gerindo (sebuah organisasi kepemudaan yang beraliran nasionalisme sayap kiri dan dipimpin Amir Sjarifuddin) dan setahun setelahnya Ia pun menjadi salah seorang pemimpinnya bersama-sama dengan Wikana, Ismail Widjaja dan A.M Hanafi.⁷⁴

Pada masa pendudukan Jepang, Jepang telah menutup sekolah-sekolah menengah dan tinggi dan melarang organisasi pemuda. Tetapi kemudian Ia mendirikan asrama-asrama pendidikan politik dimana tokoh-tokoh termasyur dari pergerakan nasional memberikan ceramah dan kuliah. Aidit yang tidak bersekolah lagi menggabungkan diri dengan anak-anak muda disekitar Soekarno dan Hatta. Mereka mengikuti ceramah-ceramah kedua orang

⁷³ *Ibid*, hal 43.

⁷⁴ Peter Edman, *op.cit*, hal 61.

tersebut sambil juga mencari lowongan kerja.⁷⁵ Pada masa itu juga, Aidit mendapatkan pengaruh dari Muhammad Jusuf (pemimpin PKI yang pertama setelah tahun 1945) dan oleh Jusuf dipinjami satu eksemplar buku karangan Karl Marx, *Das Kapital*.

Pada tahun 1942, ia berhasil terpilih untuk menduduki posisi wakil ketua dalam Persatuan Buruh Angkutan dan kemudian menjadi pemimpin dalam sekolah politik "Generasi Baru" sampai tahun 1943. Pada tahun 1943 ia bergabung dengan sebuah organisasi bawah tanah PKI atas ajakan Jusuf dan ia pun segera memperlihatkan suatu perbedaan dengan teman-temannya, terutama dengan ketertarikannya pada ideologi marxisme yang demikian disiplin dan tertata. Pada tahun yang sama, pada saat ia baru saja masuk dalam keanggotaan PKI, Aidit mendirikan Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom), sebuah organisasi anti fasis yang bergerak dibawah tanah, namun kurang berhasil karena gerakan ini segera ditumpas Jepang.⁷⁶

Pada tahun 1944, Aidit mulai bekerja di kantor keresidenan Jatinegara. Bersama dengan Lukman, ia kemudian dipilih oleh Bung Karno ikut Barisan Pelopor Istimewa, yaitu kelompok yang terdiri dari seratus orang pejuang yang dianggap terdekat dan paling setia.⁷⁷

Ketika memasuki detik-detik proklamasi RI di Jakarta. Tak dapat dipisahkan nama Aidit dari orang-orang yang ikut menculik Bung Karno ke Rengasdengklok.⁷⁸ Pada saat itu Ia menjadi aktivis dalam Pemuda Angkatan

⁷⁵ Jacques Leclerc, *op.cit*, hal 141.

⁷⁶ Peter Edman, *op.cit*, hal 62.

⁷⁷ Jacques Leclerc, *op.cit*, hal 142.

⁷⁸ Sobron, Aidit, *op.cit*, hal 44.

Baru (PAB), sebuah organisasi yang separuh legal yang bertujuan untuk membuka jalan bagi dilakukannya proklamasi kemerdekaan.⁷⁹ Mereka mendatangi dan mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamkan kemerdekaan Indonesia, sebelum Belanda sempat masuk kembali.

Sesudah proklamasi, Markas Besar Menteng mendirikan badan-badan untuk menggerakkan penduduk Jakarta. Ditempat-tempat kerja didirikan BBI (Barisan Buruh Indonesia), dikampung-kampung BRI (Barisan Rakyat Indonesia) dan khusus untuk pemuda didirikan API (Angkatan Pemuda Indonesia). Aidit pun juga ikut terlibat didalamnya, yang ditugaskan untuk menghimpun pemuda-pemudi dalam lingkungan API. Karena ia secara aktif ikut berdemonstrasi di lapangan Gambir pada tanggal 19 September 1945, ia ditangkap polisi militer Jepang.⁸⁰ Namun ia berhasil meloloskan diri. Pada tahun itu juga dalam tubuh PKI terdapat persaingan dalam hal kepemimpinan dan kepemimpinan ini dimenangkan oleh golongan tua.

Di era 1946-1948, dia menghabiskan waktunya dengan berkegiatan dalam berbagai aktivitas organisasi partainya. Pada tahun 1947 ia terpilih menjadi anggota *Central Committee* (CC) atau pengurus pusat dan ia dipilih menjadi ketua Fraksi Komunis dan menjadi anggota sidang dalam KNIP. Pada tahun 1948 ia terpilih menjadi seorang anggota polit biro partai, setelah sebelumnya bekerja sebagai sekretaris dalam dewan eksekutif Front Demokrasi Rakyat (FDR), sebuah organisasi yang merupakan peleburan daripada PKI, Partai

⁷⁹ Peter Edman, *op.cit*, hal 63.

⁸⁰ Jacques Leclerc, *op.cit*, hal 142.

Sosialis, Partai Buruh dan Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo) yang dipimpin oleh Aidit.

Pada tahun 1948 juga, PKI memulai tindakan drastis yang kemudian dikenal dengan pemberontakan Madiun, yang kemudian menyeret partai ini kedalam sebuah pemberontakan yang berumur pendek dan mengakibatkan sejumlah pemimpin partai terbunuh dan ada juga yang dipenjara. Aidit sendiri berhasil melarikan diri. Menurut berbagai sumber yang menyebutkan bahwa setelah berhasil meloloskan diri, Aidit menjelajah kedaratan Cina dan Vietnam. Konon dia menyaksikan kesuksesan Revolusi Cina 1949 yang dipimpin oleh Mao Tse Tung. Akan tetapi laporan itu sangat kontradiktif dengan laporan-laporan intel pihak Belanda yang menyebutkan bahwa sepanjang tahun 1949, Aidit bersembunyi di daerah Kemayoran, Jakarta. Dalam persembunyian itu, Aidit giat membentuk "Front Nasional Anti Imperialisme" dan "Gerakan Indonesia Muda". Tetapi aktivitasnya sukar dideteksi karena sebagaimana biasa Ia menggunakan beragam nama samaran, seperti Alam atau Sobron.⁸¹ Sumber lain menyebutkan juga bahwa Aidit sebenarnya pernah tertangkap di Solo, tetapi rupanya yang menangkap tidak mengenalinya sebagai D.N Aidit maka Ia dilepaskan. Dengan terjadinya hal ini maka Aidit langsung ke Jakarta meneruskan perjuangannya.⁸²

Pasca pemberontakan Madiun, Jakarta masih dalam pendudukan Belanda dan PKI memang belum mempunyai kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Namun terdapat pemuda yang menamakan dirinya

⁸¹ Subhan Sd, *op.cit*, hal 26.

⁸² Murad Aidit, *op.cit*, hal 20.

Kelompok Jalan Guntur 27. Mereka adalah salah satu kelompok yang giat dalam pengorganisasian kelompok-kelompok masyarakat, baik tani maupun buruh, tukang-tukang becak dan lain-lain.

Ketika kader-kader PKI yang melarikan diri dari Yogyakarta berdatangan ke Jakarta, Kelompok Jalan Guntur 27 ini tertarik untuk berjuang bersama-sama dan membentuk PKI di Jakarta ini. Mereka pun mengadakan diskusi-diskusi dengan kader-kader muda PKI pelarian dari Yogyakarta ini yang diantaranya adalah Aidit, Lukman dan Nyoto. Dengan demikian perpaduan dari Kelompok Guntur 27 ini dengan anggota-anggota CCPKI yang tersisa dari peristiwa Madiun, mulailah mereka mendirikan komite-komite PKI, sungguhpun belum secara legal tetapi memang sudah disiapkan untuk dilegalkan. Segala kegiatan PKI memang mereka rencanakan akan dipusatkan di Jakarta. Jadi ketika CCPKI dipindahkan ke Jakarta memang mereka telah mempunyai pijakan yang cukup solid. Redaksi Bintang Merah pun mereka boyong ke Jakarta, karena mereka sangat mementingkan dan mengetahui apa artinya Bintang Merah sebagai organ yang dapat dan harus memberikan garis politik kepada seluruh anggota.⁸³

Setelah pemerintah RI mengakui kembali eksistensi PKI, berarti partai tersebut mempunyai kesempatan untuk melakukan kembali aktivitasnya secara legal. Tentu saja dengan sikap pemerintah yang demikian itu memberikan dampak yang sangat luas terhadap tokoh-tokoh PKI. Mereka yang menghilang sejak kegagalan aksi kudeta di Madiun tahun 1948, sekonyong-konyong

⁸³ *Ibid*, hal 21.

muncul kembali. Pada tahun 1949, muncullah tokoh Alimin Prawirodirdjo yang dihormati sebagai *the great oldman* gerakan Komunis di Indonesia. Dengan kemunculan tokoh Alimin ini telah menunjukkan bahwa pemerintah benar-benar tidak melarang PKI. Alimin dikenal sebagai sosok pejuang rakyat yang aktif dan konsisten sejak masa pergerakan nasional, dimana Ia mempunyai banyak pengalaman melawan Belanda. Sebagai tokoh kawakan, Alimin banyak memberikan dukungan kepada generasi muda untuk meneruskan perjuangan. Sikapnya itu membuat otoritasnya semakin menonjol, sehingga Ia sangat dihormati oleh kaum muda Komunis. Ini peluang baginya dan menjadi suatu kehormatan untuk memimpin partai.⁸⁴

Pertengahan tahun 1950, Aidit kembali dan segera menjadi Sekretaris Jenderal Central Committee (CC). Dan dalam kedudukannya itu banyak sekali kritikan yang Ia lontarkan kepada golongan tua. Dengan demikian didalam pembangunan partai timbul perbedaan visi dan timbul polarisasi dua kekuatan yaitu fraksi golongan tua yang dipimpin oleh Alimin berhadapan dengan fraksi golongan muda yang di motori Aidit.

Friksi antara golongan tua dan muda itu sebetulnya terfokus pada strategi yang diterapkan , serta cara-cara yang diambil dalam menyelesaikan masalah yang menghadang. Golongan tua tampaknya menghendaki strategi rasional-revolusioner untuk membangkitkan dan menggerakkan partai, sedangkan golongan muda lebih kentara semangat emosional-revolusioner dalam mengendalikan dan menjalankan garis politik partai.

⁸⁴*Ibid*, hal 24-25.

Bila ditelusuri kebelakang, perbedaan itu memang sangat kontras, akibat pengalaman masing-masing. Golongan tua dimatangkan oleh kondisi kolonisasi Belanda. Mereka mengalami pengalaman berbagai penderitaan pahit seperti mendekam dipenjara atau dibuang kedaerah terpencil. Sedangkan golongan muda terobsesi masa pendudukan Jepang dan dipengaruhi oleh romantika revolusi 1945. Keputusan-keputusan politik golongan tua dirasakan sangat lamban mengantisipasi persoalan. Taktiknya pun dianggap golongan muda sudah tidak berlaku lagi karena bisa mengakibatkan PKI tidak populer di masyarakat⁸⁵. Sebagai contohnya adalah tindakan Tan Ling Dji yang menyebarkan Tan Ling Djiismenya dianggap akan merintangai kemajuan partai saja. Aidit menyatakan bahwa Tan Ling Djiisme telah mengecilkan rol PKI sebagai pelopor revolusi, telah melenyapkan sifat bebas dari PKI dilapangan organisasi.⁸⁶ Sedangkan dilapangan politik Tan Ling Djiisme telah menjadi perintang yang besar dalam meningkatkan kesadaran politik massa dan telah membuat partai politik tidak populer dikalangan massa.⁸⁷

Kritik golongan muda tak bisa dibendung lagi. Golongan tua mulai tersingkir. Pada tanggal 7 Januari 1951, terjadi suksesi kepemimpinan dalam partai. Aidit mengambil alih posisi Alimin. Dengan diambil alihnya kepemimpinan partai oleh Aidit ini, telah menorehkan suatu sejarah baru dalam perjalanan partai ini. Kini sang arsitek partai telah kembali dengan membawa perubahan-perubahan nyata dan membawa partai ini menjadi partai

⁸⁵ *Ibid*, hal 27-28.

⁸⁶ D.N Aidit, 1959, *Tentang Tan Ling Djiisme*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 261.

⁸⁷ *Ibid*, hal 265.

massa terbesar di Indonesia dan juga terbesar no 3 di dunia setelah Rusia dan RRC.

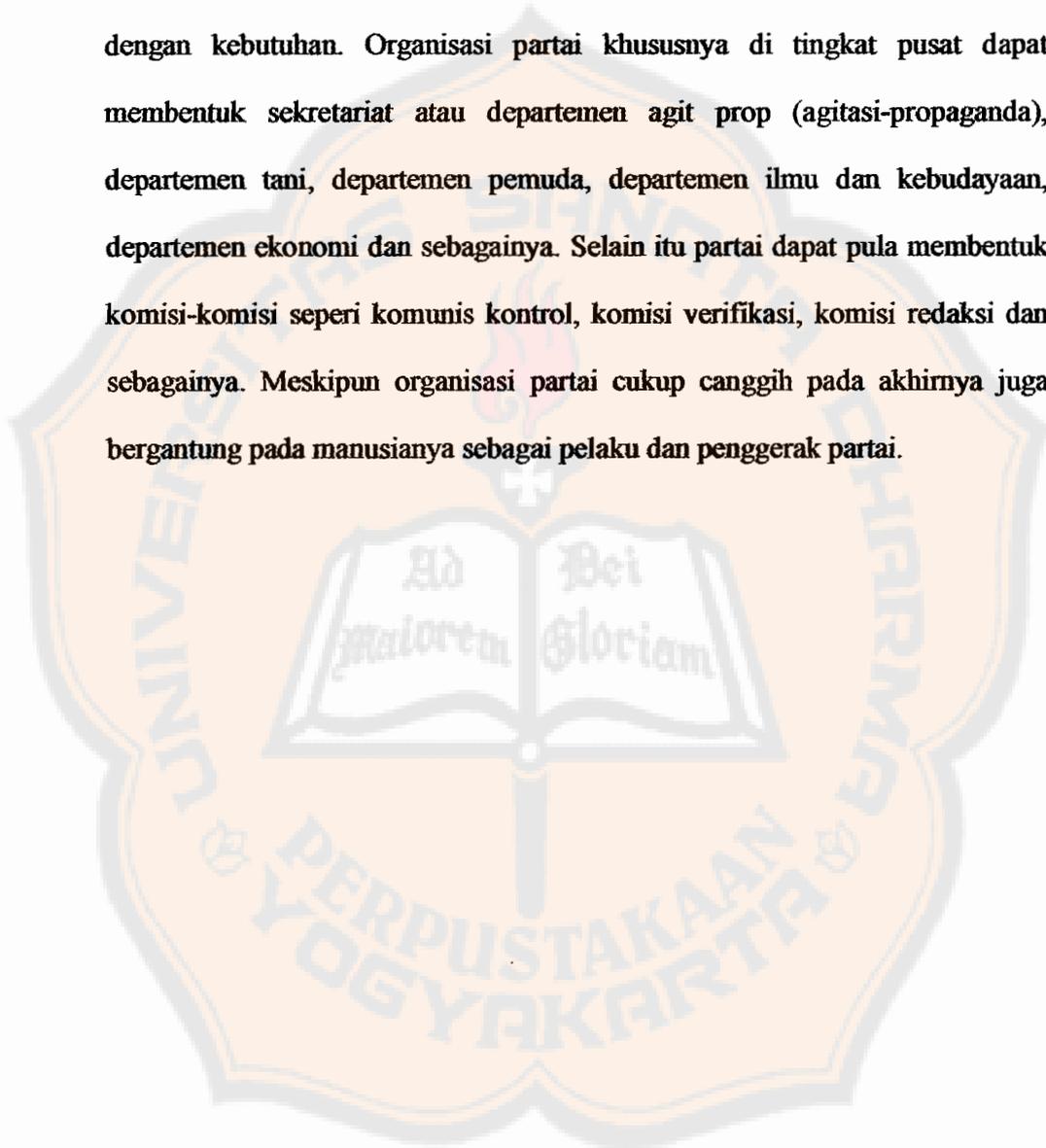
Peristiwa pemberontakan Madiun 1948 yang ditandai dengan kegagalan PKI melakukan kudeta terhadap pemerintah RI, pada akhirnya justru menjadi bumerang terhadap eksistensi dan perkembangan partai. Maka sejak September 1950, cabang-cabang PKI di Jawa dan Sumatera mulai aktif kembali. Pada awal kepemimpinannya, Aidit selain berambisi memperkuat posisi partai di pulau Jawa tetapi juga bermaksud membuka cabang-cabang terutama di Kalimantan dan Nusa Tenggara.

Dalam usaha membina partai dan menggalang dukungan massa sebanyak-banyaknya perlu adanya struktur organisasi yang cangguh dan rapi. Adapun struktur organisasi PKI ini adalah:

Struktur kekuasaan tertinggi berada dalam kongres nasional, sedangkan badan pimpinan tertinggi adalah Central Comite (CC) yang menggariskan tugas-tugas partai. CC memilih Politbiro dan Sekretariat CC. Politbiro merupakan badan pimpinan pusat yang melaksanakan tugas-tugas partai, sedangkan sekretariat CC adalah pelaksana harian. Di tingkat propinsi dibentuk Komisariat CC yang dibagi menjadi beberapa Seksi Comite (SC). SC dibentuk pula dikota-kota besar. Di tingkat kabupaten atau kota kecil dibentuk Onderseksi Comite (OSC). Di tingkat kelurahan dibentuk Resort Comite (RC). RC dibentuk pula dalam cabang-cabang produksi seperti pabrik, pertambangan, perkebunan, sekolah dan lain-lain. Jika dalam RC terdapat lebih dari 50 anggota, maka dapat dibentuk Resort Besar Comite yang

kedudukannya sama dengan RC. Dibawah RC adalah grup-grup yang anggotanya minimal 3 orang.

Pada setiap tingkat organisasi, pembagian tugas praktis diperjelas dengan alat-alat kelengkapan partai yang pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan. Organisasi partai khususnya di tingkat pusat dapat membentuk sekretariat atau departemen agit prop (agitasi-propaganda), departemen tani, departemen pemuda, departemen ilmu dan kebudayaan, departemen ekonomi dan sebagainya. Selain itu partai dapat pula membentuk komisi-komisi seperti komisi kontrol, komisi verifikasi, komisi redaksi dan sebagainya. Meskipun organisasi partai cukup canggih pada akhirnya juga bergantung pada manusianya sebagai pelaku dan penggerak partai.



BAB III
PERANAN D.N AIDIT SEBAGAI PEMIMPIN PARTAI KOMUNIS
INDONESIA DALAM
MEMBANGUN PARTAI KOMUNIS INDONESIA TAHUN 1950-1965

A. Peranan D.N Aidit Pada Masa Demokrasi Liberal (1950-1959)

Indonesia akhirnya merdeka dan kini menghadapi prospek menentukan masa depannya sendiri. Dalam sebuah negeri yang masih menunjukkan adanya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan tradisi-tradisi otoriter, maka banyak hal tergantung pada kearifan dan nasib baik kepemimpinan negeri itu.

Sejak tahun 1950 merupakan kisah tentang kegagalan rentetan pimpinan untuk memenuhi harapan-harapan tinggi yang ditimbulkan oleh keberhasilan mencapai kemerdekaan. Dalam tahun 1950, kendali pemerintahan berada di tangan kaum nasionalis perkotaan dari generasi yang lebih tua dari partai-partai sekuler dan Islam yang terkemuka. Akan tetapi pada tahun 1957, percobaan demokrasi itu telah mengalami kegagalan.

Pada periode 1950-1959 lazim disebut dengan demokrasi parlementer. Peranan-peranan partai politik mulai meningkat. Dominasi partai politik tampak lebih menonjol. Masing-masing saling bersaing untuk mencapai tujuannya. Suasana sistem demokrasi parlementer ini telah merangsang pertentangan ideologi dan politik yang tajam yang pada gilirannya membawa bangsa dan negara RI kedalam kancah kemelut politik yang mengancam keberlangsungan hidup. Namun justru di alam demokrasi seperti inilah telah banyak memberikan kesempatan kepada PKI untuk merhabilitasi partainya.



1. Wajah baru dalam membangun partai

Gerakan komunis di Indonesia mengalami perjalanan panjang dan seringkali diwarnai oleh gelombang pasang surut. Klimaks dari perjalanan itu adalah dengan meletusnya pemberontakan PKI tahun 1948 yang dipimpin oleh Muso, namun pemberontakan ini gagal. Pemerintah RI dalam waktu singkat berhasil melumpuhkan mereka. Tokoh kunci gerakan itu yaitu Muso berhasil ditembak mati, sedangkan tokoh-tokoh penting lainnya ada yang berhasil ditangkap dan ada juga yang berhasil melarikan diri.

Akibat peristiwa itu, pihak RI mempunyai rencana untuk menuntut melalui jalur hukum terhadap para pelaku baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Namun berbagai pokok pembicaraan penting mengenai masa depan partai itu pada akhirnya memberikan peluang kembali partai itu. Menteri kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo pada tanggal 4 September 1949 mengeluarkan pernyataan yang melegakan kaum komunis. Bahwa pelaku yang terlibat dalam peristiwa itu tidak akan dituntut, kecuali bagi mereka yang terlibat tindak kriminal. Keputusan itu diterima secara luas dalam kabinet pada tanggal 7 September 1949.

Pemerintah tentunya mempunyai alasan tertentu. Presiden Sukarno mempunyai pertimbangan tersendiri sehingga tak menumpas anasir komunis. Boleh jadi sebagai upaya untuk memelihara persatuan dan keutuhan bangsa dalam menghadapi imperialisme Belanda. Ini juga menandakan konsistensi pemikiran Sukarno yang telah

mengumandangkan “Islamisme-nasionalisme-marxisme” sebagai suatu konsepsi persatuan nasional.⁸⁸ Pemerintah secara berangsur-angsur memaafkan kesalahan PKI sehingga dalam proses politik pemerintah memandang PKI sebagai sesuatu kekuatan yang harus disertakan.

Seperti yang telah kita ketahui setelah peristiwa pemberontakan PKI Madiun 1948, dimata bangsa Indonesia PKI adalah pengkhianat. Mendapatkan citra sebagai “pengkhianat”, adalah suatu “pekerjaan” yang memerlukan waktu untuk merehabilitasinya dalam kondisi ini rupanya Aidit menyadari PKI masih lemah untuk dihadapkan dengan musuh-musuhnya yang kuat. Aksi-aksi dan tindak kekerasan yang diuji cobakan dari bawah gagal secara politis maupun gerakannya. Oleh karena itu untuk sementara waktu PKI tidak menempuh politik dengan aksi kekerasan. Dalam jangka pendek, programnya adalah konsolidasi organisasi dan dalam jangka panjang mengubahimbangan kekuatan politik. Oleh karena itulah PKI menempuh garis kanan sebagaimana yang digariskan oleh Moscow, yaitu jalan legal parlementer dengan dilengkapi taktik merangkul golongan non komunis tertentu.

Sejak awal tahun 1951 terjadi perubahan garis kiri (Zhdanov) ke garis kanan (Stalin). Pada kesempatan itu Stalin sendiri yang meletakkan garis kanan baru, tentang kerja sama dengan gerakan nasional atau gerakan non komunis lainnya. Perubahan ini disebabkan adanya kondisi yang menuntut “fleksibilitas” dari gerakan komunis. Hal ini erat kaitannya

⁸⁸ Subhan Sd, *op.cit*, hal 11.

dengan ajaran Lenin, bila perlu taktik dapat berubah berkali-kali dalam waktu 24 jam, kecuali strategi, sasaran dan tujuan perjuangan. Dalam mengembangkan garis kanan (Stalin) ini, PKI mempertahankan dua jalur klasik, yaitu jalur legal dan ilegal. Jalur pertama secara politis disebut jalur parlementer (secara konstitusional) dan yang kedua jalur revolusi sebagai jalan guna mencapai tujuan strategisnya yaitu kekuasaan politik.⁸⁹

Sesudah mengalami transisi melalui bentuk negara federalis RIS, Indonesia akhirnya kembali ke bentuk kesatuan pada tanggal 17 Agustus 1950. kehidupan politik ini ditandai dengan munculnya sistem pemerintahan koalisi partai-partai politik. Masa dominasi partai politik dikenal sebagai jaman demokrasi parlementer atau demokrasi liberal.⁹⁰ Selama era demokrasi itu fenomena khas dalam politik Indonesia adalah jatuh bangun atau silih bergantinya partai politik menguasai kabinet. Mereka saling berebut menduduki kursi pemerintahan. Hal ini tentunya makin membuka peluang PKI untuk menyatakan eksistensinya di bumi Indonesia.

Pada tahap pertama penerapan wajah baru ini, Aidit mulai masuk dalam percaturan politik di Indonesia. Hal itu terlihat dalam dukungannya kepada kabinet Wilopo (PNI) dan kabinet Ali Sastroamidjojo (PNI). Disinilah PKI kemudian memanfaatkan persaingan antara PNI dan Masyumi yang merupakan dua partai besar di parlemen. Dukungan PKI kepada PNI, menyebabkan PNI cenderung memberi peluang kepada PKI.

⁸⁹ Markas Besar ABRI, 1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid III*, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, hal 32.

⁹⁰ Subhan Sd, *op.cit*, hal 16.

Dilain pihak PKI berusaha menjatuhkan kabinet Sukiman (Masyumi) yang bersikap sangat anti komunis.

Berlakunya demokrasi liberal ini sangatlah menguntungkan PKI. Untuk memperoleh dukungan dan simpati dari massa golongan non komunis maupun kaum borjuis nasional, PKI keluar dengan “penampilan” baru sebagai usaha menghapuskan citra pengkhianat akibat pemberontakan di Madiun pada tahun 1948.

PKI juga melakukan konsolidasi intern baik dalam bidang ideologi maupun organisasi. Pemahaman marxisme-leninisme dipadukan dengan kondisi Indonesia. Pelatihan kader melalui pelbagai program pendidikan, sesuai dengan tingkatannya. Sebagai contoh adanya program pendidikan bagi calon anggota yang buta huruf. Selain itu ada pula sekolah-sekolah partai untuk calon anggota dan anggota baru. konferensi-konferensi dan diskusi merupakan bentuk lain dari salah satu usahanya membina kader. Dibidang organisasi yang menjadi pokok perhatian adalah melaksanakan semua pedoman kerja yang diinstruksikan dengan memadukan “pimpinan dengan massa”.

Selain upaya konsolidasi, PKI juga melakukan “gerakan penyesuaian” terhadap situasi yang berkembang sebagai salah satu syarat dalam memadukan hubungan pimpinan partai dengan massanya. Langkah awal gerakan tersebut dimulai dari lembaga pimpinan serta kader-kader partai, kemudian dikembangkan ke seluruh partai dan seluruh organisasi.

Massanya dari tingkat CC (*Comite Central*) sampai ke comite paling bawah melakukan gerakan ini.⁹¹

Dengan demikian peristiwa pemberontakan Madiun ini merupakan sebuah pelajaran bagi masa-masa yang akan datang. Di era kepemimpinan yang dipimpin oleh Aidit ini diharapkan untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan terjadinya peristiwa-peristiwa yang merugikan PKI. Peristiwa Madiun itu merupakan bentuk pemberontakan yang cenderung bersifat spontan dan sangat kurang terorganisasi, merupakan wujud sebuah ikhtiar untuk mengobarkan revolusi sosial. Sehingga PKI mengalami kegagalan dalam mewujudkan ambisinya dan banyak kehilangan tokoh-tokoh penting PKI. Sehingga wajah baru PKI yang mulai diterapkan Aidit ini, memiliki arti penting yang vital sebagai langkah penting ke depan dalam membangun partai.

Naiknya D.N Aidit menjadi ketua partai pada tahun 1951 ini mempermudah PKI membangun partainya bersama-sama dengan rekan mudanya yakni Nyoto, Lukman dan Sadisman yang penuh semangat dan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga di rentang tahun 1954-1959 jumlah pengikut PKI bertambah 10 kali lipat dan dalam pemilu yang akan diselenggarakan pada tahun 1955 akan diunggulinya.⁹²

2. Strategi Front Nasional

Ukuran keberhasilan suatu gerakan seringkali ditentukan dengan penerapan strategi yang tepat. Karena, hal itu akan memberikan arah

⁹¹ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 33-35.

⁹² Donald Wilhem, 1981, *Indonesia Bangkit*, UI Press, Jakarta, hal 45.

langkah gerakan itu sendiri. Untuk itu diperlukan kemampuan dalam memahami kondisi obyektif di satu sisi dan sekaligus dan memberikan respons berupa strategi yang dipilih di sisi lain.

Dengan berhasil disingkirkannya para tokoh golongan tua maka kepemimpinan baru oleh Aidit pun dimulai. Dengan tampilnya Aidit ini telah memberikan corak tersendiri bagi gerakan partai.

Kepemimpinan yang baru ini tentunya mewakili suatu dinamika dan kesatuan dalam hal karakter maupun kebijakan yang tak dapat diwujudkan oleh para anggota partai dari generasi yang lebih tua. Kepemimpinan baru ini meletakkannya dalam praktik-praktik nyata dalam bentuk sebuah kohesi organisasi dan ideologi yang sulit dijumpai sebelum tahun 1951.

Tugas pertama yang harus dijalankan oleh Aidit bagi partai adalah memantapkan tujuan-tujuannya. Tujuan-tujuan ini mengandung dua hal: pertama, membangun sebuah bentuk persatuan yang berbasiskan pada aliansi antara para petani dan para buruh. Kedua, pembangunan PKI yang ter-bolsheviskan yang memiliki skala nasional dan memiliki ciri massa yang lebih luas lagi yang terkonsolidasi sepenuhnya secara ideologis, politis maupun secara organisatoris. Dan tugas-tugas utama tersebut haruslah dipandang sebagai tugas untuk membangun sebuah front nasional yang bersatu.⁹³

⁹³ Peter Edman, *op.cit*, hal 79.

Menurut Aidit basis dari front persatuan nasional adalah persatuan yang erat antara kaum buruh dengan kaum tani yaitu golongan yang terbesar dan paling tertindas dari pada rakyat Indonesia. Jika persatuan ini kuat dan poliknya dipimpin secara tepat oleh partai komunis, maka ini merupakan jaminan yang pasti bagi kuatnya front persatuan nasional. Dan kebalikannya pula, kuatnya front persatuan nasional pasti akan lebih mempererat persatuan kaum buruh dengan kaum tani dan ini berarti pula lebih memperkuat dan lebih membuat mampu PKI.⁹⁴

Dalam rangka menyukseskan program front persatuan nasional maka PKI menggalang kerja sama dengan partai-partai dan organisasi-organisasi massa lainnya. Tokoh PKI D.N Aidit mengambil suatu kesimpulan bahwa untuk memperoleh kesempatan dalam pemerintahan seperti pada masa pemberontakan PKI di Madiun, PKI mengadakan aliansi dengan kekuatan-kekuatan politik yang penting.⁹⁵

Setelah jatuhnya kabinet Sukiman yang cukup menekan PKI, kabinet kemudian digantikan oleh Wilopo. PKI pun segera memberi reaksi terhadap kabinet baru itu. PKI kemudian mengeluarkan pernyataan yang mendukung kabinet Wilopo. Dukungan itu diikuti oleh jaminan PKI untuk melarang SOBSI menggerakkan aksi-aksi pemogokkan. Dan jaminan ini tidak omong kosong karena aksi-aksi pemogokkan mulai reda.

Di jaman pemerintahan Wilopo itu, PKI semakin mendekati PNI.

PKI semakin hari berupaya menampakkan diri sebagai pembela

⁹⁴ D.N Aidit, 1959, *Front Persatuan Nasional dan Sejarahnya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 66.

⁹⁵ *Prisma* no 8 tahun 1982 hal 61.

kepentingan nasional yang agresif. Di sisi lain hubungan PKI dengan golongan islam dalam keadaan patah arang. PKI tidak melihat kemungkinan terjalinnya hubungan terutama dengan Masyumi, karena itu PKI berusaha menghantam dan mengisolasi Masyumi dari elit politik Indonesia. Adanya hubungan yang dekat antara DI/TII dengan Masyumi menyebabkan PKI tidak henti-hentinya memojokkan Masyumi dan DI/TII.⁹⁶

Jatuh banggunya sebuah kabinet merupakan nuansa yang tak asing dalam demokrasi liberal. Kali ini rongrongan kembali terjadi pada kabinet Wilopo. Kesempatan ini digunakan PKI dan PNI untuk menggoncangkan kabinet Wilopo dengan peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu peristiwa yang menyangkut reorganisasi atau profesionalisasi tentara. Dan tindakan ini berhasil, kabinet baru pun terbentuk dengan nama kabinet Ali Sostroamijoyo I. PKI pun tentunya memberikan dukungan penuh terhadap kabinet baru ini.

Sejalan dengan strategi dan taktik PKI, Aidit mengatakan bahwa *“kewajiban kaum komunis yang pertama-tama adalah menarik kaum tani kedalam front persatuan nasional. Agar kaum tani tertarik maka propaganda yang dikembangkan adalah melenyapkan sisa-sisa feodalisme, mengembangkan revolusi agraria anti-feodal, menyita tanah-tanah tuan tanah dan memberikan dengan cuma-cuma tanah tuan tanah kepada petani terutama kepada kaum tani tak bertanah dan petani miskin.*

⁹⁶ Subhan Sd, *op.cit*, hal 44.

Langkah pertama dalam pekerjaan dikalangan kaum tani adalah membantu perjuangan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mendapatkan tuntutan-bagian kaum tani".⁹⁷ Dengan keberhasilan propaganda terhadap kaum petani ini, keanggotaan PKI semakin meningkat secara spektakuler.

Dominasi PKI tidak hanya dalam tubuh petani. Dominasi PKI juga masuk dalam tubuh SOBSI yang merupakan gabungan dari organisasi-organisasi buruh. PKI mulai menancapkan pengaruhnya dalam tubuh SOBSI sejak bulan Maret 1952. PKI juga mengadakan disiplin partai atau pembersihan terhadap pemimpin SOBSI yang bukan komunis. Kepemimpinan SOBSI sepenuhnya diisi oleh orang-orang PKI. Sejak itu setiap keputusan yang diambil oleh pimpinan pusat SOBSI merupakan kebijaksanaan pimpinan PKI. PKI juga memberikan pelatihan dalam bidang administrasi, keuangan, pelatihan kader-kader, pelatihan anggota dan metode aksi-aksi pemogokan.⁹⁸ Semua organisasi massa buruh ini merupakan elemen penting bagi PKI dalam usahanya menguasai massa di perkotaan dan dipedesaan

Secara umum dapat dikatakan SOBSI telah memberikan keuntungan bagi PKI dalam tiga hal pokok, yaitu memobilisasi dukungan massa bagi PKI, mempermudah pelaksanaan front persatuan nasional dan

⁹⁷ D.N Aidit, 1959, *Djalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 234.

⁹⁸ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 51.

secara langsung membantu PKI khususnya dalam bidang agitasi dan propaganda.⁹⁹

Sukses dalam melakukan pendekatan terhadap kaum petani dan buruh, kali ini sasaran Aidit adalah melakukan pendekatan terhadap organisasi pemuda yaitu pemuda rakyat. Pemuda rakyat keanggotaannya terdiri atas pemuda segala lapisan masyarakat. Aktivitasnya dibidang olah raga, menarik perhatian klub-klub olahraga pemuda seperti cabang bola volley, badminton, sepak bola, tennis dan catur. Disamping pemuda, PKI juga mendekati pelajar. Organisasi pelajar yang didekati adalah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia (IPPI). IPPI digunakan sebagai alat politik oleh PKI, terutama dalam mendukung kebijaksanaan PKI, demontrasi dan protes-protes. Namun pendekatan PKI terhadap mahasiswa kurang berhasil dilakukan, salah satu cara yang digunakan adalah mendirikan organisasi perkumpulan mahasiswa lokal di Bandung, Bogor dan Yogyakarta. Adapun salah satu sebab PKI gagal menarik mahasiswa ke dalam kubu komunis adalah mayoritas mahasiswa Indonesia berasal dari golongan menengah. Mereka berasal dari keluarga yang mendukung PNI, Masyumi, NU, PSI atau pegawai negeri yang secara tradisi tidak berpartisipasi dlam bidang politik. Diantaranya ada yang berasal dari keturunan bangsawan yang sudah barang tentu sulit dipengaruhi oleh komunis.

⁹⁹ *Ibid*, hal 53.

Selain pendekatan terhadap organisasi pemuda dan pelajar, kini giliran kaum wanita yang juga menjadi perhatian kaum PKI. Menurut Aidit peranan kaum wanita harus ditingkatkan karena kaum wanita cukup berperan dalam bidang sosial dan ekonomi. Kaum wanita Indonesia yang bekerja sebagai buruh industri, buruh tani dan buruh perkebunan yang pada umumnya miskin mudah ditarik dalam kegiatan organisasi. Hal itu tentunya sangat mendukung dalam memperoleh dukungan massa yang banyak dalam memenangkan pemilu.

Jika PKI menang dalam pemilu, PKI menjanjikan akan memperjuangkan persamaan hak dalam empat masalah pokok:

- a. Bidang perkawinan, akan memperjuangkan kebebasan memilih suami, persamaan hak dalam warisan dan perceraian dan hak-hak yang sama bagi anak-anak mereka.
- b. Bidang ekonomi, wanita hendaknya ikut berpartisipasi dalam bidang proses produksi seperti halnya laki-laki.
- c. Bidang pertanian, kaum wanita akan mendapatkan pembagian tanah yang luasnya seperti kaum pria.

Organisasi massa wanita komunis yang mulai berperan adalah Gerwis (Gerakan Wanita Indonesia Sedar), adapun programnya sangat sederhana yaitu membuat kaum wanita menjadi sadar politik namun hal itu dikecam oleh para pemimpin PKI dan kemudian berganti nama menjadi Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia). Organisasi ini terbuka bagi seluruh wanita Indonesia dan tidak memihak pada satu partai politik, agama dan

suku yang ada di Indonesia. Peranan Gerwani ini sangat penting bagi PKI terutama dalam hal mempolitikkan masalah-masalah kaum wanita, memobilisasinya untuk mendukung garis politik PKI, mendukung dan membantu ormas PKI lainnya dalam rangka melaksanakan strategi front persatuan PKI.

Selain kaum wanita, kaum veteran dan intelektual pun tak luput dari sasaran Aidit berikutnya. Namun nampaknya pendekatan terhadap kedua kelompok ini kurang begitu membawa hasil yang memuaskan banyak kaum intelektual yang menolak ajakan PKI. Namun untuk golongan veteran sedikit membawa harapan. Organisasi veteran mulai didirikan yaitu bernama Persatuan Bekas Pejuang Seluruh Indonesia (Perbepsi). Adapun nilai terbesar dari Perbepsi untuk PKI adalah dia merupakan organisasi para militer yang dapat memberikan bantuan pada PKI, jika sewaktu-waktu terjadi krisis politik.

Dalam rangka menggalang front persatuan nasional, PKI juga berusaha untuk menarik simpati atau dukungan kepada para seniman dan budayawan. PKI kemudian membentuk organisasi Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Tokoh pendirinya adalah terdiri dari tiga orang yaitu D.N Aidit, A.S Dharta dan M.S Ashar. Dengan dibentuknya Lekra ini PKI berusaha untuk memasukkan pengaruh Marxisme dalam perkembangan kebudayaan dan sastra Indonesia, disamping itu berusaha untuk membangkitkan kesadaran politik dikalangan seniman dan budayawan serta untuk mengubah nasib para seniman.

Usaha yang dilakukan PKI untuk menarik seniman masuk dalam Lekra adalah dengan cara menyediakan berbagai fasilitas yang baik. Seperti mengadakan kunjungan keluar negeri sebagai hasil kerja sama Lekra dan PKI dengan negara-negara sosialis maupun negara-negara non sosialis. Namun akibat dari kurangnya pengetahuan teknis seni maka timbullah anggapan bahwa seniman-seniman PKI belum mampu mencernakan dan menerapkan sastra Marxis. Dimana karya-karya mereka hanyalah hasil jiplakan dari majalah *Soviet literature* dan *Chinese literature*. Karena tujuan politiknya adalah mengubah imbalanced kekuatan masalah mutu seni dianggap tidak penting. Demikian pula mukadimah organisasi Lekra sendiri, hanyalah jiplakan dari demokrasi baru, tulisan Mao Tse Dong, sehingga tema realisme sosialis yang dijadikan metode kerja tidak pernah terjabar dengan jelas dan cukup dimengerti oleh para seniman. Oleh karena itu PKI juga gagal menarik tokoh-tokoh seniman dan sastrawan ke pihaknya, sekalipun diberikan kemudahan-kemudahan untuk berkreasi.¹⁰⁰

3. Merebut Suara Pemilu 1955

Salah satu ciri negara-negara modern yang menerapkan sistem demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum (pemilu). Hal ini berarti bahwa berlangsungnya pemilu disuatu negara dapat dijadikan tolak ukur bagi pelaksanaan sistem demokrasi di negara tersebut, sehingga seringkali pemilu diidentikkan sebagai sebuah pesta demokrasi.

¹⁰⁰ *Ibid*, hal 59-72.

Keputusan pemerintah mengenai pemilu secara konkret tertuang dalam agenda nasional sejak RI dibentuk kembali pada tahun 1950. Kabinet Natsir dan Sukiman mencanangkan pemilu sebagai program politik, akan tetapi belum dapat dilaksanakan. Baru pada masa kabinet Wilopo, program pemilu menunjukkan tanda-tanda yang semakin jelas.¹⁰¹

Masalah rancangan undang-undang mengenai pemilu ini selalu menimbulkan konflik antara PKI dan PSI di Parlemen. Mengenai ketentuan dan syarat-syarat pencalonan anggota konstituante. PKI melalui ketuanya Sukirman mengusulkan supaya daftar perkumpulan hanya dapat diajukan oleh organisasi-organisasi politik baik yang berbentuk partai maupun komite yang dalam peraturan dasarnya memuat jelas tujuan politik kenegaraan dan kemasyarakatan serta larangan bagi anggota-anggota untuk merangkap menjadi anggota organisasi yang lain. Dan organisasi politik yang akan mengikuti pemilu adalah yang mempunyai paling tidak 23 cabang/sub komite pemilihan yang sedikitnya tersebar di berbagai propinsi. Usulan itu ditolak PSI yang pada pokoknya menghendaki agar pemerintah ikut mengatur disiplin partai, sedangkan syarat-syarat yang diusulkan tersebut tersebut terlalu berat sehingga mengurangi hak asasi rakyat.¹⁰² Akhirnya UU pemilihan umum pun disahkan, waktu pemilihan anggota DPR kemudian ditetapkan pada bulan September 1955 dan pemilihan anggota majelis konstituante yang

¹⁰¹ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 54.

¹⁰² *Harian Pikiran Rakyat* 23 Mei 1953.

akan merancang suatu Undang-Undang Dasar ditetapkan berlangsung pada bulan Desember 1955¹⁰³

Sesuai dengan strategi barunya, dalam menghadapi pemilu yang pertama ini (1955). PKI mengadakan aliansi dengan PNI, juga mendekati partai NU, suatu partai pecahan Masyumi untuk bersama-sama menghadapi Masyumi, musuh utama PKI. PKI berusaha memanfaatkan persaingan antara PNI dan partai Masyumi, partai yang besar pada waktu itu dan juga berusaha memanfaatkan kecenderungan-kecenderungan partai atau fraksi yang bersedia bekerja sama bahkan bersikap anti komunis.

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan politiknya, langkah pertamanya PKI berusaha mencegah Masyumi dari kemungkinan bekerja sama dengan PNI. PKI menuduh Masyumi sebagai golongan borjuis besar yang melayani kepentingan kapitalis besar luar negeri dan mengemukakan adanya hubungan yang erat antara gerakan Darul Islam dan Masyumi. Dengan meningkatnya gerakan-gerakan DI-TII di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh, kedudukan Masyumi sebagai satu-satunya partai islam yang besar juga mengalami kegoncangan karena diserang oleh PKI maupun PNI. PNI dibawah pimpinan Sidik Djojokusarto lebih cenderung memilih bekerja sama dengan PKI daripada Masyumi sebagai saingan paling besar dalam menghadapi pemilu dan

¹⁰³ MC. Riclefs, *op.cit*, hal 488.

hanya dengan menggunakan PKI pengaruh Masyumi dapat diminimalkan.¹⁰⁴

Kerja sama PKI dan PNI semakin akrab dan setiap kabinet yang didukung PNI akan didukung PKI. Dukungan pun akan semakin besar bila Masyumi tidak turut serta didalamnya. Dalam kerja sama itu PNI kurang cerdas, ia lebih banyak diperalat oleh PKI bahkan para pemuda PNI sempat menerima penghinaan dipertengahan tahun 1965 dimana PKI berhasil memukuli pemuda-pemuda PNI di Yogyakarta.¹⁰⁵

Suatu peristiwa yang ikut memperlancar usaha-usaha PKI dalam mengisolasi Masyumi adalah keluarnya Nadhlatul Ulama (NU) dari Masyumi. Sebuah kejadian yang disambut dengan penuh kegembiraan dikalangan PKI. Bagi PKI, memberi dukungan kepada Masyumi hanya berarti memberikan dukungan kepada sekelompok yang anti komunis.

Selanjutnya NU bersama-sama dengan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia) dan Persatuan Tarbiyah Indonesia (Perti) membentuk suatu koalisi yang dikenal dengan nama "Liga Muslimin".¹⁰⁶

Sejalan dengan strategi dan taktik PKI menjelang pemilihan umum, Aidit menarik kaum tani. Untuk mempengaruhi petani, PKI mengadakan propaganda besar-besaran dengan tema melenyapkan sisa-sisa feodalisme dan anti tuan tanah. Kaum tani yang tak bertanah, dan petani miskin di iming-iming akan diberi tanah sebagai milik perseorangan mereka, apabila PKI menang dalam pemilihan umum.

¹⁰⁴ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 42.

¹⁰⁵ G. Moedjanto, 1989, *Indonesia Abad ke-20 jilid 2*, Kanisius, Yogyakarta, hal 136.

¹⁰⁶ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 42-43.

Landasan utama strategi PKI mendekati petani berdasarkan penafsiran Lenin terhadap Marxisme, mengenai petani. Petani disejajarkan dengan kaum buruh. Petani dianggap sebagai golongan yang dieksploitasi melalui faktor-faktor produksi.

Sejak tahun 1952 dilaksanakan program tanah untuk petani, melalui taktik “kecil tapi berhasil”. Salah satu usahanya ialah menghasut para petani supaya mempertahankan atau menguasai tanah milik perkebunan dan hutan reboisasi sebagai tanah garapan. Pelaksanaan taktik ini dimaksudkan untuk memperoleh simpati dari 28.000 keluarga petani yang menggarap 80.000 hektar tanah perkebunan peninggalan Belanda di Jawa sekitar 400.000 di Sumatera. Oleh karena itu PKI menuntut kepada pemerintah yang hendak menertibkan tanah bekas perkebunan Belanda dan hutan reboisasi melalui pelaksanaan undang-undang no.8 tahun 1954 supaya petani tidak diusir begitu saja dari tanah garapannya, melainkan pemerintah harus memberikan kompensasi dalam bentuk ganti rugi atau menyediakan tanah pengganti. Dengan pendekatan terhadap petani, PKI memperoleh dukungan dalam menghadapi pemilihan umum 1955.

Untuk dapat mempengaruhi rakyat/masyarakat ini, PKI menjalankan kampanye dengan tiga tema yang menyentuh emosi masyarakat:

Pertama, PKI menampakkan dirinya sebagai pembela pancasila

Kedua, PKI menampilkan figur presiden Soekarno

Ketiga, menampakkan diri sebagai pembela “kaum tertindas”

Propaganda yang menyetuh emosi masyarakat ialah adanya pernyataan bahwa satu-satunya calon mereka untuk presiden adalah Bung Karno, seolah-olah partai lain tidak menghendaki yang demikian.

Semua tokoh-tokoh PKI turun untuk berkampanye, seperti D.N Aidit untuk daerah Yogyakarta, Semarang, Purwokerto dan Palembang. Hasil kampanye untuk memenangkan pemilu tahun 1955 ini cukup mengejutkan golongan non komunis dan golongan anti komunis termasuk PNI sendiri. Di bawah pimpinan D.N Aidit, PKI berhasil keluar sebagai partai ke-4 terbesar disamping PNI, Masyumi dan NU. PKI berhasil mengumpulkan 6 juta suara pemilu. Dengan kemenangan itu semakin memperkuat kedudukan Aidit.¹⁰⁷

Bagi PKI, hasil itu merupakan suatu yang menakjubkan dan bertolak belakang dengan citra buruk PKI selama itu, sebab ternyata trauma politik peristiwa Madiun 1948 dan peran PKI dalam aksi mogok sepanjang 1950-1951 tidak berpengaruh. Perolehan suara itu sebagian besar datang dari Jawa yaitu 89,8%, Sumatera menyumbang 8,6% dan sisanya dari pulau-pulau lain.¹⁰⁸

Diperkirakan PKI dalam pemilihan umum pertama ini menghabiskan dana kurang lebih 200 juta rupiah, yang didapat dari donasi-donasi pedagang Tionghoa dan kemungkinan besar sumbangan dari kedutaan besar negara komunis lainnya.¹⁰⁹

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 45-48.

¹⁰⁸ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 58.

¹⁰⁹ Soegiarso Soerojo, 1988, *Siapa Menabur Angin Akan Memuai Badai*, Sri Murni, Jakarta, hal 68.

Kemenangan PKI merupakan sukses paling menonjol. Mengingat pada bulan Maret 1952 anggotanya hanya sekitar 7910 orang sedangkan pada bulan September 1955 PKI telah berhasil mengumpulkan suara lebih dari 6 juta orang, sehingga menduduki posisi keempat terbesar. Boleh dikatakan sebagai angka-angka yang fantastik karena dalam waktu relatif singkat yaitu antara tahun 1950-1955 PKI berhasil meraih kembali masyarakat. Hal itu sebenarnya bertolak belakang dengan perilaku terror yang dilancarkan PKI. Dalam rentang waktu tersebut, PKI masih menghadapi masa-masa sulit antara 1951-1952 sebagai akibat keterlibatannya dalam aksi-aksi pemogokkan sepanjang 1950-1951. meskipun demikian, dari komposisi suara yang diraih PKI tersebut menunjukkan perkembangan yang belum berimbang. Berdasarkan hasil suara yang diperoleh tampak adanya pemusatan suara di pulau Jawa. Hal ini berarti PKI mendapat simpati yang sangat besar di pulau Jawa, sementara di wilayah lainnya PKI kurang mendapat simpati rakyat. Kenyataan ini memberikan indikasi bahwa pengaruh PKI di Jawa sangat kuat, sedangkan di wilayah-wilayah lain pengaruhnya sangat lemah. Sebagai contoh perbandingannya perolehan suara yang diperoleh PKI ini dapat dilihat antara wilayah Jawa Tengah dan Kalimantan Barat (untuk lebih jelas lihat pada lampiran III-IV)

Kemenangan PKI dalam pemilu ini juga menyadarkan golongan-golongan non komunis, PNI, NU bahwa kemenangan kaum komunis adalah berkat membonceng "aliansi" PKI dengan PNI dan NU. Dengan

demikian kemenangan PKI dalam pemilu 1955 menimbulkan kekecewaan pada tiga partai pemenang yaitu PNI, Masyumi dan NU. PNI sebagai pemenang pertama merasa kecewa karena ditipu oleh PKI melalui kerja sama mereka. Sejak saat itu para pemimpin PNI menyadari bahwa kerja sama dengan PKI berbahaya sehingga mereka kemudian mulai berpikir untuk kembali menggalang kerja sama dengan Masyumi dan NU tanpa PKI. Bagi NU sendiri walaupun banyak peningkatan namun tidak terlalu mencengangkan karena partai NU ini sebelum pemilu juga sudah banyak pendukungnya. Sedangkan Masyumi sebagai pemenang kedua merasa kecewa karena dukungan rakyat kepada PKI meningkat.

Bagi PKI sendiri kemenangannya dalam pemilu tersebut dinilai cukup baik walaupun belum memuaskan. Aidit dengan bangga mengatakan bahwa PKI sebagai salah satu unsur kekuatan nasional sudah tidak dapat disangkal lagi. Ia mengemukakan bahwa pada akhir tahun 1955 anggota PKI sudah mencapai 1 juta orang, Pendukung utama PKI berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sisanya diperoleh diluar Jawa terutama dari daerah-daerah dimana terdapat banyak penduduk yang berasal dari Jawa yakni di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara.

Suasana demokrasi yang telah berjalan dinegara Indonesia memberikan kesempatan pada PKI untuk merehabilitasi organisasi PKI. Pernyataan PKI yang bersedia mendukung suatu partai nasional terbesar makin memperkuat posisi PKI. Kemenangan yang dicapai PKI pada

pemilu 1955 merupakan satu hal yang luar biasa karena pada tahun sebelumnya PKI pernah mengkhianati perjuangan bangsa.

Dalam kenyataannya yang menguasai parlemen pada umumnya antara tahun 1950-1959 adalah parpol-parpol. Partai politik sudah berkuasa tapi tidak bisa melaksanakan kewajibannya dan kabinet terus mengalami jatuh bangun/krisis. Menurut catatan bahwa usia kabinet pada masa berlakunya demokrasi liberal hampir tidak ada yang mencapai masa kerja satu tahun.¹¹⁰

Didalam wujud globalnya seperti tercermin dalam permukaan apa yang disebut dengan demokrasi liberal, telah menimbulkan persaingan dan pertentangan yang berkepanjangan diantara parpol-parpol itu sendiri yang semakin meningkat.

Demokrasi liberal telah mencapai titik kulminasi seperti adanya polarisasi yang kemudian menjelma menjadi kubu-kubu tertentu yakni:

- a. Adanya suatu kubu yang berkehendak mempertahankan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia
- b. Demikian pula adanya suatu kubu yang dengan gigih menghendaki agar piagam Jakarta baik formal maupun secara material diterapkan sebagai dasar negara
- c. Dilain pihak terdapat suatu kubu yang senantiasa bersikap apriori dan cenderung mengikuti kemana arah angin bertiup

¹¹⁰ Djanwar, 1986, *Mengungkap Pengkhianatan/Pemberontakan G 30 S PKI*, C.V Y Rama, Bandung, hal 11.

- d. Sedangkan disatu pihak lain adalah kubu PKI yang bersifat mengintai serta memanfaatkan situasi yang sedang bergolak untuk menyusun kekuatan didalam partai-partainya.¹¹¹

Eksistensi parlemen sebagai institusi legislatif dan peranannya dalam proses politik kenegaraan merupakan komponen yang sangat penting didalam sistem demokrasi. Pada hakikatnya parlemen adalah dewan perwakilan rakyat, artinya parlemen harus dapat menampung dan sekaligus mengartikulasikan aspirasi rakyat. Posisi parlemen yang demikian strategis itu mengandung makna bahwa wakil-wakil rakyat yang duduk didalamnya harus peka dan peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat.

Sesuai dengan konsep demokrasi liberal, golongan-golongan yang dianggap membawa aspirasi rakyat mulai mendapat tempat di parlemen. Tak terkecuali golongan komunis, mereka pun mempunyai wakil dalam parlemen. Sekalipun jumlah kursi yang didapat PKI tidak banyak, tetapi peristiwa ini mengandung arti politis yang sangat penting bagi PKI.¹¹² Didalam menghadapi sistem parlemen ini ternyata diantara anggota PKI timbul dua pandangan yang berbeda. Disatu pihak ada kelompok yang mempunyai keyakinan bahwa perjuangan yang ditempuh melalui institusi parlemen merupakan suatu upaya untuk memperjuangkan cita-cita partai. Strategi legal ini diyakini oleh Tan Liang Dji. Namun dilain pihak ada sekelompok yang skeptis memandang keberhasilan perjuangan partai

¹¹¹ *Ibid*, hal 13.

¹¹² Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 73.

lewat jalur parlemen, diantaranya adalah Aidit. Namun pada akhirnya strategi inipun diterapkan juga dan ketua fraksi dari golongan PKI ini adalah Ir. Sukirman dan wakilnya adalah Paris Pardede. Beberapa tahun kemudian beberapa wakil PKI tersebut kemudian mengundurkan diri, dan kursi mereka yang kosong digantikan oleh D.N Aidit.¹¹³

Setelah pemilihan umum untuk anggota DPR bulan September tahun 1955, pemilihan tahap berikutnya adalah pemilihan umum anggota konstituante pada bulan Desember 1955. Jumlah anggota DPR terpilih sebanyak 257 anggota, maka untuk anggota konstituante sebanyak dua kali yaitu 514. Dengan demikian PKI mendapat 80 anggota.

Pada tanggal 4 November 1959 ketika sidang membicarakan mengenai “Dasar Negara” mulailah timbul perbedaan-perbedaan pendapat yang semakin lama semakin tajam dan melebar. Timbulnya perbedaan-perbedaan itu karena adanya keinginan yang berbeda-beda dari masing-masing golongan tentang Dasar Negara:

- a. Golongan yang menginginkan Pancasila sebagai dasar negara didukung oleh PNI, PKI, Khatolik, Parkindo dan partai kecil lainnya.
- b. Golongan yang menginginkan Islam sebagai Dasar Negara didukung oleh Masyumi, NU, PSII dan Perti.
- c. Golongan yang menginginkan Sosial Ekonomi sebagai Dasar negara didukung oleh partai Murba.

¹¹³ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 89.

Dalam usaha untuk meyakinkan pendapatnya masing-masing golongan menampilkan juru bicaranya yang paling dipercaya dikalangan mereka. PKI menampilkan Ir. Sakirman, Wikana, Njoto dan Kyai Dasuki dan semua pernyataan mereka menyatakan bahwa PKI tetap mendukung Pancasila.

Dengan demikian fenomena demokrasi parlementer telah memberi kesempatan bagi Aidit untuk mengembangkan sayap kekuasaan partai di bumi Indonesia. Perubahan strategi yang dilakukan Aidit bukan tanpa alasan, karena berkaca dari pengalaman masa lampau bahwa taktik kekerasan hanya akan menghancurkan partai. Dengan demikian menurut Aidit PKI haruslah “mengikuti arah angin” demi mempertahankan eksistensinya di bumi Indonesia. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan itu adalah sebagai jalan aman bagi partai yang telah mengalami kekurangan pendukung, sekaligus menjadi peluang tipis untuk menerapkan ideologinya dalam praktik nyata. Untuk mendapat dukungan penuh, Aidit pun kemudian menjalin kerja sama dengan partai-partai besar lainnya di Indonesia. Sikap PKI yang lunak dan fleksibel, membuatnya dapat berkoalisi dengan partai-partai besar tersebut. Suasana politik yang belum stabil, telah membuat kekecewaan rakyat yang mendalam kepada para penguasa yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadinya. Hal itu membuat PKI muncul sebagai “hero” yang berpihak pada rakyat kecil, terutama bagi kaum petani dan kaum buruh yang merupakan kelompok yang selalu tertindas. Usaha ini kian berhasil dengan keadaan ekonomi

Indonesia yang juga belum stabil sehingga banyak rakyat yang mulai percaya kepada propaganda PKI. Usaha-usaha PKI ini ternyata menuai keberhasilan yang mengagumkan yaitu terbukti pada saat PKI muncul sebagai pemenang dalam pemilu tahun 1955. Sehingga dengan adanya demokrasi parlementer ini telah memberi landasan bagi PKI untuk berpijak di bumi Indonesia.

B. Peranan D.N Aidit Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Situasi politik yang tidak stabil pada masa demokrasi konstitusional, berpengaruh pada seringnya terjadinya pergantian kabinet dengan program pemerintah yang berbeda-beda. Ketidakstabilan politik yang terjadi menyebabkan demokrasi konstitusional runtuh. Sebagai pengganti demokrasi konstitusional, Sukarno memilih demokrasi terpimpin. Munculnya gagasan tentang demokrasi terpimpin berawal dari keprihatinannya terhadap seringnya terjadi pergantian kabinet tanpa bisa menyelesaikan program kerjanya.

Pemilihan umum yang pertama pada tahun 1955 membuktikan bahwa Masyumi dan PSI mendapat dukungan yang sama dengan PKI, maka Sukarno dengan dukungan terang-terangan dari PKI dan lawan-lawan lainnya dari Masyumi dan PSI mulai menyerang demokrasi parlementer. Sukarno menyalahkan sistem itu untuk kesulitan-kesulitan yang semakin bertambah di semua bidang baik itu krisis politik, ekonomi, korupsi, pemberontakan, pergolakan agraris dan kefanatikan agama. Tahun 1956 Sukarno bahkan menyatakan keinginannya untuk “mengubur partai-partai” yang jumlahnya



sudah melebihi 40 semenjak Syahrir mengeluarkan seruan pada bulan November 1945 untuk mendirikan partai-partai.

Pada tahun 1956 Sukarno melakukan perjalanan ke negara-negara sosialis. Hal ini memperkuat keyakinannya bahwa hanya melalui demokrasi terpimpin “sentralisme demokratis” dari tahun 1930-an maka tujuan masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan baik. Dalam konsepnya yang diumumkan pada bulan Februari 1957, Sukarno menyerukan pembentukan Kabinet Gotong Royong yang akan mengikutsertakan PKI sebagai salah satu partai besar dan membentuk sebuah dewan nasional yang terdiri dari semua golongan fungsional dalam masyarakat (petani, mahasiswa dan wanita).¹¹⁴ Dari segi teoritis, para pemimpin PKI yakin bahwa mendirikan Kabinet Gotong Royong itu merupakan sebuah penemuan penting yang asli Indonesia dan merupakan sumbangan penting bagi pengembangan yang kreatif dari ajaran marxisme-leninisme dan penerapannya untuk mengarahkan proses revolusioner di negara-negara berkembang.¹¹⁵

Cita-cita Sukarno adalah menginginkan masyarakat yang berkeadilan sosial dengan mendasarkan pada demokrasi asli Indonesia, sehingga penolakkannya terhadap demokrasi parlementer merupakan suatu upaya untuk mewujudkan kabinet Gotong Royong. Setiap anggota kabinet dianggap sebagai anggota keluarga yang rukun (*ale leden van de familie aan tafel*)¹¹⁶, maka Sukarno menempatkan dirinya sebagai ayah dari sebuah keluarga besar

¹¹⁴ Bernhard Dahm, 1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta, hal 403-404.

¹¹⁵ Victor. M Fic, 2005, *Kudeta 1 Oktober 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 54.

¹¹⁶ Rusadi Kantaprawira, 1987, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Pustaka Kartini, Jakarta, hal 91.

orang yang sudah tau bahwa ginjal bapak presiden tidak berfungsi lagi. Dengan kesehatan presiden yang agaknya rapuh itu mendorong pertanyaan siapa yang akan menggantikannya. Jelaslah bahwa penggantinya tidak mungkin seorang eksponen dari salah satu dari tiga aliran yaitu nasionalisme, islam dan komunisme, sebab Sukarno tidak mengizinkan bahwa salah satu diantaranya berkuasa.¹³⁵

Sejak tahun 1960, PKI telah mencoba kekuatannya untuk menghadapi TNI-AD. TNI-AD dianggap sebagai penghalang utama bagi upaya-upaya PKI untuk melancarkan ofensif-revolusionernya. Meskipun AD dan angkatan bersenjata pada umumnya telah menjadi target PKI sejak lama namun baru pada permulaan tahun 1964 partai melakukan upaya serentak untuk mengintensifikannya. Ketika itu Aidit sebagai ketua PKI mendirikan sebuah badan yang dikenal sebagai Biro Khusus, yang bertanggung jawab hanya kepadanya saja. Ketua PKI tersebut telah menunjuk kader-kader PKI yang telah terpilih untuk mencari orang-orang yang bersimpati pada partai didalam AD. Biro itu diciptakan dengan tujuan yang jelas, yaitu menginfiltrasi Angkatan Bersenjata, mendirikan sel-sel rahasia didalam unit-unit mereka yang terdiri dari para perwira yang membangkang dan mereka yang bersimpati dengan garis-garis kebijakan PKI dan menetralsir orang-orang yang memusuhi partai.¹³⁶ Adapun tugas Biro Khusus tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

¹³⁵ *Ibid*, hal 3-4.

¹³⁶ Victor. M Fic, *op.cit*, hal 61-62.

1. Penanaman sel-sel

Apabila sudah berhasil mendapatkan seorang anggota ABRI, maka orang itu dididik dan ditingkatkan kesadaran politiknya secara teori maupun praktek. Jika hal ini sudah dianggap cukup, orang itu kemudian diberi pekerjaan menurut tugas, kemampuan dan kesanggupannya. Dengan demikian anggota ABRI itu telah dianggap sebagai sel partai ditempatnya bekerja.

2. Penanaman simpatisan partai

Orang-orang atau anggota ABRI yang dihubungi oleh petugas partai tetapi belum dapat ditarik menjadi anggota partai, orang tersebut sudah dapat diberi tugas ringan. Orang yang semacam itu diklasifikasikan dengan simpatisan partai. Tugas simpatisan partai yang utama adalah mempelajari politik dan pengetahuan mengenai kepartaian. Caranya dengan diberi brosur-brosur partai dan diajak bertukar pikiran mengenai politik praktis dan tentang teori elementer marxisme-leninisme.

3. Mempertajam perbedaan antara bawahan dan atasan

Antara bawahan dan atasan ada kalanya terdapat perbedaan dalam kondisi sosial ekonominya. Perbedaan-perbedaan yang ada ini selalu dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan jalan mempertajam dan memperluas rasa perbedaan tersebut. Maksudnya adalah dengan makin tajam dan makin meluasnya rasa perbedaan tersebut maka ABRI akan semakin lemah.

4. Memanfaatkan hasil-hasil yang diperoleh untuk kepentingan perjuangan partai

Kalau didalam tubuh ABRI telah terdapat anggota-anggota PKI, maka anggota-anggota itu dapat digunakan untuk kepentingan perjuangan partai. Misalnya dapat digunakan dalam gerakan pengumpulan uang untuk kongres atau dapat juga dijadikan saluran untuk sumber informasi mengenal aktivitas ABRI.¹³⁷

Pada tahun 1961 terjadi sentralisasi kekuasaan ABRI ditangan Presiden Sukarno. Dimana jabatan Panglima Angkatan Bersenjata berada didalam cengkeramannya. Sukarno menjadi khawatir dengan kekuatan Nasution. Ia kemudian mengumumkan dirinya sebagai penguasa perang tertinggi (peperti) tetapi dalam kenyataannya tidak dapat menghancurkan kekuatan militer. Ia kemudian berpaling pada PKI untuk mendapat dukungan. Hal ini diterapkan pada pembentukan kabinet Dwikora dimana banyak anggota PKI menduduki kursi dalam MPRS dan DPR GR.¹³⁸

Melalui penggarapan yang sistematis diciptakanlah suasana untuk meyakinkan Sukarno bahwa tanpa PKI Presiden Sukarno akan menjadi lemah atas serangan dari luar termasuk TNI-AD. Seperti yang diungkapkan oleh D.N Aidit dalam sidang bulan Febuari 1963, menyatakan:

“Massa rakyat tidak saja menyempurnakan perjuangan untuk membebaskan Irian Barat dan mengembalikan keamanan tapi menggebu terus menghancurkan setiap rintangan untuk menuju gerakan rakyat revolusioner, seperti keadaan darurat perang kapitalis

¹³⁷ Moerdiono, *op. cit.*, hal 40-41.

¹³⁸ Bilveer Singh, 1996, *Dwi Fungsi ABRI*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 98.

birokrat, golongan komprador dan gotong royong nasional berdasarkan nasakom".¹³⁹

Terhadap jajaran partai yang berideologi nasionalisme, PKI berhasil melakukan penyusupan ke dalam PNI dan Partai Indonesia/Pertindo. PNI sebagai partai politik yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilu 1955 menjadi sasaran penyusupan PKI. Usaha yang lain dengan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. Didalam negeri memecah belah/menyusupi kekuatan partai/organisasi massa dari pihak lawan, dari segi pendidikan memasuki ajaran marxisme dan leninisme dan disegi militer mengindoktrinasi perwira-perwira dengan ajaran komunis yang membina sel-sel dikalangan ABRI.
- b. Diluar negeri mengubah politik luar negeri yang bebas aktif kearah politik yang cenderung kearah blok komunis.¹⁴⁰

Untuk memperoleh perolehan perimbangan kekuatan, PKI kemudian melakukan apa saja yang mereka sebut dengan ofensif manipol yang kemudian berubah ke ofensif revolusioner. Timbulnya keresahan dalam partai yang ditimbulkan oleh kaum doktriner marxis mempertanyakan kebijaksanaan Aidit mengenai kerja sama dengan pihak borjuis nasional yang mereka anggap sebagai suatu perkembangan kearah pemborjuisan dalam pucuk pimpinan PKI yang berkehendak membantai lawan-lawan politik.¹⁴¹

Perkembangan yang menguntungkan bagi PKI terjadi pula ketika Presiden Sukarno membentuk front nasional yang dipakai PKI sebagai alat

¹³⁹ Alfian, 1980, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta, hal 122.

¹⁴⁰ *Prisma* no 10 tahun 1983, hal 65.

¹⁴¹ Ulf Sundhaussen, 1992, *Politik Militer Indonesia 1965-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, LP3S, Jakarta, hal 316.

politik. PKI pun semakin berani melancarkan ofensif revolusioner disegala bidang. Seperti yang diutarakan Aidit yang juga mengomandokan kepada unsur-unsur partai untuk ofensif revolusioner sampai ke puncaknya di bidang politik, ekonomi dan budaya.¹⁴²

Mengandalkan pada kemampuan ormas-ormas *onderbouwnya* yang terorganisasi baik. Front nasional makin banyak diperani oleh orang-orang PKI. mengenai front persatuan nasional itu PKI berpendapat:

“front nasional cocok untuk mensukseskan ideologi dan melaksanakan cita-cita kita karena front nasional baik untuk mengenal golongan-golongan lain dan memungkinkan PKI mempergunakan lain golongan sebagai alat perjuangan kita”.¹⁴³

Menjelang tahun 1964 mulai kelihatan gejala PKI meningkatkan aksi-aksinya. Seakan-akan golongan lain sudah gampang didikte untuk mengikuti kemauan mereka. Sabotase-sabotase mulai dilakukan. Hal ini tampak pada 11 Januari 1964 dimana rangkaian kereta api rute selatan melanggar sinyal dan langsung masuk stasiun Purwokerto sehingga menabrak gerbong yang berhenti di stasiun tersebut.¹⁴⁴ Hal serupa juga kembali terjadi pada 6 Februari 1964 kasus tabrakan antara dua rangkaian KA terjadi di Kaliyasa, Solo dan tanggal 30 April 1964 peristiwa yang sama terjadi di Kroya, tanggal 14 Mei 1964 di Cirebon dan Semarang juga terjadi kasus yang sama serta tanggal 6 Juli 1964 di Cipapar Jawa Barat. Hasil interogasi oleh aparat keamanan menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut kesengajaan sabotase yang

¹⁴² *Prisma* no 10 tahun 1983 hal 65.

¹⁴³ Soegiarso Soerojo, *op.cit*, hal 112.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal 184.

bertedensi politik.¹⁴⁵ Adanya ucapan Presiden Sukarno, “jangan komunis thopobi”, maka PKI merasa aman dari serangan-serangan luar dan merasa dilindungi Presiden. Dengan demikian PKI lebih leluasa dengan aksinya yang lebih dikenal dengan aksi sepihak.¹⁴⁶

Pada tahun 1965, Setelah PKI mendapat angin baik membuat D.N Aidit maju terus dan mengusulkan pada Presiden Sukarno untuk membentuk angkatan V yang terdiri dari buruh dan tani, disamping ABRI juga menuntut nasakomisasi dilingkungan ABRI. Hal ini tentu saja ditolak oleh ABRI dengan jawaban bahwa penduduk telah diberi latihan militer dalam rangka pertahanan sipil/Hansip dan usul tentang nasakomisasi ABRI, pimpinan tentara hal itu tidak mungkin dilaksanakan sebab efisiensi dari operasi militer akan terancam bila pertumbuhan-pertumbuhan taktis dimasuki oleh politik kepartaian.¹⁴⁷

Keputusan mengenai pembentukan angkatan V tidak pernah diambil. Dan dalam rangka mendiskreditkan TNI-AD, PKI melancarkan isu dewan jenderal. Tujuannya adalah membuat citra buruk antara pimpinan TNI-AD dimata masyarakat. Seperti yang diungkapkan D.N Aidit bahwa:

“Ia percaya dewan jenderal itu benar-benar ada dan merupakan kelompok Jenderal TNI-AD yang menjadi musuh PKI.”¹⁴⁸

¹⁴⁵ A.H Nasution, 1978, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III*, Ofset Angkasa, Bandung, hal 249.

¹⁴⁶ *Prisma* no 10 tahun 1983 hal 49.

¹⁴⁷ Ulf Sundhaussen, *op.cit*, hal 338.

¹⁴⁸ Moerdiono, *op.cit*, hal 61.

Selama tahun 1965 dapat dicatat sejumlah aksi yang dilakukan PKI diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Gerakan riset di kecamatan-kecamatan untuk memastikan apa yang dilakukan oleh PKI disebut petani miskin
- b. Aksi yang menuntut penyitaan milik Inggris dan milik Amerika Serikat
- c. Aksi yang menuntut retoling tuntutan penggantian pejabat yang anti PKI dan aksi tunjuk hidung
- d. Pengindonesiaan marxisme
- e. Aksi-aksi teror diberbagai daerah

Konsolidasi PKI sejak tahun 1960-1965 berhasil cukup memuaskan sehingga yang tampak di gelanggang politik hanyalah PKI dan pada bulan Agustus 1965 mengadakan *build up* mental pada ormas-ormasnya dan juga pada simpatisan.¹⁴⁹

Pada tanggal 1 Oktober 1965, terjadilah penculikan terhadap perwira-perwira tinggi. Kejadian ini kemudian dijadikan dalih untuk menghantam PKI. usaha-usaha penumpasan pun dilakukan. Aksi penumpasan gerakan ini terus berjalan. ABRI dan massa kembali bersatu, namun aksi penumpasan ini mengalami kendala terutama dalam menangkap gembong PKI ini yaitu Aidit dan pemimpin-pemimpin PKI lainnya, karena mereka sangat lihai memilih tempat persembunyian.

Aidit berhasil memperoleh tempat bersembunyi yang sangat ideal, dilihat dari letak rumah dan pengaturan ruang persembunyian sungguh-

¹⁴⁹ Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, 1976, *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, , hal 37.

sungguh penemuan yang luar biasa. Rumah tersebut terletak di sebuah gang sempit dan berluk di Sidaredja, kampung Sambeng, kelurahan Mangkubumi, Solo milik seorang janda tua mbok Hardjo.

Jika dilihat sekilas rumah tersebut terdiri-dari ruang makan dan tempat tidur penghuninya. Ruang tempat ini berdampingan dengan belakang kamar mbok Hardjo. Antara tempat tidur pak Kasim (penyewa rumah) dan mbok Hardjo dibuat dinding pemisah sehingga tercipta ruangan yang sempit. Apabila memasuki kamar keduanya maka hanya kan ditemui ruang tidur saja. Apabila memasuki ruang makan maka hanya akan menemui satu ruangan itu saja dengan beberapa kursi dan lemari tua tempat menyimpan makanan. Dan dibalik almari makan sederhana inilah tempat persembunyian Aidit. Dibelakangnya terdapat pintu kecil dan apabila lemari makan itu digeser maka Aidit dapat memasuki kamarnya. Sehingga dengan demikian sangat sulit menemukan tempat persembunyiannya yang merupakan hasil pemikiran yang sempurna dengan bentuk sederhana.¹⁵⁰

Persembunyian ini kemudian terungkap pada tanggal 21 November 1965.¹⁵¹ Setelah 18 hari melakukan penyelidikan dan pengamatan maka diketahui bahwa Aidit bersembunyi di rumah Sembeng itu. Malam itu juga langsung diadakan penggerebekan oleh pasukan ABRI. Semua sudut rumah diperiksa dengan teliti, setiap penghuni rumah juga telah diperiksa namun Aidit tetap tidak dapat ditemukan. Lalu pak Kasim, salah satu penghuni rumah

¹⁵⁰ Soebekti, *op.cit*, 77-78.

¹⁵¹ *Ibid*, hal 87.

itu mengungkapkan persembuyian Aidit dan malam itu juga berakhir sudah perjuangan ketua PKI itu.

Kegagalan PKI dalam aksinya membuat partai ini begitu berduka. Walaupun telah secara nyata PKI telah merongrong kewibawaan Pancasila dan UUD 1945 serta melawan kepada pemerintah, tapi Presiden Sukarno tidak membubarkan PKI. PKI masih tetap hidup di bumi Indonesia. Bahkan pada tanggal 24 Februari 1966 Presiden Sukarno mengumumkan dibentuknya kabinet baru yaitu kabinet Dwikora yang disempurnakan.

Mulanya para mahasiswa dan rakyat senang karena ada perombakan kabinet, tapi setelah diumumkan nama-nama kabinet itu rakyat dan mahasiswa menjadi kecewa karena orang-orang yang duduk didalamnya masih banyak yang terlibat PKI seperti Dr. Subandrio, Khairul Saleh bahkan Jenderal Nasution disingkirkan. Aksi-aksi protes mulai terlihat, Presiden Sukarno tidak dapat diajak berunding dan masih tetap mempertahankan kekuasaan sebagai Presiden. Rakyat pun mulai beropini bahwa PKI tidak dapat dihapus dari Indonesia selama Presiden Sukarno masih tetap menjabat sebagai Presiden.

Situasi pun semakin gawat, maka ketiga orang perwira tinggi AD yaitu Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M.Yusuf dan Brigadir Jenderal Amir Mahmud menghadap Presiden di Istana Bogor.¹⁵² Ketiga perwira ini mengusulkan kepada Presiden supaya Letnan Jenderal Soeharto diberi kepercayaan untuk mengatasi dan menenangkan keadaan. Setelah dibahas Presiden Sukarno menyetujui dan pada tanggal 11 Maret 1966

¹⁵² Djanwar, *op.cit*, hal 199.

Presiden Sukarno mengeluarkan surat perintah yang ditujukan pada Letnan Jenderal Soeharto yang kemudian dikenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret.

Dengan demikian pertumbuhan yang dialami partai selama masa jabatan Aidit sebagai pemimpin adalah sesuatu yang sangat spektakuler. Hal itu kembali dibuktikannya pada masa demokrasi terpimpin. Kehadiran PKI dalam gelanggang politik Indonesia sering kali mendapat rintangan, terutama dari partai-partai yang berbasiskan agama dan juga dari golongan militer. Namun satu demi satu, rintangan itu mulai dapat diatasi karena PKI memiliki sekutu yang sangat potensial yakni Presiden Sukarno. Posisi PKI semakin mantap dalam aksinya karena pada era ini, PKI mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan secara nyata berbagai permasalahan yang sebelumnya hanya dapat mereka kemukakan dengan cara yang sangat berhati-hati. Sehingga pada masa demokrasi terpimpin ini telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan PKI. Dan dengan adanya biro khusus yang dibangun PKI semakin memperlancar usaha PKI dalam melakukan infiltrasi kedalam tubuh pemerintah, terutama tubuh militer. Sehingga Aidit sebagai pemimpin PKI telah menempati posisi yang sangat menguntungkan, yaitu berhasil mempertahankan keseimbangan politik antara presiden Sukarno, Angkatan Bersenjata dan partainya sendiri, PKI.

BAB IV
PENGARUH PERKEMBANGAN PKI
TERHADAP SITUASI SOSIAL-EKONOMI DAN POLITIK
DI INDONESIA

A. Pengaruh PKI Terhadap Situasi Sosial-Ekonomi

Rakyat Indonesia telah memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu dapat dilihat betapa beraninya rakyat Indonesia melawan penjajah. Rakyat Indonesia telah belajar mengenai arti dari revolusi. Revolusi pada hakikatnya adalah suatu perjuangan untuk menumbangkan kekuasaan yang lama, yang tidak mereka sukai dan yang menghambat kemajuan mereka baik material maupun spiritual dan membangun sesuatu kekuasaan yang baru yang melapangkan jalan untuk kemajuan kehidupan mereka dibidang politik, ekonomi dan kebudayaan.¹⁵³

Dengan adanya proklamasi kemerdekaan itu, bukan berarti pengaruh imperialisme barat dinegeri ini sudah mati. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bangsa Indonesia telah dijajah oleh bangsa-bangsa Eropa dan mengalami penghisapan dari beberapa imperialisme seperti Belanda, AS, Inggris, Portugis dan lain-lain. Mayoritas penduduk pribumi masih menderita dalam penghisapan feodalisme. Dengan demikian kapitalisme dan juga feodalisme adalah musuh yang harus dilenyapkan.

Partai Komunis Indonesia (PKI) lahir pada tanggal 23 Mei 1920. Lahirnya PKI adalah lahirnya suatu partai kelas buruh Indonesia dan perkembangan partai ini adalah perkembangan sejarah kelas buruh Indonesia dalam

¹⁵³ D.N Aidit, 1960, *Revolusi Indonesia Latar Belakang, Sejarah Dan Hari Depan*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 41.

memimpin kaum tani dan massa rakyat lainnya dalam perjuangan perwira melawan imperialisme dan kaki tangannya dalam perjuangan untuk menumbangkan reaksioner dan mendirikan kekuasaan rakyat yang bersendikan persekutuan mayoritas dari rakyat yaitu persekutuan kaum buruh dan tani, hanya kekuasaan rakyat yang demikian ini memungkinkan tercapainya Indonesia sosialis dikemudian hari.¹⁵⁴ Dengan demikian kaum buruh dan tani merupakan mayoritas penduduk Indonesia, merupakan tenaga produktif yang bersifat menentukan dalam menyelesaikan tripogram pemerintah yakni sandang, pangan dan papan. Dengan demikian keduanya adalah soko guru yang utama dari pada revolusi. Dengan demikian kaum tersebut harus berani menghapus semua sumber yang berbau borjuis dan kapitalis untuk mencapai tujuan dari revolusi yakni menuju sosialisme yang disesuaikan dengan kondisi-kondisi yang terdapat di Indonesia, dengan rakyat Indonesia, dengan adat-istiadat, dengan psikologi dan kebudayaan rakyat Indonesia. Dengan demikian revolusi Indonesia bertujuan untuk mendirikan masyarakat sosialis, yang dipandang dapat memberi nuansa baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia.¹⁵⁵

Gerakan komunis di Indonesia mengalami perjalanan panjang yang sering kali diwarnai gelombang pasang surut. Peristiwa yang diawali dengan meletusnya pemberontakan disepanjang tahun 1926-1927 namun berakhir dengan kegagalan telah memberi dampak terhadap melemahnya kekuatan komunis di Indonesia. Penguasa kolonial berhasil menangkap ribuan orang-

¹⁵⁴ D.N Aidit, 1960, *Lahirnya PKI dan perkembangannya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 404.

¹⁵⁵ D.N Aidit, *Revolusi Indonesia Latar Belakang, Sejarah Dan Hari depannya*, op.cit, hal 90.

orang yang diduga terlibat dalam peristiwa itu. Dengan adanya kegagalan ini tidak menyebabkan gerakan komunis di Indonesia begitu saja mati, unjuk kekuatan ditunjukkan kembali pada peristiwa Madiun tahun 1948 dan lagi-lagi gagal. Pemerintah RI berhasil melumpuhkannya, bahkan pemimpinnya yaitu Muso berhasil ditembak mati.

Memasuki tahun 1950-an, merupakan era kebangkitan kembali PKI. Pada tanggal 7 Januari 1951, trio D.N Aidit, M.H Lukman, Nyoto tampil sebagai pimpinan baru PKI. Dengan demikian, PKI mulai dalam politik, gaya dan cara baru. Pada tahun 1951 PKI hanya mempunyai antara 4000 dan 5000 anggota, namun berkat pimpinan Aidit PKI berkembang pesat menjadi partai massa dengan dua juta anggota. Bagaimana PKI dapat menjadi begitu besar? Sebabnya adalah strategi front nasional yang dilancarkan oleh Aidit dan pelaksanaan strategi tadi dalam tiga aspek utama, yakni:

1. Penciptaan suatu partai komunis massa.
2. Perebutan dukungan massa yang jauh melebihi batas-batas partai itu sendiri.
3. Interaksi PKI dengan kekuatan-kekuatan politik utama lain di Indonesia.¹⁵⁶

Front persatuan nasional yang harus dibentuk PKI bukanlah front persatuan yang formil, tetapi front persatuan yang nyata, yang konkrit, yang bersungguh-sungguh. Namun Front persatuan nasional yang harus dibentuk oleh PKI adalah front persatuan yang berfondasikan massa rakyat yang berpuluh-puluh juta jumlahnya. Front ini tidak akan terbentuk begitu saja jika

¹⁵⁶ Yozar Anwar, 1982, *Protes Kaum Muda; Kisah Bubarnya PKI, Jatuhnya Sukarno, Tenggelamnya KAMI*, P.T Variasi Jaya/Kartini Group, Jakarta, hal 116.

kaum komunis tidak jemu-jemunya memperbaiki dan menyempurnakan pekerjaannya dikalangan petani dan juga buruh. Adapun langkah pertama yang dilakukan PKI dikalangan kaum buruh, kaum tani, inteligensia, borjuis kecil dan borjuis nasional adalah membantu mereka dalam perjuangan untuk kebutuhan mereka sehari-hari dan mendapatkan tuntutan bagian mereka.¹⁵⁷

Dengan tampilnya Aidit, telah memberikan corak tersendiri bagi gerakan partai. Dengan agak bandel dia berkata bahwa marxisme bukanlah doktrin yang kaku, melainkan merupakan pedoman untuk melakukan gerakan. Menurut Aidit pula, kaum komunis Indonesia tidak mengikuti secara dogmatis ajaran marxisme, tetapi memandang ajaran itu sebagai suatu pegangan dalam memutuskan keputusan politik secara konkret di Indonesia. Bahkan dia menyatakan bahwa yang penting bagi kaum komunis di Indonesia adalah bagaimana mentransformasi ajaran marxisme kedalam praktik-praktik konkret revolusi Indonesia.

Disinilah Aidit memahami kondisi obyektif masyarakat Indonesia. Pada umumnya orang-orang komunis menganggap Indonesia adalah negara semikolonial atau semifeodal. Hal ini berdasarkan bahwa anasir-anasir imperialis dan feodalis masih tampak dalam bangunan Indonesia. Menurut Aidit, revolusi Agustus 1945 yang melahirkan proklamasi, baru sampai pada tahap penghancuran musuh utama yakni imperialis, sedangkan feodalisme

¹⁵⁷ D.N Aidit, 1960, *Perkuat persatuan nasional dan perkuat partai*, Yayasan Pembaruan, Jakarta, hal 295.



sebagai basis penting imperialisme dengan ditandai adanya tuan tanah, masih bercokol dan belum hancur.¹⁵⁸

Menurut teori PKI pula, rakyat Indonesia terbagi atas empat kelas, yakni kelas tani, buruh, cendekiawan dan borjuis nasional. Kelas-kelas itu jika dipersatukan dalam suatu front persatuan nasional, merupakan kekuatan untuk melawan kapitalisme asing. Kebijakan ini telah ditegaskan sejak tanggal 7 Oktober 1949, dengan dikeluarkannya pernyataan sebagai berikut:

“Jika RIS (Republik Indonesia Serikat) tidak akan menjadi negara semikolonial, maka ia harus mempertahankan/tidak menyerahkan perusahaan-perusahaan asing yang telah dikuasainya sewaktu RI berhasil menduduki dan mengawasinya, sebelum RI dilebur ke dalam RIS. PKI tidak akan bermaksud untuk menghapuskan kapitalis nasional, hanya bermaksud akan mencek pertumbuhannya. Untuk maksud-maksud inilah, maka negara dikontrol oleh rakyat”.¹⁵⁹

Pimpinan baru oleh Aidit ini menjalankan strategi barunya dengan berdasarkan pada pengalaman Cina-komunis dan berdasarkan analisa yang diajukan oleh Muso pada tahun 1948 dari kembalinya Ia dari Sovyet-Rusia yaitu strategi front persatuan yang lebar. Dimana strategi ini berdasarkan aliansi atau perserikatan kerja sama antara 4 kelompok yakni buruh, tani, borjuasi kecil, borjuasi nasional. Sehingga pada bulan April 1951, CC PKI mengeluarkan program PKI yang menerangkan bahwa revolusi Indonesia “ditujukan terhadap imperialisme, feodalisme dan borjuasi komprador”.

Adapun kekuatan-kekuatan pendorong revolusi Indonesia menurut PKI adalah terdiri atas 4 kelompok yang telah disebutkan diatas. Menurut Aidit proletariat Indonesia berjumlah sekitar 500.000 buruh dalam industri modern,

¹⁵⁸ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 38-39.

¹⁵⁹ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 6-7.

dan lebih dari 2 juta pekerja dalam industri kecil dan kerajinan di kota-kota dan sejumlah besar pekerja di perkebunan, di kehutanan dan lain-lain. Jumlah mereka menduduki 25 persen dari penduduk Indonesia. sedangkan kaum tani dikelompokkan dalam empat kategori yaitu tani kaya, tani menengah, tani miskin dan buruh tani.

Pada tahun 1957 juga, Aidit menjelaskan yang dimaksud dengan kaum borjuasi kecil adalah terdiri dari dua kelompok yakni borjuasi komprador dan borjuasi nasional. borjuis komprador ini bersikap pro barat atau tidak tegas anti barat dan anti komunis. Sedangkan borjuasi nasional ialah mereka yang tegas anti barat dan tidak habis-habisan anti komunis. Dengan demikian kelas buruh, tani, borjuasi kecil dan borjuasi nasional mesti bersatu dalam suatu front persatuan nasional. Landasannya adalah persekutuan antara buruh dengan tani, kelas buruh harus memimpin persatuan nasional. hanya strategi inilah yang mampu mewujudkan pemerintah demokrasi rakyat di Indonesia.

160

Sesuai dengan garis perjuangan itu, Aidit memulai ofensifnya untuk menguasai buruh tani, yang dianggap sebagai kekuatan pokok front persatuan nasional. buruh tani dinilai sebagai golongan yang paling tertindas dibandingkan dengan golongan yang lainnya. Dengan demikian PKI harus mendapat dukungan dari massa tani sebanyak mungkin dengan cara mobilisasi dan mengorganisasi buruh dan tani supaya mereka menjadi kekuatan pendukungnya.

¹⁶⁰ Yozar Anwar, *op.cit*, hal 119-120.

Dalam rangka mendapatkan dukungan dari massa tani, Aidit mengajukan tuntutan “kenaikan upah” dan “perubahan guna tanah”. Untuk itu kader-kader PKI disebar dengan tugas melakukan peninjauan ke desa-desa. dan untuk menarik simpatik petani, sejak bulan November 1951 Aidit pun mengajukan tuntutan kepada pemerintah agar diadakan perubahan tata guna tanah bagi kaum tani dengan menghapuskan sistem tuan tanah dan membagikan tanah dengan cuma-cuma kepada petani.¹⁶¹

Dengan demikian PKI sangat lihai memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Disini terlihat jelas sekali bahwa PKI memanfaatkan kondisi ekonomi yang buruk. Apalagi di Indonesia pada waktu itu terjadi krisis ekonomi yang berkepanjangan dan telah menyebabkan kesengsaraan rakyat, terutama yang lebih dirasakan oleh kaum buruh tani yang berada di pedesaan. Dengan kondisi yang demikian mendukung itu, PKI mulai membujuk kaum buruh tani untuk menjadi kader PKI dengan mengiming-imingi kehidupan yang lebih baik di bawah kekuasaan PKI. Dalam usahanya itu tentu saja PKI telah mempengaruhi ide-ide komunisnya. Para kaum buruh tani yang hidupnya menderita lebih gampang dipengaruhi oleh ide-ide komunis karena dalam keadaan miskin dan menderita masyarakat akan cenderung lebih revolusioner.¹⁶²

Selanjutnya D.N Aidit juga berpendapat bahwa desa adalah sumber bahan makanan, sumber prajurit revolusioner, sebagai tempat menyembunyikan diri

¹⁶¹ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 11.

¹⁶² Todiruan Dydo, 1989, *Pergolakan Politik Tentara*, P.T Golden Terayon Press, Jakarta, hal 127.

jika terpukul diperkotaan dan sebagai basis untuk merebut kembali perkotaan.

Dalam membangun PKI ini, Aidit ini pun mengatakan bahwa:

“Kalau kita mau menang dalam revolusi, kalau kita mau mengubah wajah masyarakat yang setengah jajahan menjadi Indonesia yang merdeka penuh, kalau kita mau ambil bagian dalam mengubah wajah dunia, maka kita harus mempunyai partai model Partai Komunis Uni Sovyet dan model Partai Komunis Cina”.¹⁶³

Strategi yang diterapkan oleh Aidit ini tampaknya sangat kontradiksi dengan peran-peran PI dibawah kendalinya. boleh jadi Ia menjalankan dua cara sekaligus. Di suprastruktur memainkan peran yang resmi tetapi di infrastruktur menjalankan program-program provokatif, sebab dalam kenyataannya PKI menjadi penggerak dalam aksi-aksi pemogokkan dan kekerasan yang endemik sepanjang tahun 1950-1951. Pelaku pemogokkan itu umumnya SOBSI, BTI yang pada gilirannya berakibat buruk pada kondisi ekonomi yang semakin fluktuatif. Sebagai contohnya adalah buruh-buruh melakukan aksi pemogokkan di sarana-sarana vital seperti pabrik dan perkebunan-perkebunan. Pemogokkan di pelabuhan semakin meningkat dengan meletusnya perang Korea pada Juni 1950. pemogokkan itu dilakukan oleh SOBSI yang merupakan usaha pemboikotan kelompok komunis sebagai suatu sikap memberikan dukungan pada Korea Utara, tetapi dampaknya barang-barang tidak dapat diekspor ke luar negeri. Pada mulanya aksi pemogokkan itu dirasakan sebagai respon untuk menandingi kekuatan asing, namun pada

¹⁶³ Moerdiono, *op.cit*, hal 25.

akhirnya menjadi ancaman bagi kepentingan nasional, yaitu semakin merosotnya perekonomian negara.¹⁶⁴

Pada awal tahun 1951 juga, PKI melalui SOBSI melakukan tekanan-terkanan terhadap pemerintah. dengan aksi-aksi mogok di perusahaan-perusahaan perkebunan milik Belanda, pabrik-pabrik gula, perusahaan-perusahaan minyak dan angkutan kereta api serta perhubungan udara (*Garuda Indonesia Airways*). Aksi-aksi itu berdalih klasik, menuntut perbaikan nasib buruh, kenaikan upah kerja yang menurut mereka tidak sesuai lagi dengan kondisi kerja. Di perkebunan-perkebunan Sumatera Timur, massa buruh yang berjumlah 260.000 orang yang tergabung dalam SARBUPRI serentak melakukan aksi mogok. Aksi-aksi ini mempunyai dampak besar terhadap perekonomian negara, karena pemerintah sangat bergantung pada devisa dari sektor perkebunan.¹⁶⁵

Aksi-aksi itu tentu saja tidak hanya menyebabkan fluktuasinya perekonomian negara, tetapi juga mengganggu keamanan negara. Pemerintah Sukiman melancarkan sebuah razia yang dimulai pada tanggal 15 Agustus 1951 yang kemudian dikenal dengan peristiwa *Razia Agustus*. Razia pertama itu dilakukan di Jakarta, dalam aksi itu berhasil menahan 16 anggota parlemen yang umumnya wakil PKI, 6 orang pegawai tinggi kementerian perburuhan yang berhaluan komunis. Selang tiga hari kemudian meluas ke seluruh pulau Jawa. Dampaknya sejak dilancarkannya Razia Agustus, pemerintah telah

¹⁶⁴ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 31.

¹⁶⁵ Markas besar ABRI, *op.cit*, hal 13.

menahan 2000 orang. Mereka terdiri-dari anggota PKI, SOBSI, BTI dan orang-orang Cina pro-Peking.¹⁶⁶

Razia Agustus itu telah memberikan dampak yang besar bagi PKI, dimana partai itu semakin terpojok dalam situasi yang sangat sulit. bila situasi itu tak mendapat reaksi, bisa dipastikan semakin memojokkan PKI. Karena itu PKI tidak tinggal diam, mereka berusaha membela diri bahkan sekuat tenaga mempengaruhi opini publik. Setelah pemerintahan kabinet Sukiman berhasil jatuh, PKI mulai menata kembali partainya yang telah mengalami kehancuran total. Dalam waktu singkat PKI kembali menunjukkan aksinya sebagai organisasi yang tangguh.

PKI kini mulai menjelma sebagai partai massa dibawah pimpinan Aidit dan juga merupakan partai yang paling kaya, hal ini dapat dilihat pada pemilu tahun 1955 dimana PKI telah mengeluarkan uang sebanyak 200 juta untuk kampanyenya. Merupakan sebuah pertanyaan bagi kita kira-kira dari manakah PKI mendapatkan uang begitu banyak?

PKI tidak dapat menggali sumber-sumber pemerintah yang langsung ataupun tidak langsung untuk penghasilannya seperti yang dilakukan oleh partai-partai besar lain. Sumber-sumber penghasilan PKI dan organisasi massanya terbagi atas 5 golongan yakni: iuran anggota partai, iuran organisasi-organisasi massanya, donasi, kampanye khusus untuk mencari dana, gaji anggota partai yang duduk dalam badan-badan pemerintah.

¹⁶⁶ Subhan, Sd, *op.cit* hal 32.

Mengingat kebanyakan anggota PKI adalah miskin, dan pengeluaran keperluan partai demikian besarnya, maka adalah tepat menyatakan bahwa PKI tergantung dari sumbangan dari orang dan kelompok non-partai dan dari kontribusi yang sifatnya tidak mengikat. Adapun para donator PKI itu terdiri dari:

1. Bantuan terbatas diberikan oleh Sovyet Rusia, RRC dan lain-lain negara blok komunis melalui buku-buku mereka yang dijual ditoko-toko buku kepunyaan komunis. buku-buku itu dijual dengan harga yang telah diperhitungkan selisih keuntungannya yang masuk kas PKI.
2. Sumber utama kontribusi non partai tampaknya adalah 3 juta orang Cina yang berdiam di Indonesia. Pengusaha dan pedagang Cina jauh lebih kaya dari pedagang Indonesia.
3. Sumber lainnya menyebutkan bahwa dana-dana itu juga diperoleh dari kedutaan-kedutaan komunis di Jakarta, lalu dari kedutaan besar RRC. Dan ada juga sumber lain yang menyebutkan bahwa sekitar tahun 1960 seorang agen intourist Rusia ditangkap atas tuduhan menyelundupkan beberapa juta rupiah ke Indonesia untuk tujuan-tujuan yang tidak diketahui.¹⁶⁷

Pada awal kemerdekaan keadaan di Indonesia dilanda inflansi yang cukup tinggi. Merosotnya ekonomi tersebut antara lain sebagai akibat dari pemerintah Republik Indonesia yang belum dapat mengatasi peredaran mata uang Jepang dalam jumlah yang sangat besar. Keadaan bertambah sulit ketika pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan uang kertas baru. Sumber

¹⁶⁷ Yozar Anwar, *op.cit*, hal 121-123.

inflansinya adalah beredarnya mata uang Jepang yang tidak terkendali. Adanya kekacauan yang tidak stabil dan kekacauan dalam bidang perekonomian mengakibatkan terjadinya transaksi barter, barang ditukar dengan barang lain yang senilai harganya. Di kota-kota kaum buruh menuntut tambahan beras disamping upah yang berupa uang. Hal yang sama terjadi pada pedagang keliling yang menuntut barang dagangannya ditukar dengan beras atau bahan pakaian. Di desa-desa orang bekerja juga tidak suka menerima upah hanya dengan uang saja, tetapi mereka meminta tambahan dalam bentuk bahan makanan. Situasi seperti ini menyebabkan matinya perekonomian di Republik Indonesia.

Perkembangan inflansi selama masa 1954-1958 mencapai kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pada tanggal 1 September 1955 pemerintah kemudian melaksanakan penyederhanaan dan liberalisasi peraturan impor dalam rangka tindakan moneter, yang dikenal dengan *Sumitro reform* dan keadaan pun menjadi lebih baik.¹⁶⁸

Selanjutnya perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin pada kurun waktu 1960-1965 perkembangan perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh manifesto politik yang diumumkan oleh Presiden Sukarno dengan keputusan Presiden no 1/1960 tanggal 29 Januari 1960. Selama waktu itu perkembangan perekonomian Indonesia diarahkan oleh doktrin ekonomi terpimpin. Puncak perkembangan perekonomian pada periode ini adalah tingkat inflansi yang mencapai 650% pada tahun 1965. Tingkat inflansi yang

¹⁶⁸Soemitro Djojohadikusumo, 1951, *Pandangan Tjara-Tjara Menghadapi Kesukaran Ekonomi di Indonesia*, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, hal 203.

semakin meningkat ini semakin berakibat luas karena menyangkut naiknya harga pangan, terutama beras dan garam yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu impor juga semakin meningkat yang mengakibatkan berkurangnya cadangan devisa untuk pembangunan.¹⁶⁹

Sejak berdirinya republik ini, kehidupan politik Indonesia bergejolak dan tidak stabil. Situasi mulai berubah ketika perekonomian memburuk pada dekade 1950-an. Pada awal pertengahan tahun 1960-an, sosialis komunis memperoleh kendali yang cukup besar atas pemerintahan dan memaksakan pengaruh yang makin besar terhadap Sukarno. Sebagai akibat, dilaksanakan kebijakan ekonomi yang mengarah pada kemerosotan ekonomi dan melumpuhkan perekonomian.¹⁷⁰

Pemerintah mencoba berupaya menciptakan kebijaksanaan ekonomi lainnya untuk mengatasi keadaan ekonomi pada saat itu. Defisit anggaran tampaknya semakin sulit dicegah. Berbagai pengeluaran tidak bisa terelakkan, karena berbagai sebab. Sebab pertama adalah keperluan untuk mendorong perkembangan ekonomi, terutama untuk menumbuhkan perdagangan di kalangan pribumi, mengembangkan perusahaan-perusahaan negara. Sebab kedua adalah untuk membiayai operasi-operasi militer dan politik guna mengatasi pergolakan daerah. Biaya terbesar digunakan untuk operasi keamanan, terutama untuk mengatasi pemberontakan PRRI/Permesta dan perebutan Irian Barat. Hal yang perlu dicatat sehubungan dengan

¹⁶⁹ P.C Suroso, 1994, *Buku Panduan Mahasiswa*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal 93.

¹⁷⁰ Radius Prawiro, 1998, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Gramedia, Jakarta, hal 5.

kebijaksanaan ekonomi adalah obsesi pemerintah untuk mewujudkan sistem ekonomi sosialis Indonesia dan tindakan nasionalisasi.

Maka pemerintahan melalui Ir. Juanda dan sekelompok teknokrat dengan cepat berusaha memperbaiki kebijaksanaan ekonomi. Pada tanggal 2 Mei 1963, Ir. Juanda mengumumkan suatu program stabilisasi ekonomi yang akan dilaksanakan melalui 4 kali peraturan. Peraturan-peraturan itu dimaksudkan untuk sedikit meliberalkan tatanan ekonomi terutama untuk membendung laju inflansi. Program kebijaksanaan itu kemudian dikenal dengan "peraturan 26 Mei". Bagi PKI, peraturan 26 Mei yang diilhami oleh barat itu kemudian dimaterikan sebagai "penyelewengan 26 Mei" terhadap revolusi Indonesia. Sedangkan di sisi lain, pemerintah tidak segera mengalah kepada kelompok oposisi (PKI) kecuali dalam politik luar negeri, yang semakin militan dan radikal sejak September 1963, yang mengakibatkan ditinggalkannya kebijaksanaan stabilisasi ekonomi itu.

Periode Maret dan September 1963 merupakan periode yang sangat penting dalam pembangunan politik dan ekonomi. Pada bulan Maret 1963, Presiden Sukarno dalam amanat kepresidenannya mencanangkan suatu kebijaksanaan ekonomi, yang dikenal dengan Deklarasi Ekonomi (Dekon). Dekon sesungguhnya untuk menguraikan metode yang hendak digunakan untuk merencanakan Rencana Delapan Tahun.¹⁷¹

¹⁷¹Yahya. A. Muhaimin, 1980, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*, LP3ES, Jakarta, hal 60.

B. Pengaruh PKI Terhadap Situasi Politik

Di Indonesia sudah mulai terbentuk organisasi-organisasi sosial politik sejak awal abad XX, meskipun pada saat itu Belanda masih berkuasa di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kelahiran sebuah organisasi sosial yang diberi nama Budi Utomo pada bulan Mei 1908 di Batavia.¹⁷² Pada awalnya organisasi Budi Utomo merupakan sebuah organisasi sosial dengan lingkup keanggotaan yang terbatas pada golongan elit Jawa.¹⁷³ Tetapi dengan kelahiran Budi Utomo ini telah banyak mengilhami kelahiran organisasi sosial politik dikemudian hari. Seperti misalnya organisasi Sarikat Islam (SI) yang didirikan pada tahun 1912 oleh Haji Samanhudi.

Setelah kelahiran Budi Utomo dan Sarekat Islam, kemudian muncullah organisasi yang lebih baik yang bercorak sosial atau politik yang berdiri sekitar tahun 1920-an. Organisasi itu diantaranya adalah Indische Partij (IP), Perhimpunan Indonesia (PI), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Disamping itu juga ada beberapa organisasi yang mendasarkan ideologi pada sosialis dan beberapa organisasi buruh dan sarekat kerja. Organisasi-organisasi itu pada mulanya banyak yang mempunyai tujuan yang sama yaitu menginginkan Indonesia merdeka atau paling tidak Indonesia diberi otonomi sendiri.

Pertumbuhan partai politik di Indonesia mulai bertambah pesat setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sementara itu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)

¹⁷² Robert Van Niel, 1989, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal 74.

¹⁷³ G. Moedjanto, *op.cit*, hal 28.

sedang berusaha memperluas kegiatan-kegiatannya didaerah-daerah. Kegiatan-kegiatan itu dimaksudkan untuk melihat sejauh mana kesatuan yang ada dalam masyarakat. Setelah BPKNIP berhasil membentuk cabang-cabang didaerah, BPKNIP diubah sifatnya menjadi Badan Perwakilan Rakyat dengan maklumat presiden no X. Komite Nasional Pusat itu kemudian disertai tugas kekuasaan legislatif dan ikut menentukan Garis-Garis Besar Haluan negara (GBHN).¹⁷⁴ Berdasarkan usulan Badan Perwakilan Rakyat, kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran mendirikan partai politik. Dan adanya maklumat pemerintah itu maka secara resmi lahirlah partai-partai politik di Indonesia.

Partai yang pertama terbentuk adalah Partai Sosialis yang merupakan peleburan antara golongan sosialis Amir Syarifuddin dan golongan sosialis Syahrir. Kedua partai itu dahulu bernama Partai Rakyat Sosialis dan Partai Sosialis Indonesia.¹⁷⁵ Partai politik yang lain misalnya adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang didirikan pada 7 November 1945 dan PKI yang berdiri pada tanggal 21 Oktober 1945, yang dipimpin oleh Moh. Yusuf dan PKI pada masa ini tidak memiliki hubungan dengan PKI 1926 atau PKI-Muso 1935 yang ilegal.¹⁷⁶ PKI merupakan partai politik yang telah terbentuk sejak pra kemerdekaan. Didalam anggaran dasar pasal 2 yang memuat asas dan tujuan dinyatakan bahwa partai ini berdasarkan marxisme-leninisme dengan tujuan terbentuknya masyarakat sosialis di Indonesia yaitu susunan

¹⁷⁴ Wilopo, *op.cit*, hal 9.

¹⁷⁵ Ali Sostroamijoyo, 1974, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Kinta, Jakarta, hal 187.

¹⁷⁶ G. Moedjanto, *op.cit*, hal 126.

masyarakat Indonesia dimana semua alat-alat produksi dimiliki dan dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.¹⁷⁷

Partai politik yang ada di Indonesia secara ideologi dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, masing-masing adalah nasionalisme, agama dan sosialisme. Adapun pengelompokan ini telah dimulai dari sebelum Indonesia merdeka dan ideologi itu masih digunakan partai-partai politik sampai Indonesia merdeka, secara tidak langsung sampai sekitar tahun 1965 yaitu setelah paham komunis dilarang di Indonesia.

Dengan kembalinya RIS menjadi negara kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950, selanjutnya Indonesia menganut sistem pemerintahan demokrasi parlementer.¹⁷⁸ Dalam sistem demokrasi parlementer kedaulatan rakyat disalurkan melalui partai politik. Partai-partai politik inilah yang memerintah berdasarkan perbandingan dalam parlemen.¹⁷⁹ Presiden hanya merupakan kepala negara, tidak mengepalai dan karena itu tidak bertanggung jawab atas pemerintahan. Tanggung jawab pemerintahan ada pada kabinet. Presiden tidak bisa/tidak boleh bertindak menyimpang dari kebijaksanaan kabinet. Bila terjadi krisis kabinet, Presiden berwenang menunjuk seorang atau lebih formatur atau pembentuk kabinet. Formatur tidak selalu harus menjadi Menteri/Perdana Menteri.¹⁸⁰

Peranan partai politik di lembaga kabinet selama periode demokrasi parlementer dimulai sejak berdirinya UUDS 1950, yakni diawali dengan

¹⁷⁷ M. Rusli Karim, *op.cit*, hal 94.

¹⁷⁸ Jahja A. Muhaimin, *op.cit*, hal 66.

¹⁷⁹ Sartono Kartodirdjo, 1975, *Sejarah Nasional Indonesia Merdeka 1950-1964*, hal 250.

¹⁸⁰ G. Moedjanto, *op.cit*, hal 77.

terbentuknya masa kabinet Natsir dari Masyumi sampai berakhirnya masa kabinet Ali Sostroamijoyo II.¹⁸¹

Dalam periode demokrasi parlementer ini merupakan jaman keemasan kehidupan partai-partai politik di Indonesia. Suatu masa dimana dalam sejarah perjalanan partai politik yang penuh dengan kegairahan dan dinamika. Boleh dikata hampir dalam struktur kenegaraan diperebutkan oleh dan untuk orang partai. Parlemen dikendalikan oleh "orang-orang partai". Karena menganut sistem pemerintahan parlementer, kursi-kursi di pemerintahan diperebutkan oleh partai-partai politik yang lebih menghasilkan rumusan konstruktif demi kepentingan nasional. Sedangkan peranan Presiden lebih banyak sebagai pengendali pemerintah diatas pertentangan antar partai.¹⁸² Suasana sistem demokrasi parlementer ini telah merangsang pertentangan ideologi dan politik yang tajam yang pada gilirannya membawa bangsa dan negara RI kedalam kancah kemelut politik yang mengancam keberlangsungan hidup.¹⁸³

Dengan demikian dalam alam demokrasi parlementer ini peranan partai politik sungguh sangat dominan. Masing-masing saling bersaing untuk mencapai tujuannya. Bahkan beberapa partai politik yang revolusioner cenderung menentang sistem yang berlaku untuk menggantikan dengan sistem yang lain. Sejalan dalam peranan partai politik yang makin meningkat, persaingan antar partai politik pun semakin tajam. Persaingan makin bertambah besar dengan adanya perbedaan ideologi diantara partai-partai politik di Indonesia.

¹⁸¹ M. Rusli Karim, *op.cit*, hal 130.

¹⁸² Todirun Dyda, *op.cit*, hal 40.

¹⁸³ Alfian, 1993, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, P.T Gramedia, Jakarta, hal 32.

Perkembangan suatu partai politik yang ada, tidak dapat dipisahkan dari peranan para pemimpin partai. Para pemimpin partai ini pada dasarnya memanfaatkan kedudukannya untuk mengembangkan partai. Dengan demikian peranan pemimpin partai sangatlah menentukan.

Untuk lebih mengetahui peranan pemimpin partai dalam kepartaian di Indonesia, maka hal penting yang harus dipahami adalah konsep tentang kekuasaan Jawa. Dalam konsep kekuasaan Jawa secara tradisional pemegang kekuasaan dan gejala kekuasaan dipandang sebagai kesatuan yang nyata. Kegiatan politik dianggap berpusat pada si pemegang kekuasaan dan struktur politik tergantung dalam bentuk jaringan-jaringan yang saling bersaing untuk memperoleh perlindungan pribadi dari pemegang kekuasaan ini.¹⁸⁴ Berdasarkan hal tersebut diatas jelas bahwa pemegang kekuasaan merupakan titik sentral disuatu bentuk pemerintahan.

Para pemimpin partai berusaha membentuk cabang-cabang partai diseluruh wilayah Indonesia beserta organisasi massa yang merupakan jaringan-jaringan untuk memperbesar dukungan dari massa. Seperti halnya cara tersebut dipergunakan oleh tokoh penting PKI yakni D.N Aidit dalam keberhasilannya menggalang pendukung-pendukungnya sehingga dapat menempatkan jumlah anggota yang begitu besar. Dalam usahanya itu tak heran PKI menghentikan aksi-aksi kekerasannya karena fokus kegiatannya adalah merangkul, membujuk organisasi massa untuk beralih pada PKI. Perubahan strategi ini disadari Aidit bahwa perjuangan PKI melalui

¹⁸⁴ Benedict. ROC. Anderson, 1984, *Gagasan Tentang Kekuasaan Dalam Kebudayaan Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta, hal 70.

pemeberontakan bersenjata tidak mungkin membawa kemenangan bagi PKI. Untuk itu Ia pun kemudian menjalin kerja sama dengan golongan-golongan non komunis. Garis perjuangan politiknya ini sejalan dengan yang dilakukan Mao TSe Tung, yaitu kaum tani sebagai soko guru revolusi, garis massa, front persatuan nasional.

Sejalan dengan program baru itu, Aidit melaksanakan kerja sama dengan golongan non komunis dan mencoba bersikap baik terhadap golongan agama. PKI mulai menjalin hubungan dengan partai-partai politik besar seperti PNI, Masyumi dan NU.

1. Pengaruh Perkembangan PKI terhadap PNI (Partai Nasional Indonesia)

Sejak awal abad ke-20 di Indonesia telah muncul berbagai organisasi pergerakan. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan ini tidak terlepas dari kebijaksanaan pemerintah Belanda. Kebijakan ini adalah dengan dilaksanakannya politik etika. Dengan politik etika ini di Indonesia antara lain muncul elit baru, yakni elit intelektual. Dari elit inilah organisasi pergerakan dikembangkan. Mereka mulai menggerakkan rakyat untuk memiliki kesadaran akan kedudukannya dinegerinya sendiri.

Latar berdirinya PNI ini tak terlepas dari pengaruh Perhimpunan Indonesia (PI)Pergerakan ini didirikan di Bandung, pada tanggal 4 Juli 1927 oleh sejumlah pejuang kemerdekaan seperti Sukarno, Cipto Mangunkusumo, Iskak Cokroadisuryo, Sartono, dan lain-lain.

Pemikiran Sukarno tentang partai politik yang seharusnya dikembangkan di Indonesia tidak terlepas dari pemahamannya tentang

situasi politik di Indonesia dan pengaruh dari ide-ide barat yang diterimanya¹⁸⁵. Dengan perkenalannya inilah Sukarno mendirikan *Algemene Studie Club*. Bersama dengan kelompoknya ini Sukarno kemudian mempromosikan tujuan Indonesia merdeka dan menolak pandangan bahwa kemerdekaan itu dapat dicapai melalui kerja sama dengan Belanda.¹⁸⁶ Didalam kelompok studi inilah konsepsi nasionalisme lebih diperjelas sebagai gagasan yang mempersatukan tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

Sementara itu perpecahan dalam SI dan ketidakberhasilan pemberontakan PKI, membuka kesempatan bagi Sukarno untuk merealisasikan idenya tentang pembentukan partai baru bersama-sama dengan Iskaq Cokroadisuryo, Cipto Mangunkusumo, Budiarto dan Sunarjo. Pada bulan April 1927 diadakan rapat untuk membentuk panitia persiapan pembentukan organisasi nasionalis.¹⁸⁷ Akhirnya dalam pertemuan lanjutan pada tanggal 4 Juli diputuskan untuk membentuk partai politik baru dengan nama perserikatan nasional Indonesia. Partai ini berdasarkan marhaenisme dengan tujuan mencapai Indonesia merdeka dan sikapnya terhadap pemerintahan Belanda adalah non koperasi.

Namun demikian tujuan partai ini masih diperdebatkan karena terlalu radikal ada pandangan bahwa rakyat belum siap diajak mewujudkan tujuan organisasi. Dan Sukarno berpendapat bahwa rakyat telah siap melakukannya, sebab rakyat telah bosan dengan keadaannya sebagai

¹⁸⁵ J.D Legge, 1984, *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, hal 476.

¹⁸⁶ *Ibid*, hal 97.

¹⁸⁷ *Ibid*, hal 110.

bangsa terjajah. Maka partai ini harus sebagai pemimpin rakyat dan harus bersikap radikal, keyakinan ini dijelaskan:

“Partailah jang memegang obor, partailah jang berdjalan dimuka partailah jang menjulahi djalan yang gelap dan penuh dengan randjau-randjau itu sehingga mendjadi djalan jnag terang. Partailah jang memimpin massa itu didalam perjoangannya merebahlah musuh, partailah jang memegang komando dari barisan massa, memberi kesadaran, memberi keradikalan”¹⁸⁸

Dengan demikian pergerakan PNI ini dapat berkembang dengan cepat, karena:

- a. Pergerakan yang ada mlemperm (lemah) sehingga kurang bisa menggerakkan massa
- b. PKI sebagai partai massa telah dilarang
- c. PNI bersifat radikal-revolusioner dan massal, meskipun pemimpin-pemimpinnya kebanyakan berasal dari kalangan intelektual
- d. Propagandanya menarik dan mempunyai propagandis ulung, antara lain yang terkemuka adalah bung Karno yang merupakan seorang pemimpin yang karismatik yang memancar terutama melalui pidato-pidatonya.¹⁸⁹

Di Indonesia ada beberapa partai politik yang mendasarkan pada nasionalisme salah satunya adalah PNI. PNI dalam melaksanakan program partai memiliki empat macam bidang usaha yaitu politik, ekonomi, sosial dan militer. Dengan program-program seperti diatas sejak awal kelahirannya telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, tetapi pada tahun 1948, PNI mengalami kegoncangan karena terjadi pertentangan

¹⁸⁸ Sukarno, 1951, *Indonesia Menggugat*, S.K. Seno, Djakarta, hal 282.

¹⁸⁹ G. Moedjanto, *op.cit*, hal 49.

orientasi antara tindakan sayap tengah dan sayap kiri. Pertentangan semakin memuncak setelah kongres tahunan PNI yang ke tiga bulan November 1948. Saat itu sekelompok pimpinan PNI menolak usaha-usaha pemimpin PNI untuk mencari dukungan dari beberapa bekas anggota FDR dengan alasan orientasi PNI terlalu ke kiri.¹⁹⁰

Pertumbuhan PNI semakin baik karena adanya pengaruh dari Sukarno yang dahulu merupakan salah satu pendiri dari pemimpin PNI. Setelah Indonesia merdeka Sukarno tak lagi duduk sebagai pemimpin PNI. Puncak dari perkembangan PNI telah menempatkan PNI sebagai partai politik yang terbesar diantara beberapa partai dengan dasar nasionalisme serta tercatat dengan jumlah anggota yang tidak kurang dari empat juta orang.¹⁹¹

Adapun yang menjadi asas dan tujuan PNI ini adalah tercantum pada pasal 2 yaitu ingin menegakkan dan menyempurnakan kedaulatan negara kesatuan RI serta mewujudkan susunan negara yang mendasarkan kedaulatan rakyat dan masyarakat yang berdasarkan keadilan sosial (masyarakat marhaenis) dengan dasar sosio nasionalisme.¹⁹²

Ide marxisme oleh Sukarno diterapkan di Indonesia dengan nama marhaenisme. Namun Sukarno menyangkal bahwa marhaenisme sama dengan marxisme. Hal ini didasarkan bahwa pengertian marhaenisme adalah perjuangan yang dilakukan bukan oleh kaum proletar (buruh) saja,

¹⁹⁰ George. M.Tuman Kahin, 1970, *Nasionalisme and Revolution in Indonesia*, Ithaca New York Cornell University Press, 393-394.

¹⁹¹ Kementrian Penerangan RI, 1954, *Kepartaian dan Parleментарia Indonesia*, Jakarta, hal 26

¹⁹² *Ibid*, hal 29-42.

tetapi kaum tani dan kaum melarat lainnya di Indonesia seperti pedagang kecil, nelayan, tukang dan lain-lain. Sedangkan marxisme dalam perjuangannya diadakan kaum buruh didalam suatu industri modern dan telah mengenal ideologi modern.¹⁹³

Setelah kegagalan demi kegagalan dialami oleh PKI dan banyaknya citra buruk yang didapat PKI maka adalah suatu pekerjaan yang memerlukan waktu untuk merehabilitasinya. Melihat kondisi ini, Aidit menyadari bahwa PKI ternyata masih lemah dan untuk itu perlu menciptakan strategi baru, salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan partai-partai politik lainnya yaitu diantaranya PNI.

Masa demokrasi parlementer memberikan peluang bagi PKI untuk melenggang di pentas politik nasional. Selama era demokrasi parlementer fenomena khas dalam politik Indonesia adalah jatuh bangunnya atau silih bergantinya partai politik menguasai kabinet. Mereka saling berebut untuk menduduki kursi pemerintahan. Sehubungan dengan realita itu, tampak adanya dua partai besar yang saling bersaing untuk menguasai elit pemerintahan, yakni Masyumi dan PNI. Persaingan itu makin lama semakin menjurus menjadi konflik yang demikian terbuka, karena terutama perbedaan yang bersifat ideologis.

Sebagai mana lazimnya dalam dunia politik, perbedaan itu justru menimbulkan kecurigaan di pihak masing-masing. Faktor itulah yang pada akhirnya membuat PNI berusaha mencari kekuatan lain. Pada tahun 1952

¹⁹³ Sukarno, 1964, *Dibawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi, Jakarta, hal 256.

PNI semakin didekati PKI. Dekatnya kedua partai ini disebabkan adanya persamaan visi, dalam hal ini menyangkut masalah modal asing, kolonialisme dan masalah Irian Barat. Perpecahan dalam tubuh Masyumi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap PNI. Posisi PNI sangat diuntungkan dengan situasi itu yang kemudian muncul sebagai partai yang besar.

Kehidupan politik yang demikian tentu saja tidak bisa menumbuhkan situasi kondusif bagi terjalinnya aliansi yang baik antar partai dalam mencapai konsensus nasional. Setiap partai memajukan ideologinya masing-masing sehingga sulit untuk mencari titik temu. Identitas nasional merupakan obsesi yang harus dicapai setelah proklamasi kemerdekaan. Berbagai ideologi berlomba untuk mencapai hal tersebut yang manifestasinya tampak dalam perjuangan partai-partai politik yang terdiri atas lima aliran pemikiran yaitu nasionalisme radikal, tradisionalisme Jawa, Islam, sosialisme demokratis dan komunisme.

Aliran-aliran pemikiran politik atau ideologi tersebut tampak terkait satu dengan yang lain. Persaingan yang sangat menonjol terjadi antara ideologi Islam yang diwujudkan oleh Masyumi dengan nasionalisme yang dipelopori PNI. Akibat gencarnya persaingan itu, keduanya tak segan-segan memanfaatkan sarana-sarana resmi pemerintah. Kelompok Islam menggunakan departemen agama untuk melancarkan syiar-syiar Islam kepada masyarakat luas, sedangkan kelompok nasionalis memanfaatkan departemen penerangan, pertanian, kesehatan, dan departemen dalam

negeri untuk kepentingan cita-citanya.¹⁹⁴ Akibat adanya pergulatan itu, PKI yang sama sekali tidak mendapat perhatian, mulai merayap dan muncul dari puing-puing reruntuhan selepas pemberontakan Madiun 1948 mulai bangkit menemukan ruang gerak politiknya.

Disisi lain hubungan PKI dengan golongan Islam dalam keadaan patah arang. PKI tidak melihat kemungkinan terjalinnya hubungan dengan golongan Islam karena sejak lama golongan Islam ini selalu memusuhi PKI. Kebencian golongan Islam ini diperlihatkan saat dilancarkannya gerakan Razia Agustus oleh kabinet Sukiman yang merupakan wakil dari Masyumi. Dengan situasi itu PKI lebih memilih bekerja sama dengan PNI.

Dalam rangka menjalin kerja sama dengan PNI ini Aidit kemudian menugasi Alimin untuk mendekati ketua PNI saat itu dijabat oleh Sidik Djojokusarto dan dengan senang hati menerima tawaran kerja sama itu. Kerja sama dengan PKI ini diakuinya karena saat ini ia sedang berusaha mendapat dukungan dari berbagai pihak agar pada kesempatan pembentukan kabinet berikutnya PNI tidak perlu lagi bekerja sama dengan Masyumi. Ia pun berkeyakinan bahwa dengan adanya kerja sama dengan PKI ini sangatlah menguntungkan terutama dalam menghadapi masa-masa kampanye pemilihan umum dan dengan adanya kerja sama ini PNI dapat membentuk kabinet seperti yang dikehendakinya.¹⁹⁵

Jalanan kerja sama dengan PNI ini ada karena adanya hubungan yang baik antara Sukarno dan PKI. PKI memilih bekerja sama dengan PNI

¹⁹⁴ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 16-20.

¹⁹⁵ Mabes ABRI, 1991, *Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia*, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta, hal 43.

karena PNI merupakan sebuah partai yang besar dan kerja sama ini ternyata sudah terjalin sejak kabinet Wilopo dan semakin akrab pada masa kabinet Ali I sebab dalam kabinet Ali I banyak berintikan anggota-anggota PNI dan NU yang tak mungkin bertahan tanpa dukungan PKI. Usaha aliansi ini bertujuan untuk melenyapkan citra buruk PKI dan juga usahanya dalam meraih suara pemilu tahun 1955.

Tujuan PKI menyatakan memberikan sokongan dan kesempatan bekerja pada kabinet Wilopo yang mana sandaran utama adalah menteri-mentri dari PNI ini adalah *pertama*, mendapatkan “teman” dari kalangan borjuasi nasional, terutama dari sayap kiri PNI. *Kedua*, ruang gerak untuk mengembangkan sayapnya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa tujuan-tujuan PKI itu banyak yang terlaksana.

Hasil-hasil nyata menunjukkan bahwa kerja sama antara PKI dan borjuasi nasional yang dalam hal ini diwakili Sukarno, makin rapat. Tidak kebetulan suatu saat Alimin pernah menyatakan bahwa “*PKI adalah sama dengan PNI plus iets*”, karena memang Alimin tidak setuju terhadap kerja sama yang demikian rapat antara PKI dan PNI. Semakin rapat kerja sama antara PKI dan borjuasi nasional, makin berkembang keterbukaan organisasi partai. Demikian percayanya pimpinan partai atas “ketulusan” teman seiringnya untuk pelaksanaan jalan damai yang ditempuhnya. Sudah demikian sudah tidak ada lagi sifat ketertutupan sebuah partai komunis dan pimpinan partai tidak lagi menanamkan kewaspadaan bagi setiap anggota dan kader PKI terhadap kemungkinan serangan mendadak dari

kaum-kontra-revolusi. Sikap keterbukaan dan tidak adanya kewaspadaan inilah yang nantinya beberapa tahun kemudian, membuka jalan lebar bagi kaum kontra-revolusi yang dipimpin oleh perwira-perwira kanan Angkatan Darat untuk melakukan pembantaian terhadap ribuan orang komunis.¹⁹⁶

Di zaman pemerintahan Wilopo itu juga, PKI semakin mendekati PNI. PKI semakin hari semakin berupaya menampakkan diri sebagai pembela kepentingan nasional yang agresif. Langkah selanjutnya adalah mengambil posisi yang benar-benar legal terbukti dengan tidak dilarangnya PKI menyelenggarakan konferensi partai. Suatu kemajuan yang sangat besar adalah berlangsungnya kongres nasional V pada tanggal 16-20 Maret 1954 di Jakarta, yang merupakan kongres pertama setelah peristiwa Madiun meletus. Keputusan partai itu memuat masalah penting mengenai konsolidasi partai. Struktur organisasi partai disempurnakan baik kedudukan maupun nama.

Pada masa kabinet Wilopo ini juga perkembangan PKI terus mengalami kemajuan. Aktivitas-aktivitas PKI semakin mantap pada masa pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo (1953), gerak-geraknya selalu legal. Dalam dua tahun masa kampanye pemilu 1955, PKI semakin gencar meningkatkan aktivitasnya dengan membuka cabang-cabang partai di daerah-daerah mulai desa sampai kota. Dan pada sekitar tahun 1955 kemajuan PKI sudah mulai tampak. Jumlah anggotanya

¹⁹⁶ Imam Soedjono, 2006, *Yang Berlawanan, Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Resist Book, Yogyakarta, Januari, hal 285.

semakin meningkat. Dengan demikian Aidit telah berhasil membawa PKI keluar dari isolasi.¹⁹⁷

Di era kabinet Ali ini juga harapan PKI bahwa pemerintahan yang terpilih adalah pemerintahan nasional yang tidak melibatkan elemen-elemen dari Masyumi dan PSI akhirnya dapat terwujud. Kepemimpinan PKI kini berada ditangan-tangan PNI. Dan dalam kesempatan ini Aidit menyambutnya sebagai "*sebuah kemenangan yang luar biasa demokrasi atas facisme..*" Ia berkomentar bahwa ini adalah kabinet pertama di Indonesia yang dibentuk berlandaskan kepentingan rakyat.¹⁹⁸ Dengan demikian pengangkatan pemerintahan Ali tersebut cukup "mewakili" dimata PKI, sebuah perolehan yang layak diperhitungkan dalam rangka menuju sebuah pemerintahan yang demokratis. Untuk pertama kalinya kelompok Masyumi-SI yang reaksioner berhasil diasingkan.¹⁹⁹

Dukungan PKI terhadap PNI ini adalah sebagai alat untuk mendapat dukungan dari parlemen guna menghadapi penentangan yang berkelanjutan dari sebagian besar partai-partai terpenting lainnya. Bagi PNI keuntungan yang dapat mereka peroleh adalah bahwa mereka mendapatkan dukungan dalam parlemen hanya dengan syarat bahwa PKI diijinkan untuk berkembang dengan bebas. Bagi PKI, keuntungan dari mendapatkan dukungan dari sebuah partai yang memiliki ukuran dan pengaruh sebesar PNI sangatlah jelas mereka akan memperoleh derajat legitimasi yang lebih besar lagi apabila dibandingkan dengan sebelumnya

¹⁹⁷ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 52.

¹⁹⁸ Peter Edman, *op.cit*, hal 97.

¹⁹⁹ *Ibid*, hal 100.



yang mungkin tanpa adanya dukungan dari PNI. PKI juga berpandangan bahwa antara PNI dan Presiden adalah dua sumber dukungan yang saling terpisah, dan untuk mendapatkan dukungan dari keduanya haruslah diperoleh melalui cara-cara tersendiri.²⁰⁰

Usaha keras PKI pun bermuara pada hasil pemilu 1955, hasil pemilu ini sungguh sangat menggembirakan. Pertumbuhan PKI dari organisasi yang nyaris hancur lebur setelah peristiwa Madiun 1948 dan telah mengalami tekanan berat dari pemerintahan Sukiman pada tahun 1951 sampai dengan meraup 16,4% dari keseluruhan suara adalah prestasi yang luar biasa.

Sejak kongres di Purwokerto itu (1963), garis politik progresif revolusioner PNI semakin menonjol. Lebih-lebih setelah diterimanya Deklarasi Marhaenis oleh sidang BPK I, dimana PNI ditetapkan sebagai partai pelopor. Didalam merebut massa, taktik PNI agaknya tak berbeda dengan taktik PKI. Konfrontasi ideologi dengan PKI dielakkan sehingga PNI akhirnya menjadi “pengikut setia” PKI tanpa daya kreasi, inisiatif dan imajinasi.

PNI adalah pengikut politik PKI, hal itu tidak lain karena PNI mengeluarkan rumusan-rumusan yang sama dengan PKI atau bahkan mengikuti formula-formula perjuangan PKI, misalnya tentang tuntutan pembubaran SOKSI, BPS, Penasakoman ABRI, pembubaran HMI, demonstrasi “tunjuk hidung terhadap setan-setan kota yaitu koruptor,

²⁰⁰ *Ibid*, hal 104-105.

kapitalis birokrat, dinasti ekonomi dan sebagainya. Dari hal-hal tersebut diatas orang cenderung berpendapat bahwa seakan-akan PNI dan PKI ada kerja sama, lebih-lebih setelah Ali Sostroamidjojo, ketika menyambut ulang tahun ke-45 PKI menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan PKI.²⁰¹ Namun menjelang tahun 1965 yaitu ketika peristiwa kudeta PKI meletus, ternyata memberi pengaruh yang cukup besar bagi PNI yaitu dalam tubuh PNI terjadi perpecahan akibat dari perbedaan-perbedaan garis kepemimpinan, sehingga membuat PNI melakukan pembenahan ulang seperti usaha-usaha penyatuan kembali PNI dan usaha pembersihan dari unsur-unsur komunis.²⁰²

2. Pengaruh Perkembangan PKI terhadap Masyumi

Rencana pendirian Masyumi sudah ada pada permulaan Agustus 1945, tanggapan terhadap rencana tersebut dikalangan umat Islam ternyata menggembarakan, sehingga setelah keluar maklumat pemerintah mereka mendirikan partai Masyumi pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta.²⁰³ Kalangan umat Islam sebenarnya menganggap pengumuman itu tidak tepat waktunya. Oleh sebab itu umat Islam merasa berkewajiban mereorganisasi kekuatan dan tenaganya dalam suatu wadah politik hingga dapat dilaksanakan tugasnya dalam politik, maka diadakanlah muktamar Islam Indonesia di Yogyakarta tanggal 7 dan 8

²⁰¹ Nazaruddin Sjamsuddin, *PNI dan Kepolitiannya 1963-1965*, C.V Rajawali, Jakarta, 1984, hal 16.

²⁰² *Ibid*, hal 73.

²⁰³ M. Rusli Karim, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Jakarta, 1991, hal 30.

November 1945 yang dihadiri oleh semua tokoh berbagai organisasi Islam. Kongres memutuskan untuk mendirikan Majelis Syuro yang sebagai pusat bagi umat Islam Indonesia. Masyumi kemudian dianggap sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam.²⁰⁴

Dalam anggaran dasar pasal 2 disebutkan bahwa Masyumi berasaskan agama Islam dan bertujuan menegakkan syariat Islam serta melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.²⁰⁵

Meski Masyumi mempunyai dasar Islam tetapi dalam tubuh Masyumi terdapat berbagai aliran politik diantaranya adalah golongan nasionalis agama. Golongan ini menghendaki pelaksanaan ideologi Islam sejauh menyangkut masalah-masalah kenegaraan serta membentuk negara yang berdasar pada prinsip agama Islam. Akan tetapi hal ini tidak mengurangi sikap anggota untuk tetap anti komunis.²⁰⁶

Dilihat dari sejarahnya Masyumi berasal dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Sebenarnya organisasi ini telah dikenal sejak jaman Jepang dan diantara para pendiri itu mula-mula ada yang berkeberatan dengan nama yang berbau Jepang dan menghendaki partai baru yaitu dengan nama Partai Rakyat Islam. Tetapi dalam pemungutan suara yang kemudian diadakan nama Masyumi yang dipilih. Sebab bagaimanapun juga nama tersebut sudah terkenal dan kendatipun sedikit berbau Jepang

²⁰⁴ Deliar Noer, 1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, hal 48.

²⁰⁵ Kementerian Penerangan RI, *op.cit*, hal 414.

²⁰⁶ George. M.Turman Kahin, , *op.cit*, hal 274.

tetapi Masyumi tetap nasionalistis lagi pula pimpinan Masyumi jatuh ke tangan tokoh-tokoh yang tidak erat bekerja sama dengan Jepang.²⁰⁷

Pendukung Masyumi selain organisasi politik seperti PSII juga ada organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU. Pendukung lainnya adalah Perserikatan Umat Islam dan Persatuan Umat Islam pada tahun 1951. Keduanya memfusikan diri menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia (PUI). Perkembangan pesat anggota Masyumi ditandai dengan masuknya organisasi-organisasi Islam antara lain: Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA), Al-Irsyad, Al-Jami'ah Al-Washliyah dan Al-Itthadiyah, Mathla'ul Anwar dan Nahdlatul Wathan.²⁰⁸

Adalah mungkin sekali karena salah satu sebab dukungan dari NU itu Masyumi kemudian berkembang pesat menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Menurut catatan pengurus besar Masyumi sampai pada akhir Desember 1950, Masyumi mempunyai 237 cabang, 1080 anak cabang, 4982 ranting dan jumlah anggota sekitar 10 juta orang.²⁰⁹

Ketika pembentukkan kabinet Amir Syarifuddin I, 3 Juli 1947-11 November 1947, PSII menyatakan keluar dari Masyumi. Persoalannya adalah PSII menghendaki dapat jatah kedudukan dalam kabinet, sesudah Masyumi menolak duduk dalam kabinet itu. Maka duduklah Aruji Kartawinata sebagai menteri pertahanan, Syah Buddin Latif sebagai

²⁰⁷ M. Rusli Karim, *op.cit*, hal 30.

²⁰⁸ Syaefullah, 1997, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Grafitti, Jakarta, hal 142.

²⁰⁹ Choirul Anam, 1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU 1954-sekarang*, Jatayu, Solo, hal 129.

menteri muda sosial, Haji Anwaruddin sebagai menteri agama, semuanya wakil dari PSII dan setelah kejadian itu kekompakan didalam tubuh Masyumi mulai goyah. Perselisihan yang bermula dari perbedaan dan kepentingan mulai tampak jelas mewarnai keadaan partai Masyumi. NU yang semula sebagai salah satu tulang punggung Masyumi juga ikut keluar dan berdiri sendiri sebagai partai tersendiri. Pernyataan itu merupakan salah satu keputusan muktamar NU yang ke XIX yang berlangsung di Palembang.²¹⁰ Pada akhirnya Masyumi dibubarkan oleh pemerintah tahun 1960.²¹¹

Dalam perjuangan politiknya dikonstituante, terlihat umat Islam kehilangan kemampuan merumuskan cita-cita politik Islamnya dalam simbolisasi yang diterima oleh bangsa Indonesia. Saat itu mereka menghadapi tantangan yang keras dengan komunis. Berbeda dengan masa merumuskan piagam Jakarta (22 Juni 1945) sampai dengan perumusan falsafah negara pancasila (18 Agustus 1945) umat Islam berhadapan dengan konfrontasi politik dengan komunis. Akibatnya kehadiran komunis membuat konstituante tidak mampu melahirkan keryanya dan diakhiri dengan maklumat Presiden.

Terhadap neraca politik yang bertumpu pada nasakom partai Masyumi tidak dapat menerimanya. Sementara itu politik adaptasi yang dianut oleh Muhammadiyah, NU, PSII, Perti, GASBINDO membuka diri untuk membuka konsep nasakom. Pribadi pimpinan nasakom dengan

²¹⁰ HA. Basit Adnan, 1982, *Kemehut Dalam Nu Antara Kyai Dan Politisi*, Mayasari, Solo, hal 23-24.

²¹¹ Deliar Noer, *op.cit*, hal 48.

pengaruh yang semakin telah mengantarkan bangsa Indonesia untuk mengerti nasakom disamping juga Pancasila dan UUD'45. Apa yang diperoleh dari sistem adaptasi pada jaman nasakom bagi perjuangan umat Islam, jawabannya nasakom bukan busana umat muslim realitanya umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap eksis ditengah perbedaan.

Suasana politik di tahun 1950 agak berbeda dengan tahun-tahun sebelum tahun 1950. Partai-partai yang terdiri dari berbagai aliran dapat bekerja sama namun hal itu tidak dapat ditemukan lagi pada masa sesudahnya. Antara PKI dan Masyumi terus-menerus menjadi musuh bebuyutan. Lalu PNI dan Masyumi juga renggang bahkan antara partai-partai Islam pun sering mengalami konflik. Demikian pula hubungan NU-Masyumi pasca tahun 1950 mulai menghadapi persoalan serius.²¹² Sebagai contoh kecil saja dengan adanya dekrit Presiden dan dibarengi pula dengan adanya Masyumi sebagai partai terlarang oleh Presiden Soekarno dengan suatu tuduhan bahwa oknum-oknumnya banyak yang terlibat dalam pemberontakan di Sumatera (PRRI), maka kekuatan Islam dibidang politik semakin menciut.²¹³

Masyumi mempunyai sejarah yang panjang sebelum menjadi kekuatan politik yang utama dalam demokrasi parlementer. Sebelum kemerdekaan Masyumi telah menganggap dirinya sebagai wakil golongan Islam yang merupakan partai politik modern yang mempunyai pemimpin

²¹² Azra Azyumandi dan Saiful Umam, 1998, *Mentri-mentri Agama RI Bibliografi Sosio Politik*, INIS, Jakarta, hal 139.

²¹³ Imam Munawir, 1984, *Kebangkitan Islam dan Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Islam dari Masa ke Masa*, Bina Ilmu, Yogyakarta, hal 311.

terdidik. Pada masa pendudukan Jepang Masyumi dilarang kegiatannya dalam politik karena para pemimpin menolak kerja sama dengan Jepang.²¹⁴ Hal ini membuat para pemimpin Masyumi makin bertambah semangat untuk berjuang. Semangat para pemimpin Masyumi dibuktikan beberapa tahun kemudian setelah kemerdekaan pemerintah mengeluarkan ketetapan untuk mengizinkan kehidupan partai politik di Indonesia.

Diawal Pemerintahan kabinet Sukiman yang merupakan wakil dari Masyumi, telah diwarnai dengan konflik ideologi. Dimana salah satunya adalah adanya konflik antara PKI dan Masyumi. Konflik ini diawali dengan penangkapan beberapa anggota parlemen dan pegawai pemerintah CC PKI dan Sentral Biro SOBSI. Menurut pemerintah penangkapan itu dilakukan karena PKI dianggap akan melakukan kudeta.²¹⁵

Tindakan pemerintah itu segera menimbulkan banyak reaksi dan banyak kalangan yang menyayangkan peristiwa itu. PKI dibawah Sukirman sebagai ketua fraksi melancarkan protes kepada masyarakat. Tindakan itu dianggap melanggar HAM dan hak demokrasi. Sedangkan tuduhan pemerintah bahwa PKI akan melakukan kudeta dianggap sama sekali tidak benar dan tidak beralasan.²¹⁶ Terlepas dari adanya sanggahan dari ketua fraksi PKI bahwa PKI tidak akan melakukan kudeta dan penangkapan anggota PKI di parlemen merupakan bukti adanya konflik ideologi antara Islam dan non Islam.

²¹⁴ Harry. J. Benda, 1982, *Bulan Sabit Matahari Terbit, Islam Pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta, hal 165.

²¹⁵ *Harian Sumber* tanggal 18 Agustus 1951.

²¹⁶ *Harian Sumber* tanggal 25 Agustus 1951.

Masyumi secara tak langsung tidak akan membiarkan PKI memperluas pengaruhnya di Indonesia atau paling tidak membatasi gerak PKI. Karena dengan terjadinya pemberontakan PKI 1948 di Madiun telah memberikan suatu pelajaran bagi Masyumi khususnya dan golongan Islam umumnya untuk tidak membiarkan partai tersebut berkembang terlalu kuat. Karena selama periode-periode sebelumnya telah menunjukkan bahwa golongan Islamlah yang paling anti bekerja sama dengan PKI atau partai kiri lainnya. Penangkapan anggota parlemen pada masa kabinet Sukiman dapat dikatakan merupakan manifestasi pertentangan ideologi yang terjadi antara partai di Indonesia.²¹⁷

Dengan demikian dengan adanya pembersihan unsur-unsur PKI pada Agustus 1951 oleh kabinet Sukiman menyebabkan partai ini menjadi lemah, namun dibawah pimpinan tokoh-tokoh muda seperti D.N Aidit, PKI mulai mengubah taktik yaitu harus bekerja sama dengan partai-partai lain dalam front nasional. Demi keselamatan PKI kemudian mendukung kabinet Wilopo meskipun didalamnya terdapat tokoh-tokoh Masyumi.²¹⁸

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dimasa demokrasi parlementer, PKI sendiri menyaksikan berdiri dan runtuhnya sejumlah kabinet yang umumnya tersusun atas perwakilan-perwakilan dari berbagai partai politik besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PSI. diantara kesemua partai diatas hanya PNI lah yang dapat mereka beri dukungan tanpa harus melakukan kompromi ideologis secara berlebihan. Sedangkan bagi PKI

²¹⁷ *Harian Sumber* tanggal 23 Agustus 1951.

²¹⁸ G. Moedjanto, *op.cit*, hal 88.

memberikan dukungan kepada Masyumi hanya berarti memberikan dukungan kepada sebuah kelompok yang selalu menentang PKI.²¹⁹

Memang berbeda dengan langkah PNI, Masyumi mempunyai hubungan yang sangat buruk dengan PKI karena memiliki lembaran sejarah yang kelam. Dalam peristiwa Madiun 1948, Masyumi mendapat tekanan yang hebat dari PKI, sehingga ketika PKI aktif kembali dalam dekade 1950-an, Masyumi menunjukkan sikap anti pati dan perlawanan yang frontal. Rupanya sikap Masyumi itu tak hanya menekan PKI tetapi secara bersamaan bertentangan dengan partai-partai nasionalis “sayap kiri”.²²⁰ Melihat sejarah keduanya yang begitu kelam, PKI tidak melihat kemungkinan terjalinnya hubungan dengan Masyumi. Sehingga PKI selalu berusaha menghantam dan mengisolasi Masyumi dari elit politik Indonesia. Adanya hubungan yang dekat antara DI/TII dengan Masyumi menyebabkan PKI tak henti-hentinya memojokkan Masyumi dan DI/TII.²²¹

3. Pengaruh Perkembangan PKI terhadap Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi berdiri di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926.²²² NU merupakan salah satu organisasi Islam tertua di Indonesia, sebagai suatu perkumpulan ulama yakni para ahli dan pengajar Islam (kyai) maupun para pengikut Islam awam yang secara ketat

²¹⁹ Peter Edman, *op.cit*, hal 93.

²²⁰ Subhan, Sd, *op.cit*, hal 18.

²²¹ *Ibid*, hal 44.

²²² Laode Ida, 1996, *NU, Elit Islam dan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 1.

mengatur paham ortodok sunni dari Islam.²²³ NU juga dapat diartikan sebagai kebangkitan ulama atau bangkitnya ulama.²²⁴

Cikal bakal NU berasal dari suatu komite yang bernama Komite Hijaz. Pada tahun 1924 dunia Islam digemparkan oleh adanya kongres khilafah. Turunnya raja Husein dari tahta kerajaan Arab Saudi dan digantikan oleh puteranya yang bernama Ibnu Saud pada tahun 1926 ternyata membawa pengaruh terhadap perkembangan umat Islam di negara lain termasuk di Indonesia. Setelah naik tahta raja Ibnu Saud langsung mengadakan muktamar umat Islam seluruh dunia yang diselenggarakan di Mekkah. Dari Indonesia yang diundang adalah HOS Tjokroaminoto dari Syarikat Islam dan K.H Mas Mansyur dari Muhammadiyah. Mereka membawa bendera “ Muktamar Al-Alam Al Islam Far’ul Hindisy Syarkiyah” (Kongres Al-Islam Hindia Timur). K.H Abdul Wahab Hasbullah dari NU yang waktu itu belum turut serta lalu membentuk komite Hijaz dan inilah yang menjadi pokok pangkal berdirinya NU.²²⁵ Dan dua tahun kemudian NU berhasil mengirim utusan terhadap raja Saud yaitu K.H Abdul Wahab Hasbullah. Hasil kunjungan itu diperbolehkan mengadakan ibadah berdasarkan empat mazhab di Masjidil Haram.²²⁶

NU yang semula berkedudukan di Surabaya, pada awalnya hanya memiliki pendukung atau jamaah dari Jawa dan Madura. Namun kalangan ulama pesantren ini terus mencari peluang didirikannya cabang diluar

²²³ Mitsuo Nakamura, 1982, *Agana dan Perubahan Politik: Tradisionalisme Radikal NU di Indonesia*, Hispara, Jakarta, hal 1.

²²⁴ G. Moedjanto, *op.cit*, hal 32.

²²⁵ HA. Basit Adnan, *op.cit*, hal 11.

²²⁶ *Ibid*, hal 12.

Jawa dan pada tahun 1940 tercatat sudah ada 40 cabang NU di seluruh Indonesia.²²⁷

Pada tahun-tahun pertama berdirinya NU, bisa dikatakan tidak ada aktivitas keagamaan yang menonjol dari organisasi ulama ini. Meskipun demikian organisasi ini cepat memperoleh simpati umat Islam terutama di Jawa.

Laju perkembangan jemaah NU yang demikian pesat luar biasa merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan syariat Islam. Besarnya jumlah anggota dan simpatisan NU bisa dijadikan modal untuk melawan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang aktivitas NU terpusat pada perjuangan membela tanah air, baik secara politik maupun fisik. Ini berarti NU sudah tidak lagi mengkhususkan diri pada urusan sosial kemasyarakatan dan keagamaan saja, namun mulai melibatkan diri dalam politik praktis. Sebagai contoh adalah beberapa tokoh penting NU seperti K.H Hasyim Asy'ari berhasil menempati posisi sebagai menteri negara setelah proklamasi 17 Agustus 1945.

Pada mulanya Masyumi yang memantapkan diri sebagai satu-satunya partai politik bernafaskan Islam tampak demikian hebat. Partai politik Islam pertama ini mampu menyaring anggota sekian banyak umat Islam di Indonesia. saat itu bagi umat Islam yang kental rasa keislamannya seakan tak ada pilihan lain kecuali menyalurkan aspirasi politiknya lewat

²²⁷ Laode Ida, *op.cit*, hal 11.

Masyumi.²²⁸ Namun dalam muktamar Masyumi ke-4 yang berlangsung pada tanggal 15-19 Desember 1949 di Yogyakarta, pimpinan Masyumi melakukan reorganisasi secara besar-besaran.²²⁹ Dengan demikian NU harus menelan kenyataan pahit.

Muktamar Masyumi yang ke-4 ini banyak disutradarai oleh para politisi non NU dan dengan begitu saja mengubah status Majelis Syuro. Majelis Syuro yang semula memiliki kewenangan dalam menentukan kebijaksanaan partai diubah statusnya sebagai penasehat semata-mata. Agaknya perubahan ini bukan dari pengertian formal, sebab dalam ART (anggaran rumah tangga) Masyumi yang diterbitkan tahun 1951 masih dicantumkan ketentuan dewan pimpinan partai yang wajib meminta fatwa kepada Majelis Syuro pusat dalam soal-soal politik yang dianggapnya mengenai hukum negara dan keputusan yang ditetapkan adalah keputusan tertinggi.²³⁰ Disamping itu ketika masih bergabung dengan Masyumi, NU hanya diberi jatah kursi delapan buah. Suara NU yang demikian berarti tidak dihargai secara sepadan dan hanya disejajarkan dengan organisasi-organisasi Islam yang bersifat lokal. Tentu saja pembagian jatah kursi ini kurang proposional dan NU merasa “dianak tirikan“ didalam Masyumi.²³¹

Dalam muktamar NU yang ke XIX di kota Palembang pada tanggal 26 April- 1 Mei 1952, terjadi suatu perubahan besar dalam gerakan ini, diantara perubahan itu adalah pemisahan diri dari partai Masyumi dan

²²⁸ Khairul Fathoni, Muhammad Zein, 1992, *NU Pasca Khittah*, MW Mandala, Yogyakarta, hal 32.

²²⁹ *Ibid*, hal 32.

²³⁰ M. Ali Haidar, 1994, *NU dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hal 107.

²³¹ Khairul Fathoni, Muhammad Zein, *op.cit*, hal 33.

menyatakan diri sendiri sebagai partai politik. ketika itu yang memimpin adalah ketua muda PBNU, K.H Abdul Wahid Hasyim.

Pemisahan diri dari partai Masyumi, juga didahului perdebatan yang cukup sengit sehingga akhirnya ditempuhnya jalan pemungutan suara. Hasilnya 61 suara setuju, 9 suara menolak pemisahan dan 7 suara blanko (abstain). NU secara resmi memisahkan diri dari Masyumi setelah bersama-sama dalam persekutuan sebagai anggota federasi partai politik sejak zaman pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan Indonesia.²³²

Awal kehidupan politik NU, NU harus menghadapi berbagai kesulitan. Pertama, Ia kekurangan tenaga terampil dibidang politik. Kedua, kesulitan menghadapi lawan politik dalam arti pertentangan ideologi seperti PKI. Disamping itu juga harus melawan Masyumi. Untuk kesulitan pertama, partai NU ini segera mengadakan rekrutmen (penambahan anggota) tenaga terampil dibidang politik.²³³

Seperti hal partai politik yang baru berdiri, NU pun melakukan politik penyesuaian. Sekalipun politik penyesuaian diri ini karena pertimbangan ketidaksiapan umat pendukung untuk melakukan oposisi terhadap pemerintah, namun NU dalam berbagai hal mampu tampil dengan menggunakan oposisi politiknya sebagai "orang dalam pemerintah" untuk melawan agitasi dan aksi sepihak PKI dibanyak tempat, suatu hal yang menurut NU tidak mungkin dilakukan jika NU melawan pemerintah dicap kontra revolusi atau reaksioner.

²³² HA. Basit Adnan, *op.cit*, hal 18.

²³³ Choirul Anam, *op.cit*, hal 196.

Hal ini pun diakui oleh Njono, gembong yang menyatakan “NU sangat menyulitkan PKI” karena posisinya yang dekat dengan presiden Sukarno. Masyumi yang berada diluar gelanggang pemerintah tidak memiliki keleluasaan berjuang dan tidak dapat menggunakan kesempatan secara legal sebagaimana yang dimiliki NU. Dengan cap reaksioner, anti revolusi dan lain sebagainya yang dilancarkan oleh Presiden Sukarno dan dimanfaatkan oleh PKI, kalangan pemimpin Masyumi dipusat maupun didaerah mengalami kesulitan besar. Kenyataan ini sering dipakai NU sebagai alasan untuk membenarkan kebijaksanaan yang ditempuh untuk tidak melaksanakan konfrontasi kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden Sukarno, yang dalam kenyataannya sangat berkuasa. Tidak cukup kekuatan yang digunakan untuk melakukan hal itu.²³⁴

Pada bulan Juli 1953, NU masuk dalam kabinet Ali Sastroamidjoyo yang dipimpin oleh PNI dan didukung oleh PKI dan sebaliknya Masyumi dan PSI sebagai oposisi. Disitu NU menambah peran politiknya, tidak hanya jabatan menteri agama saja yang diserahkan kepadanya, juga menteri pertanian dan bahkan jabatan wakil perdana menteri. Pimpinan Masyumi kecewa melihat NU semakin dekat dan kuat dengan Sukarno.²³⁵

Pada tanggal 28 November 1954 Bung Karno melantik PPPI (Panitia Pusat Pemilihan Umum Indonesia) yang hanya terdiri dari partai-partai pendukung pemerintah, PPPI kemudian mengumumkan suatu daftar partai

²³⁴ M. Ali haidar, *op.cit*, hal 168-169.

²³⁵ Andree Feillard, 1999, *NU Vis-à-Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, LKIS, Yogyakarta, hal 47.

dengan simbol-simbolnya, termasuk simbol “palu arit” bagi PKI dan non partai. Ini dengan sendirinya menimbulkan heboh.

NU protes keras. Dalam kongresnya yang ke XI di Surabaya, bulan September 1954, NU mengancam krisis kabinet, apabila simbol “independent non partai” tak dihapus dari simbol PKI palu arit. PKI dengan menyadari bahwa kabinet Ali Sostroamidjojo progresif dan sangat menguntungkan bagi PKI, tak mau ambil resiko krisis kabinet. Tunduk atas tekanan NU ini dan pada tanggal 22 Januari 1955, PPPI dan NU menandatangani naskah “menghilangkan kata-kata itu dari tanda gambar” PKI.

Aidit melukiskan damai itu dengan kata-kata, “*Rakyat kita dipengaruhi oleh tiga kecenderungan politik, yaitu komunis, nasionalis dan Islam. Karena disamping kecenderungan komunistis yang mempunyai tradisi heroik revolusioner, kaum nasionalis dan Islam juga mempunyai tradisinya. Karenanya salah apabila kaum komunis tidak mau bekerja sama dengan kaum nasionalis dan Islam*”. Bagi Aidit *united front from above* adalah taktik jangka pendek (*short cut*), sedang *united front from below* adalah jangka panjang. Dengan melewatnya krisis PKI-NU, Kabinet Ali semakin kuat, dari dalam PNI-NU menjadi koalisi makin kuat, apalagi dengan dukungan dari Presiden Soekarno dan PKI.²³⁶

Begitu NU berubah menjadi parpol dan ikut serta dalam pemilu 1955, NU berhasil meraup banyak suara dan keluar sebagai empat besar

²³⁶ Soegiarso Soerojo, *op.cit*, hal 65-66.

yakni PNI, Masyumi, NU dan PKI. Ketika NU merasakan kemenangan politik, belum sempat juga mengadakan pembenahan keanggotaan internal karena sibuk mencari orang dalam jumlah yang banyak sekali untuk mengisi kursi-kursi yang didapat. Hampir tanpa seleksi sama sekali, semua tenaga diminta masuk kedalam NU dan mendapat kedudukan yang empuk. Orang-orang yang tak mengerti NU atau tidak berkarakter NU banyak sekali yang masuk NU dan lama kelamaan menjadi pemimpin dan pengurus NU. Bukan saja tidak sempat melakukan pembenahan-pembenahan internal, tetapi justru timbul perubahan wajah dan isi NU.²³⁷

Kemenangan NU ini diperoleh antara lain karena adanya perubahan strategi dalam kampanye. Pada mulanya NU mengambil tema sentimen agama yang paralel dengan tema kampanye Masyumi. Tema yang sama itu justru langsung membawa kedua partai ini saling berhadapan dan di beberapa tempat khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur kampanye NU tersebut mendapat tantangan yang keras dari PNI dan PKI.²³⁸

Strategi kampanye itu kemudian berubah menyerupai “jalan tengah” yang menggalang kerja sama dengan PNI. Perubahan strategi itu lebih menekankan kepada perhitungan-perhitungan realistis yang lebih menguntungkan NU. Tema kampanye NU menarik garis batas antara Masyumi dan PKI di satu pihak yang sejajar atau sama dengan PNI. Garis batas antara NU dan Masyumi adalah opini politik yang tumbuh pada waktu itu berupa keterlibatan Masyumi dengan gerakan DI/TII, sedangkan

²³⁷ K.H.A. Muchith Muzadi, 1994, *NU dan Fiqih Konstektual*, LKPSM NU DIY, Yogyakarta, hal 72.

²³⁸ M. Ali haidar, *op.cit*, hal 33-34.

batas dengan PKI terletak pada fakta bahwa PKI pernah melakukan pemberontakan Madiun. Sehingga tema kampanye NU lebih bernada “memilih Masyumi berarti mendatangkan ancaman, memilih PKI pun akan mendatangkan bahaya oleh karena itu pilihan yang tepat adalah PNI atau NU.²³⁹

Perolehan suara NU yang cukup besar itu juga tidak terlepas dari pengaruh para kiai dan pesantren. Umat Islam pedesaan, tradisional, memiliki jalinan emosional yang amat erat dengan para kiai. Apa yang diinginkan kiai acap kali selalu dituruti oleh umat. Apalagi kiai itu memiliki kharisma tinggi sehingga umat Islam di pedesaan pun mendukung NU pula.

Karena tidak terdapat partai dominan, kabinet yang dibentuk kemudian adalah kabinet koalisi. PNI-Masyumi-NU. PKI yang diusulkan Presiden Sukarno agar turut didalam kabinet koalisi ini ditolak oleh Masyumi dan NU. Meskipun PNI menerimanya, tetapi karena dua kekuatan lainnya menolak, maka PKI tetap tidak bisa terlibat dalam kabinet. Bagi Masyumi dari pada PKI ikut dalam kabinet, lebih baik Masyumi tidak ikut.²⁴⁰

Peranan NU dalam gelanggang politik, mencapai puncaknya ketika Masyumi yang merupakan partai Islam terbesar dibubarkan oleh pemerintah gara-gara beberapa pemimpinnya terlibat pemberontakan PRRI. Dalam memasuki demokrasi terpimpin, NU mesti pandai-pandai

²³⁹ *Ibid*, hal 36.

²⁴⁰ Kacung Marijan, 1992, *QUO Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Erlangga, Jakarta, hal 77.

memasang strategi. Harus pintar menyusun taktik agar tidak diberangus oleh pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu, tapi sekaligus juga tetap mampu mempertahankan integritas organisasi dan misi yang diembannya.²⁴¹

Pada bulan Februari 1957, Presiden mengajukan konsepnya mengenai demokrasi terpimpin. Dia mengusulkan sebuah pemerintahan Gotong Royong yang memberikan tempat kepada partai besar termasuk PKI dan dibentuk sebuah dewan nasional mewakili masyarakat atas dasar yang tidak hanya berpusat pada partai-partai. Diantaranya yang akan diwakili adalah golongan fungsional seperti Angkatan Bersenjata, petani, buruh, alim ulama, pemuda, wanita, cendikiawan, koperasi, pengusaha nasional, angkatan 45, veteran, seniman, Irian, keturunan asing dan daerah.²⁴²

PKI menyatakan setuju dengan konsepsi Sukarno tersebut seperti halnya dengan PNI, Murba dan beberapa partai kecil lainnya. Masyumi dan Partai Khatolik tidak menyetujuinya, sedangkan NU, PSI dan partai-partai lain menolak secara kurang tegas sejauh yang dapat dilihat dari keterbatasan dan ketidakjelasan tanggapan mereka.²⁴³ Dalam sidang pleno tersebut tanggal 9-10 Maret 1957, NU bersama konsul-konsulnya se-Indonesia menyetujui gagasan presiden dengan syarat: dewan nasional hanya berfungsi sebagai penasehat dan tidak mempunyai konsekuensi politisi dan pembentukannya dilakukan oleh kabinet bersama kepala

²⁴¹ Khairul Fathoni, Muhammad Zein, *op.cit*, hal 35.

²⁴² Andree Feillard, , *op.cit*, hal 50.

²⁴³ MC. Riclefs, *op.cit*, hal 505.

negara.²⁴⁴ NU khawatir terhadap persekutuan yang semakin erat antara Sukarno dan PKI, dan akhirnya menolak juga usulan kabinet Gotong Royong dengan PKI. Kiyai Wahab Hasbullah menyatakan pada waktu itu:

“Bung Karno terlewat gandrung persatuan, hanya termakan dengan ambisinya mempersatukan partai-partai yang sejak semula mempunyai unsur-unsur yang berbeda yang mustahil bisa dipersatukan”.

Dalam upaya untuk mengendalikan kekuatan politik, Sukarno mencetuskan gagasan nasakom untuk menghimpun tiga aliran kekuatan politik kala itu yang berlandaskan nasionalisme (seperti PNI), agama (seperti NU) dan komunis (seperti PKI). Sebenarnya gagasan Sukarno itu bertolak dari warisan kebudayaan Jawa yang merupakan campuran selaras dari semua anasir yang berbeda-beda menjadi satu sistem yang manunggal. Sulit sekali tantangan yang dihadapi NU dengan adanya nasakom itu. Bila Ia berdiam diri sama dengan membiarkan PKI bertindak semakin leluasa. Bila menentang, nasib Masyumi dapat saja terjadi pada NU. Kalau Ia ikut serta dapatkah Ia berdampingan dengan PKI yang atheis itu? Sebenarnya nasakom hanyalah salah satu kasus sulit.²⁴⁵

Gagasan persatuan nasakom yang memberi status yang terlindungi kepada PKI digunakan Sukarno untuk mengimbangi Angkatan Bersenjata. NU tambah dekat dengan ABRI karena menghadapi musuh yang sama yaitu partai komunis. Lagi pula keduanya mempunyai keluhan masing-masing, disatu pihak *Land Reform* yang disetujui DPR GR pada tahun

²⁴⁴ Choirul Anam, *op.cit*, hal 208.

²⁴⁵ Einar Martahan Sitompul, 1989, *NU dan Pancasila*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal 142.

1960, peraturan pemerintah yang kemudian ditetapkan pada tahun 1962. Pembagian hasil panen mengancam kepentingan para pemilik tanah NU. *Land Reform* secara khusus merugikan para ulama memiliki tanah yang luas (termasuk wakaf) atau yang diserahi tanah orang lain yang berusaha menghindari penyitaan. Seperti halnya tentara, NU menanggapi pengorganisasian PKI dengan ketegasan yang sama. Organisasi dibawah naungan PKI ditandingi oleh organisasi massa seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ansor dengan Bansernya (Barisan Ansor Serba Guna), Lembaga Dakwah Missi Islam, Perkumpulan Artis Lesbumi, Himpunan Pengusaha Muslimin Indonesia, dan lain-lain. Keikutsertaan PKI dalam pemerintahan setempat selalu dihalangi NU.

Revolusi yang dikobarkan Sukarno di dalam sistem demokrasi terpimpinnya akhirnya hanya menghasilkan radikalisme massa dan mobilisasi politik. Dalam situasi semacam itulah NU semakin berkembang. Organisasi-organisasi yang bernaung dibawahnya bertambah banyak dan menjalankan peran menjaring dukungan massa dalam rangka mobilisasi politik yang dikenal dengan sebutan “jor-joran manipol”. Diantara sekian banyak ormas NU itu ternyata Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) tetap menduduki posisi kunci, tulang punggung NU.

Pembentukan dan penggemblengan Banser NU (Barisan Serba Guna Ansor) dilakukan NU terutama untuk menghadapi aksi sepihak, penyerobotan tanah, penggayangan setan desa yang dilancarkan oleh PKI dalam rangka offensif revolusionernya. Kebanyakan korban dari tindakan-

tindakan PKI adalah anggota-anggota NU atau sesama umat Islam. Pembentukan Banser Ansor atau sejenisnya yang dilakukan oleh partai-partai dan ormas-ormas yang lain maupun meningkatnya aksi-aksi sepihak dari PKI bukan sekedar petunjuk dari meningkatnya mobilisasi politik dan radikalisme massa, melainkan juga pertanda terbukanya konflik ideologi diantara kekuatan-kekuatan politik yang terdapat didalam demokrasi terpimpin.²⁴⁶

Dekatnya tokoh-tokoh senior NU dengan Presiden Sukarno tidak lepas dari sikap defensif NU semasa demokrasi terpimpin. Ancaman pembubaran selalu membayangi. Dekatnya NU dengan Presiden Sukarno merupakan suatu strategi untuk menggolongkan program-programnya. Ketika itu kekuasaan Sukarno begitu besar, sehingga berbagai keputusan banyak yang datang darinya. Dan bagi NU, langkah mendekati diri kepada Sukarno juga dimaksudkan untuk "mengerem" kekuatan PKI. Sejak awal NU anti PKI. Tetapi NU tidak mampu berbuatbanyak terhadap PKI mengingat PKI juga dekat dengan Presiden Sukarno. Maka yang dilakukan hanyalah sebatas mengimbangi dalam bentuk usulan-usulan program.²⁴⁷

Sikap NU yang secara konsisten anti komunis, baik yang dilakukan dengan perlawanan kultural maupun perjuangan politis, mencapai puncaknya sewaktu PKI melakukan kudeta berdarah, memberontak terhadap NKRI tanggal 30 September 1965. Dewan Revolusi

²⁴⁶ M. Ali haidar, *op.cit*, hal 39-41.

²⁴⁷ Kacung Marijan, *op.cit*, hal 90.

mengumumkan aksi kudeta yang dilakukannya, siang harinya NU yang sudah mencium gerak-gerik PKI segera menguntuk aksi tersebut dan menuduh PKI beserta antek-anteknya berada dibelakang peristiwa berdarah tersebut. Pada tanggal 5 Oktober 1965, NU turut tampil sebagai salah satu kekuatan nasional pertama yang menuntut pembubaran PKI dan semua ormasnya. Hari-hari berikutnya NU beserta ormasnya ikut terlibat secara langsung dalam usaha pembersihan terhadap kekuatan PKI yang dilakukan ABRI.²⁴⁸ Kegagalan kudeta PKI dan kemunculan Soeharto merupakan babak baru dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Dengan demikian pada dasarnya komunis telah tumbuh sebagai ideologi yang juga mulai berpengaruh di Indonesia. Kemunculan ideologi ini adalah sebagai reaksi atas munculnya sistem kapitalis yang dianggap sangat merugikan kehidupan kaum buruh dan menimbulkan kelas-kelas dalam masyarakat. Sehingga hal itu membuat komunis hadir sebagai ideologi yang memihak kepentingan kaum buruh yang tertindas itu.

Kehadiran komunis di Indonesia direalisasikan lewat kemunculan PKI sebagai partai yang berideologi komunis. Lewat kepemimpinan Aidit, PKI mulai berkibar. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh kaum buruh dan tani telah memberi ruang gerak bagi PKI untuk tumbuh di Indonesia. Kondisi perekonomian Indonesia yang masih didominasi oleh imperialis asing menjadi tujuan utama PKI untuk menghancurkannya. Kebijakan yang diterapkan oleh Aidit ini adalah kebijakan yang berangkat

²⁴⁸ Khairul Fathoni, Muhammad Zein, *op.cit*, hal 38.

bahwa PKI harus menyesuaikan ajaran Marx dengan kondisi Indonesia dan selain itu juga kebijakan yang diterapkannya ini terpengaruh dari pemikiran Mao Tse Tung, yang mana pokok pikiran yang digunakannya adalah kaum buruh tani sebagai soko guru revolusi, garis massa dan front persatuan nasional. Maka sesuai garis kebijakannya itu, Aidit mulai menggandeng kaum buruh dan tani sebagai kekuatan pokoknya. Kaum ini adalah golongan yang paling tertindas dibanding golongan lainnya. Dengan menggandeng kaum ini maka para pendukung PKI akan semakin banyak.

Namun untuk tetap bertahan dalam gelanggang politik Indonesia, koalisi dengan komponen-komponen politik lainnya sangatlah penting. Maka strategi parlementer juga dijalankan Aidit yaitu dengan melakukan koalisi dengan partai-partai politik diantaranya PNI, Masyumi, NU. Dengan demikian usaha-usaha yang dijalankan oleh Aidit tersebut semakin mempermudah PKI dalam mengibarkan kekuasaannya di Indonesia dan mewujudkan cita-cita PKI untuk membentuk masyarakat komunis yang memiliki prinsip "sama rata sama rasa".

BAB V PENUTUP

Perjalanan panjang Partai Komunis Indonesia dari semenjak awal berdirinya sampai dengan ketika ia harus mengalami kehancuran, peranan Dipa Nusantara Aidit sebagai tokoh sentral menjadi demikian jelas apabila dilihat dari sampai sejauh mana pengaruhnya terhadap berbagai aspek, baik dalam praktik maupun ideologi partai.

Skripsi yang berjudul “Dipa Nusantara Aidit dan Partai Komunis Indonesia 1950-1965” memiliki beberapa permasalahan pokok yang harus dibahas dan dianalisa, diantaranya yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia; dalam bagian ini dijelaskan tentang sebab-sebab yang menyebabkan munculnya D.N Aidit untuk membangun kembali PKI.
2. Bagaimana peranan D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia dalam membangun Partai Komunis Indonesia tahun 1950-1965; dalam bagian ini dijelaskan tentang Peranan D.N Aidit dalam perkembangan Partai Komunis Indonesia yang mencakup usaha-usaha dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan untuk menghidupkan kembali partai tersebut termasuk dalam memelihara hubungan yang baik dengan Sukarno.
3. Bagaimana pengaruh perkembangan PKI terhadap situasi sosial-ekonomi dan politik di Indonesia; dalam bagian ini dijelaskan bagaimana situasi ekonomi Indonesia yang juga memberi basis bagi PKI mengembangkan pengaruhnya dan juga dijelaskan bagaimana PKI menjalin hubungan dengan partai-partai besar lainnya seperti dengan partai PNI, NU dan Masyumi.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka dapat dikemukakan hipotesis-hipotesis sebagai berikut yaitu: 1. Kalau keluarga mendukung dan selalu aktif dalam organisasi nasional maka, D.N Aidit mengawali kariernya dalam politik tingkat nasional; 2. Kalau kepiawaiannya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan partai dan memelihara hubungan baik dengan Sukarno berhasil, maka D.N Aidit sebagai ketua Partai Komunis Indonesia mempunyai peranan besar dalam memimpin PKI; 3. Kalau PKI dapat berkembang di Indonesia, maka PKI akan dapat bersaing dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang sosial-ekonomi dan politik di Indonesia.

Dari penjelasan diatas maka dapat dikemukakan bahwa dari hasil hipotesis pertama yang menyatakan bahwa kalau keluarga mendukung dan selalu aktif dalam organisasi nasional maka, D.N Aidit mengawali kariernya dalam politik tingkat nasional dan setelah diuji ternyata hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan yaitu keluarga Aidit adalah keluarga yang demokratis, hal ini dapat dilihat dari sikap para anggota keluarga yang mendorong sepenuhnya karir Aidit dalam bidang politik. Selain itu juga pergaulannya yang begitu luas dengan banyak mahasiswa yang memiliki cita-cita patriotik, membuatnya tertarik untuk ikut serta dalam organisasi-organisasi politik. Adapun organisasi Pertimu (Persatuan Timur Muda) ini merupakan awal karirnya di bidang politik yang nantinya akan membawanya ke puncak karir. Dan nama Dipa Nusantara yang disandangnya adalah untuk menghormati perjuangan Diponegoro dan untuk memberi inspirasi Aidit dalam usahanya membebaskan negara nusantara



Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa kalau kepiawaiannya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan partai dan memelihara hubungan baik dengan Sukarno berhasil, maka D.N Aidit sebagai ketua Partai Komunis Indonesia mempunyai peranan besar dalam memimpin PKI dan setelah diuji ternyata hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan yaitu sejak kemunculan Aidit dalam kancah politik, PKI telah memberikan perubahan besar bagi perkembangan partai ini. Ketika partai diambang keterpurukan akibat peristiwa Madiun, Aidit mulai mengupayakan cara-cara terbaik untuk membangun kembali partai ini. Bakat politiknya begitu terlihat, kemampuan berinteraksi dan beradaptasinya dengan situasi Indonesia melalui cara-cara yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian besar para tokoh PKI lainnya telah berhasil membawa partai ini sukses menjadi partai besar di Indonesia. Dan posisi PKI semakin mantap dan peran serta dalam panggung politik Indonesia semakin berkibar saat Aidit mulai menjalin hubungan nan mesra terhadap presiden Sukarno. Lewat demokrasi terpimpin yang dikumandangkan Sukarno, PKI semakin memantapkan aksinya dalam perpolitikan Indonesia. Pada masa ini pulalah Aidit sebagai seorang pemimpin partai mendapatkan kesempatan untuk mewujudkan secara nyata berbagai permasalahan yang sebelumnya hanya dapat mereka kemukakan dengan cara yang sangat berhati-hati.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa kalau PKI dapat berkembang di Indonesia, maka PKI akan dapat bersaing dalam mengatasi berbagai persoalan dalam bidang sosial-ekonomi dan politik di Indonesia dan setelah diuji ternyata hasil penelitian itu sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan yaitu kondisi

perekonomian Indonesia yang selalu mengalami pasang surut dan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan telah menyebabkan kesengsaraan rakyat terutama dirasakan oleh kaum buruh tani yang ada di pedesaan. Dengan kondisi yang demikian mendukung itu, PKI mulai membujuk kaum buruh tani untuk turut serta menyukseskan tujuan revolusi Indonesia yaitu mendirikan masyarakat sosialis, yang dipandang dapat memberi nuansa baru bagi kemajuan ekonomi Indonesia. PKI pun juga membangun organisasi baru yang memiliki tujuan untuk memperjuangkan hak-hak rakyat seperti SOBSI dan BTI. PKI berpendapat bahwa kaum buruh tani yang hidupnya menderita lebih gampang dipengaruhi ide-ide komunis karena dalam keadaan miskin dan menderita masyarakat akan cenderung revolusioner. PKI juga mulai mengadakan aliansi dengan PNI, NU dan juga Masyumi. Usaha aliansi ini banyak memberikan pengaruh berarti dalam perkembangan PKI, dimana aliansi ini bertujuan untuk melenyapkan citra buruk PKI. Usaha ini berhasil, terbukti dengan kemenangan PKI pada pemilu tahun 1955 dan PKI banyak membuka cabang-cabang partai didaerah-daerah mulai desa sampai kota. Dengan demikian Aidit telah berhasil membawa PKI keluar dari isolasi.

Dengan demikian dari penjelasan diatas dapat disimpulkan hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan. Pertumbuhan PKI dari organisasi yang nyaris hancur lebur setelah peristiwa Madiun 1948 dan telah mengalami tekanan berat dari pemerintahan Sukiman pada tahun 1951 sampai dengan meraup 16,4% dari keseluruhan suara adalah prestasi yang luar biasa.

Dengan demikian usaha-usaha yang dilakukan Aidit itu telah memberi banyak kontribusi terhadap perkembangan PKI dalam panggung politik Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gafur,
1987, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Adams, Cindy,
1966, *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta.
- Aidit, D.N,
1955, *Lahirnya PKI dan Perkembangannya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1959, *Front Persatuan Nasional dan Sejarahnya*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1959, *Djalan ke Demokrasi Rakyat bagi Indonesia*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1959, *Tentang Tan Ling Djiisme*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1960, *Perkuat Persatuan Nasional dan Perkuat Partai*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1960, *Revolusi Indonesia Latar Belakang, Sejarah dan Hari Depan*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1960, *Mendukung Demokrasi Terpimpin Adalah Politik Yang Paling Revolusioner*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- _____,
1960, *Bersatu Menempuh Djalan Demokrasi Terpimpin Menuju Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%*, Yayasan Pembaruan, Jakarta.
- Alfian,
1980, *Pemikiran dan Perubahan Politik di Indonesia*, PT Gramedia, Jakarta.

1993, *Komunikasi Politik dan Sistem Politik Indonesia*, P.T Gramedia, Jakarta.

Ali Sostroamijoyo,
1974, *Tonggak-Tonggak di Perjalananku*, Kinta, Jakarta.

Anwar, Yozar,
1982, *Protes Kaum Muda; Kisah Bubarnya PKI, Jatuhnya Sukarno, Tenggelamnya KAMI*, P.T Variasi Jaya/Kartini Group, Jakarta.

Arifin Bey,
1953, *Dari Sun Yat Sen ke Mao Tse Tung*, Tinta Mas, Jakarta.

Armin Pane,
tanpa tahun, *Tiongkok Zaman Baru*, Arbati, Jakarta.

Azra Azyumandi dan Saiful Umam,
1998, *Mentri-mentri Agama RI Bibliografi Sosio Politik*, INIS, Jakarta.

Badri Yatim,
1985, *Soekarno, Islam dan Nasionalisme, Rekonstruksi Islam Nasionalis*, Inti Sarana Aksara, Jakarta.

Bambang Widjanarko,
1988, *Sewindu Dekat Bung Karno*, P.T Gramedia, Jakarta.

Basit Adnan, HA,
1982, *Kemelut Dalam NU Antara Kyai Dan Politisi*, Mayasari, Solo.

Benda, J. Harry,
1982, *Bulan Sabit Matahari Terbit, Islam Pada Masa Pendudukan Jepang*, Pustaka Jaya, Jakarta.

Benedict. ROC. Anderson,
1984, *Gagasan Tentang Kekuasaan dalam Kebudayaan Jawa*, Sinar Harapan, Jakarta.

Berchover, Robert. F,
A Behaviorial Approach to Historical Analysis, A Free Press Paperback, New York.

Bilveer Singh,
1996, *Dwi Fungsi ABRI*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Budi Kurniawan dan Yani Andriansyah,
2005, *Menolak Menyerah (menyingkap tabir keluarga Aidit)*, Era
Publisher, Yogyakarta.
- Choirul Anam,
1985, *Pertumbuhan dan Perkembangan NU 1954-sekarang*, Jatayu, Solo.
- Dahm, Bernhard,
1987, *Sukarno dan Perjuangan Kemerdekaan*, LP3ES, Jakarta.
- Deliar Noer,
1987, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*, Pustaka Utama Graffiti,
Jakarta.
- Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI,
1976, *30 Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*, Departemen
Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta.
- Djanwar,
1986, *Mengungkap Pengkhianatan/Pemberontakan G 30 S PKI*, C.V Y
Rama, Bandung.
- Edman, Peter,
2005, *Komunisme ala Aidit*, Center For Information Analysis.
- Einar Martahan Sitompul,
1989, *NU dan Pancasila*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Ensiklopedia Nasional Indonesia jilid I*,
1988, Cipta Adi Pustaka, Jakarta.
- Feillard, Andree,
1999, *NU Vis-à-Vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, LKIS,
Yogyakarta.
- Gottschalk, Louis,
1975, *Mengerti Sejarah*, UI Press, Jakarta.
- Husnial Husin Abdullah,
1983, *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan RI di Bangka-Belitung*, PT.
Karya Uni Press, Jakarta.
- Imam Munawir,
1984, *Kebangkitan Islam dan Tantangan-Tantangan yang Dihadapi Islam
dari Masa ke Masa*, Bina Ilmu, Yogyakarta.

- Imam Soedjono,
2006, *Yang Berlawanan, Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI*, Resist Book, Yogyakarta.
- Kacung Marijan,
1992, *QUO Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*, Erlangga, Jakarta.
- Kahin, George Mc Turnan
1970, *Nasionalisme and Revolution in Indonesia*, Ithaca New York Cornell University Press.
- Kementrian Penerangan RI,
1954, *Kepartaian dan Parleментарia Indonesia*, Jakarta.
- Khairul Fathoni, Muhammad Zein,
1992, *NU Pasca Khittah*, MW Mandala, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo,
2001, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yayasan Bentang Budaya, Yogyakarta.
- Lambert. J. Giebels,
2005, *Pembantaian yang Ditutup-tutupi Peristiwa Fatal Di sekitar Kejatuhan Sukarno*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Laode Ida,
1996, *NU, Elit Islam dan Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Leclerc, Jaqcues,
Aidit dan Partai pada tahun 1950, pada Prisma tahun 1982.
- Legge, J.D,
2000, *"Sukarno A Political Biograpy"*, (diterj.) *Sukarno Sebuah Biografi Politik*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK),
1988, *Rangkaian Peristiwa Pemberontakan Komunis di Indonesia*, Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan (LSIK), Jakarta.
- Markas Besar ABRI,
1995, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia jilid III*, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta.
-
- 1991, *Bahaya Laten Komunisme Di Indonesia*, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, Jakarta.

- Michael.H. Hart,
1985, *Seratus Tokoh Yang Paling Berpengaruh Dalam Sejarah*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Miriam Budiarto,
1982, *Partisipasi dan Partai Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Mitsuo Nakamura,
1982, *Agama dan Perubahan Politik: Tradisionalisme Radikal NU di Indonesia*, Hispara, Jakarta.
- Moedjanto,G,
1988, *Indonesia Abad ke-20 jilid 1 dan 2*, Kanisius, Yogyakarta.
- _____,
1988, "Demokrasi Terpimpin", *Seri Pembinaan Penajaran Ilmu Sosial* seri xv no 1 Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Moerdiono,
1994, *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia. Latar belakang, Aksi dan Penumpasannya*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Ali Haidar,
1994, *NU dan Islam di Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Mohammad Nasir,
tanpa tahun, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Rusli Karim,
1983, *Perjalanan Partai Politik Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- _____,
1991, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, Tiara Wacana, Jakarta.
- Muchith Muzadi,
1994, *NU dan Fiqih Konstektual*, LKPSM NU DIY, Yogyakarta.
- Murad Aidit,
2006, *Aidit Sang Legenda*, Penerbit Pustaka Pena, Jakarta.
- Nazaruddin Sjamsuddin,
1988, *Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Praktek*, Rajawali Press, Jakarta.

1984, *PNI dan Kepolitikannya 1963-1965*, C.V Rajawali, Jakarta.

Nasution, A.H,
1978, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid III*, Ofset Angkasa,
Bandung.

Radius Prawiro,
1998, *Pergulatan Indonesia Membangun Ekonomi*, Gramedia, Jakarta.

Ricklefs, M.C,
2005, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Serambi, Jakarta.

Rusadi Kantaprawira,
1987, *Pak Harto Pandangan dan Harapannya*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Sartono Kartodirdjo,
1975, *Sejarah Nasional Indonesia Merdeka 1950-1964*, P.T Citra
Lamtorogung Persada, Jakarta.

Sebos, J. Hul,
1955, *Komunisme, Pengaduan, Djanji atau Ancaman?*, Pembangunan
Jakarta, Jakarta.

Sobron Aidit,
2003, *Aidit: Abang, Sahabat dan Guru Masa Pergolakan*, Yayasan
Nuansa Cendikia, Bandung.

Soebekti,
1966, *Hari-hari Terakhir Aidit*, Penerbit Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta.

Soegiarso Soerojo,
1988, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai*, Sri Murni, Jakarta.

Soemitro Djojohadikusumo,
1951, *Pandangan Tjara-Tjara Menghadapi Kesukaran Ekonomi di
Indonesia*, Kementrian Penerangan Republik Indonesia, Jakarta.

Stanley,
1995, *Bayang-Bayang PKI*, Institut Studi Arus Informasi, Jakarta.

Subhan, Sd,
1996, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yayasan Bentang
Budaya, Yogyakarta.

- Suharsimi Arikunto,
1989, *Prosedur Penelitian*, P.T Bina Aksara, Jakarta.
- Sukarno,
1951, *Indonesia Menggugat*, S.K Seno, Djakarta.
- _____,
1964, *Di bawah Bendera Revolusi*, Panitia Penerbit Di bawah Bendera Revolusi, Jakarta.
- Suroso, P.C,
1994, *Buku Panduan Mahasiswa*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Suseno, Franz, Magnis,
1999, *Pemikiran Karl Marx, Dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sutarjo, Adisusilo,
2005, *Sejarah Pemikiran Barat Dari Yang Klasik-Modern*, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.
- Syaefullah,
1997, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*, Grafitti, Jakarta.
- Todirum Dyda,
1990, *Pergerakkan Politik Tentara*, P.T Golden Terayon Press, Jakarta.
- Ulf Sundhaussen,
1992, *Politik Militer Indonesia 1965-1967 Menuju Dwi Fungsi ABRI*, LP3S, Jakarta.
- Vaniel, Robert,
1984, *Munculnya Elit Modern Indonesia*, Pustaka Jaya, Jakarta.
- Victor. M. Fic,
2005, *Kudeta 1 Oktober 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Wilhem, Donald,
1981, *Indonesia Bangkit*, UI Press, Jakarta.
- Wilopo,
1976, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, Yayasan Idayu, Jakarta.

Yahya. A. Muhaimin,
1980, *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950-1980*,
LP3ES, Jakarta.

1982, *Perkembangan Militer dalam Politik Indonesia 1945-1966*, Gadjah
Mada University Press, Yogyakarta.

Majalah:

Prisma no 8, LP3ES, Jakarta, 1982, hal 61

Prisma no 10, LP3ES, Jakarta, 1983, hal 65

Koran:

Harian Sumber, Jakarta, tanggal 18 Agustus 1951

Harian Sumber, Jakarta, tanggal 23 Agustus 1951

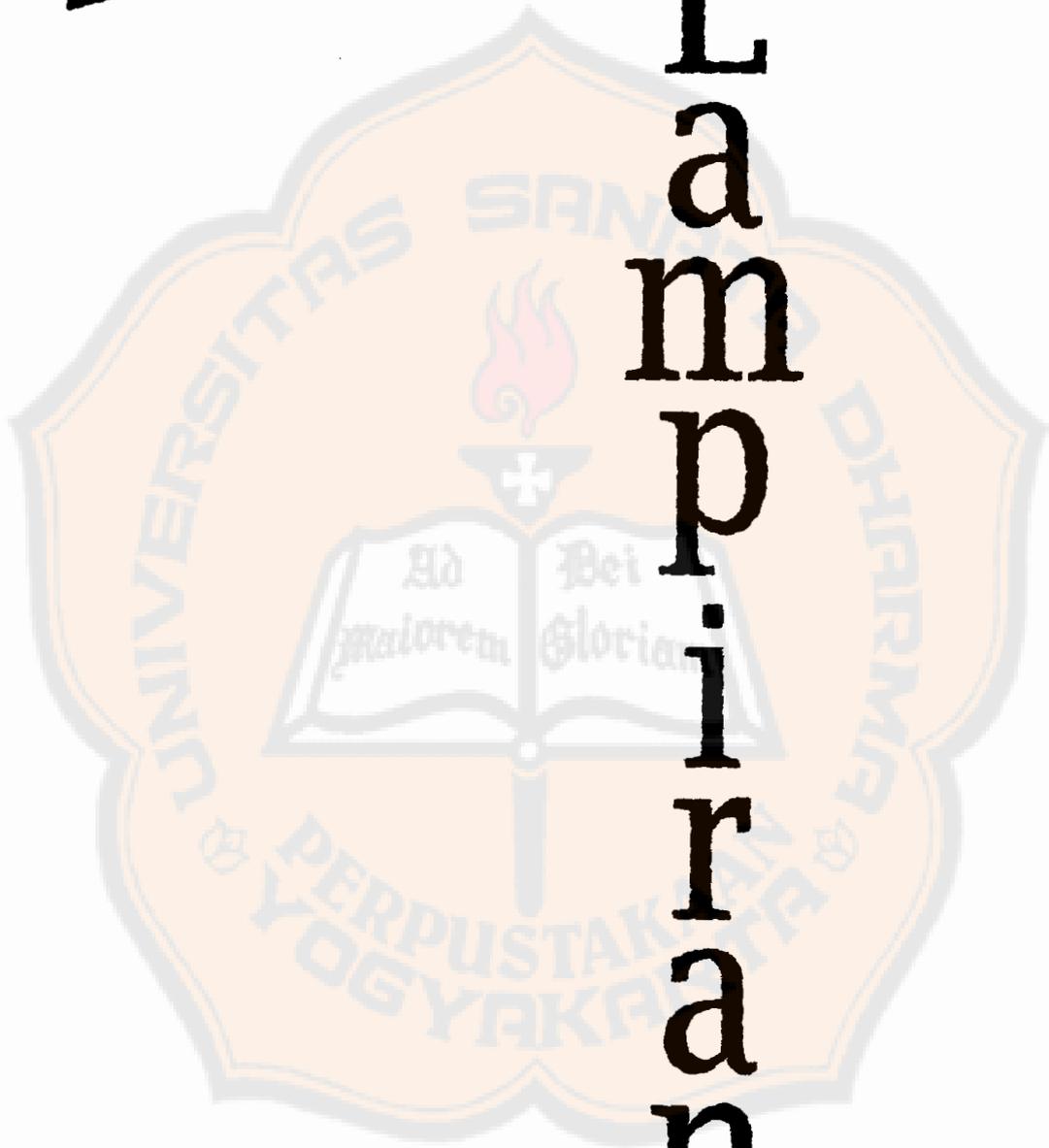
Harian Sumber, Jakarta, tanggal 25 Agustus 1951

Harian Pikiran Rakyat, Jakarta, tanggal 23 Mei 1953

Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, tanggal 5 Januari 1965

Lampiran-

**L
a
m
p
i
r
a
n**



Lampiran I



D.N Aidit

Sumber: Victor. M Fic, 2005, *Kudeta 1 Oktober 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal XVII

Lampiran II



Lukman



Njoto



Sakirman



Sudisman

Tokoh-tokoh terkemuka PKI: Lukman, Nyoto, Sakirman dan Sudisman

Sumber: Victor. M Fic, 2005, *Kudeta 1 Oktober 1965*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal XVII

Lampiran III

Hasil Pemilu Untuk DPR Jawa Tengah dan Kalimantan Barat

Jawa Tengah

Peringkat	Kontestan	Jumlah Suara	%
1	PNI	3.019.568	33,5
2	PKI	2.326.108	25,8
3	NU	1.772.306	19,7
4	Masyumi	902.387	10,0
5	GrInda	154.792	1,7
6	Partai Buruh	90.994	1,0
7	PSII	62.922	0,7
8	PIR Wongsonegoro	60.811	0,7
9	PRN	53.285	0,6
10	PPPRI	47.850	0,5
	Kontestan lain	509.550	5,7
Jumlah		9.000.573	100,00

Sumber:

Subhan, Sd, 1996, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, hal 61

Kalimantan Barat

Peringkat	Kontestan	Jumlah Suara	%
1	Masyumi	155.173	33,2
2	Persatuan Daya	146.054	31,3
3	PNI	64.195	13,8
4	NU	37.945	8,1
5	PSI	15.909	3,4
6	PIR Hazairin	9.153	2,0
7	PKI	8.526	1,8
8	IPKI	7.289	1,6
9	GPP	4.195	0,9
10	Parindra	3.594	0,8
	Kontestan lain	14.630	3,1
Jumlah		466.663	100,0

Sumber:

Subhan, Sd, 1996, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, hal 77

Lampiran IV

Perolehan Suara PKI di Jawa Tengah dan Kalimantan Barat

Jawa Tengah

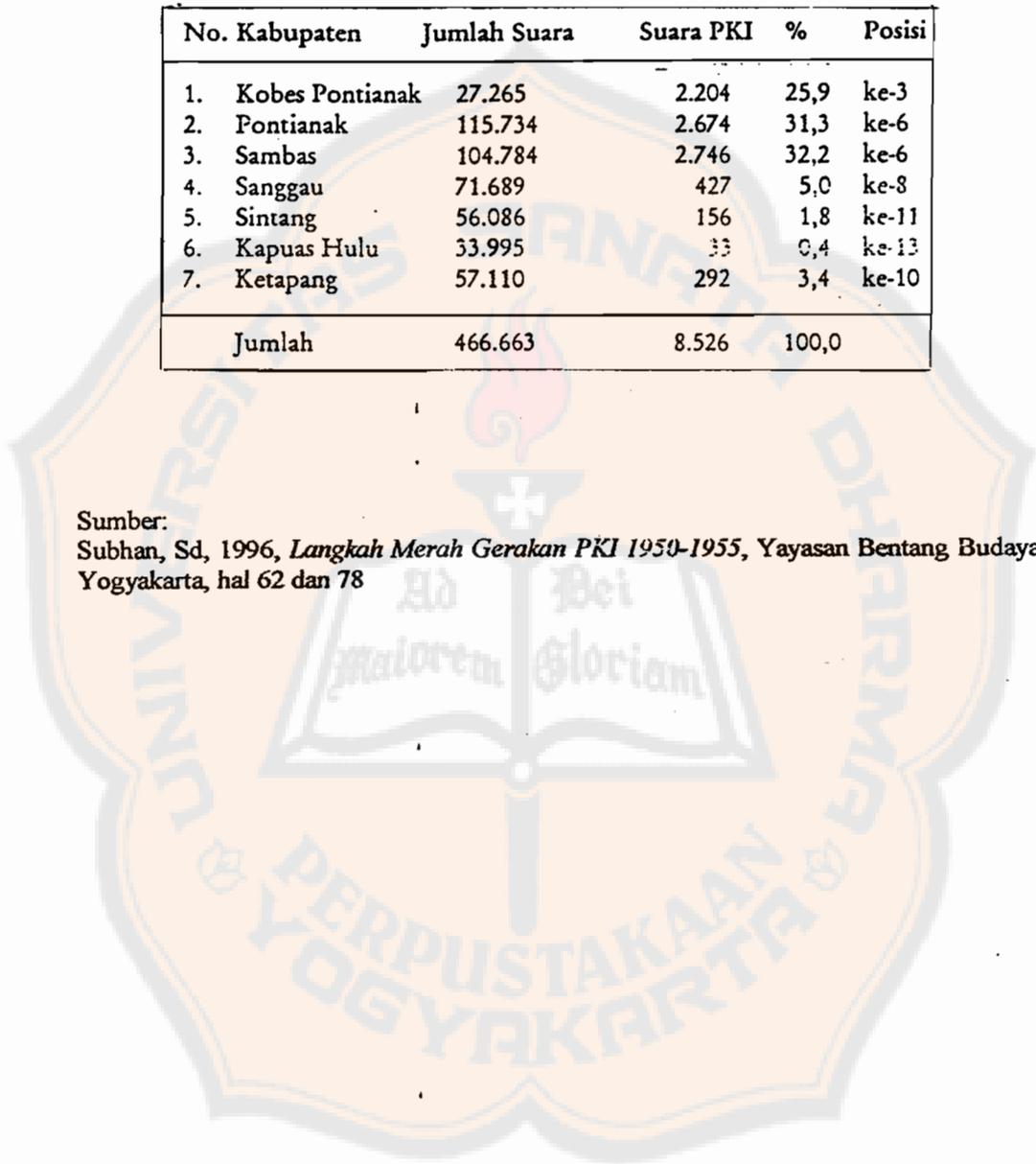
No.	Kabupaten	Jumlah Suara	Suara PKI	%	Posisi
1.	Semarang	277.159	144.773	6.2	ke-1
2.	Demak	204.434	39.239	1.7	ke-3
3.	Kendal	247.252	61.059	2.6	ke-3
4.	Grobogan	284.333	123.878	5.3	ke-1
5.	Pekalongan	415.754	27.699	1.2	ke-3
6.	Pemalang	329.704	63.319	2.7	ke-3
7.	Tegal	323.612	33.619	1.5	ke-4
8.	Brebes	371.298	42.245	1.8	ke-4
9.	Pati	297.432	58.599	2.5	ke-2
10.	Kudus	161.099	27.379	1.2	ke-3
11.	Jepara	199.990	20.211	0.9	ke-3
12.	Rembang	134.014	26.309	1.1	ke-3
13.	Blora	224.055	80.906	3.5	ke-1
14.	Banyumas	414.200	36.229	1.6	ke-4
15.	Purbolinggo	248.814	8.858	0.4	ke-4
16.	Cilacap	389.160	172.707	7.4	ke-1
17.	Banjarnegara	225.460	12.859	0.6	ke-4
18.	Magelang	364.576	75.583	3.3	ke-2
19.	Temanggung	168.678	65.913	2.8	ke-1
20.	Wonosobo	184.315	11.525	0.5	ke-3
21.	Purworejo	249.908	22.033	0.9	ke-3
22.	Kebumen	370.257	67.127	2.9	ke-3
23.	Sukoharjo	173.834	95.115	4.1	ke-1
24.	Klaten	387.640	204.128	8.8	ke-1
25.	Sragen	219.685	28.138	1.2	ke-3
26.	Beyolali	278.010	145.028	6.2	ke-1
27.	Karanganyar	179.966	49.045	2.1	ke-2
28.	Wonogiri	365.535	143.339	6.2	ke-2
29.	Bantul	215.052	34.770	1.5	ke-4
30.	Sleman	215.606	36.655	1.6	ke-2
31.	Gunung Kidul	217.814	101.351	4.4	ke-1
32.	Kulon Progo	144.942	12.527	0.5	ke-4
33.	Kota Pekalongan	42.607	2.567	0.1	ke-4
34.	Kota Surakarta	146.654	76.283	3.3	ke-4
35.	Kota Semarang	179.375	97.152	4.2	ke-1
36.	Kota Yogyakarta	112.275	43.842	1.9	ke-1
37.	Kota Tegal	36.274	6.699	0.3	ke-3
Jumlah		9.000.575	2.326.699	100.0	

Kalimantan Barat

No. Kabupaten	Jumlah Suara	Suara PKI	%	Posisi
1. Kobes Pontianak	27.265	2.204	25,9	ke-3
2. Pontianak	115.734	2.674	31,3	ke-6
3. Sambas	104.784	2.746	32,2	ke-6
4. Sanggau	71.689	427	5,0	ke-8
5. Sintang	56.086	156	1,8	ke-11
6. Kapuas Hulu	33.995	33	0,4	ke-13
7. Ketapang	57.110	292	3,4	ke-10
Jumlah	466.663	8.526	100,0	

Sumber:

Subhan, Sd, 1996, *Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955*, Yayasan Bentang Budaya: Yogyakarta, hal 62 dan 78



PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Lampiran V

SILABUS DAN SISTEM PENILAIAN BERBASIS KOMPETENSI

Nama Sekolah	: SMU
Mata Pelajaran	: Sejarah
Kelas	: XII
Semester	: Ganjil
Pendekatan	: Keterampilan Proses dan Cooperative Learning
Standar Kompetensi	: Kemampuan Memahami Perjalanan Bangsa Indonesia Sejak Masa Awal Kemerdekaan Sampai Dengan Munculnya Reformasi

Kompetensi Dasar	Materi Pokok dan Uraian Materi	Indikator	Pengalaman Pembelajaran	Penilaian			Waktu	Sumber dan Media
				Jenis Tagihan	Bentuk tagihan	Contoh Tagihan		
1.1 Kemampuan menganalisis peranan D.N Aidit dalam membangun Partai Komunis Indonesia 1950-1965	<ul style="list-style-type: none"> Latar Belakang Munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia 1950-1965. Uraian Materi Pokok: Latar belakang munculnya D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia 1950-1965 adalah: Latar Belakang Sosial Budaya dan politik 	<ul style="list-style-type: none"> Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya D.N Aidit dalam gelanggang politik Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Mendeskripsikan tentang biografi D.N Aidit Mendeskripsikan proses peralihan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia oleh D.N Aidit Mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kebijakan politik D.N Aidit dengan para pemimpin PKI lainnya. 	Tes	Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsikanlah secara singkat biografi D.N Aidit? 	2 x 45 Menit	a. Sumber : <ul style="list-style-type: none"> ➤ DN Aidit. (1955), <i>Lahirnya PKI dan Perkembangannya</i>, Jakarta: Yayasan Pembaruan ➤ D.N Aidit. (1959). <i>Persatuan Nasional dan Sejarahnya</i>, Jakarta: Yayasan Pembaruan ➤ D.N Aidit. (1960). <i>Mendukung Demokrasi Terpimpin Adalah Politik Yang Paling Revolusioner</i>. Jakarta: Yayasan Pembaruan
				Tugas	Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> Deskripsikanlah proses peralihan kepemimpinan Partai Komunis Indonesia oleh D.N Aidit? 		
				Tes	Tertulis	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasikanlah persamaan dan perbedaan kebijakan politik D.N Aidit dengan para pemimpin PKI lainnya. 		

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<ul style="list-style-type: none"> • Peranan D.N Aidit sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia dalam membangun Partai Komunis Indonesia tahun 1950-1965 Uraian Materi Pokok: D.N Aidit Sebagai pemimpin Partai Komunis Indonesia, memiliki peranan penting terhadap perkembangan PKI terutama kepiawaiannya dalam merumuskan kebijakan-kebijakan baru, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> Ω Masa Demokrasi Liberal Ω Masa Demokrasi Terpimpin 	<ul style="list-style-type: none"> • Membandingkan kebijakan-kebijakan D.N Aidit dalam membangun PKI pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin serta pengaruh yang ditimbulkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mendeskripsikan pengertian demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin • Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan politik D.N Aidit dalam membangun PKI pada masa demokrasi liberal • Mengidentifikasi kebijakan-kebijakan politik D.N Aidit dalam membangun PKI pada masa demokrasi terpimpin • Mendeskripsikan latar belakang D.N Aidit menjalin hubungan dengan presiden Sukarno • Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan D.N Aidit dalam membangun PKI menjadi partai terbesar di Indonesia. 	<p style="text-align: center;">Tes</p> <p style="text-align: center;">Tugas</p> <p style="text-align: center;">Tugas</p> <p style="text-align: center;">Tes</p> <p style="text-align: center;">Tes</p>	<p style="text-align: center;">Lisan</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Deskripsikanlah pengertian demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin? • Identifikasikanlah kebijakan-kebijakan politik D.N Aidit dalam membangun PKI pada masa demokrasi liberal? • Identifikasikanlah kebijakan-kebijakan politik D.N Aidit dalam membangun PKI pada masa demokrasi terpimpin? • Deskripsikanlah latar belakang D.N Aidit menjalin hubungan dengan presiden Sukarno? • Identifikasikanlah faktor-faktor penyebab keberhasilan D.N Aidit dalam membangun PKI menjadi partai terbesar di Indonesia? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sobron Aidit (2003). <i>Aidit: Abang, Sahabat dan Guru Masa Pergolakan</i>. Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia ➤ G. Moedjanto. (1998). <i>Indonesia abad ke-20 Jilid 1 dan 2</i>. Yogyakarta: Kanisius ➤ Sekretariat Negara Republik Indonesia. (1994). <i>Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia, Latar Belakang, Aksi dan Penumpasannya</i>. Jakarta
---	--	--	--	--	--	---

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

<ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh perkembangan PKI terhadap situasi sosial-ekonomi, dan politik di Indonesia. <p>Uraian Materi Pokok: Pengaruh perkembangan PKI di Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bidang sosial-ekonomi: tercapainya masyarakat Indonesia yang sosialis komunis ▪ Bidang politik: adanya upaya kaderisasi, jalinan kerja sama dengan partai-partai besar lainnya seperti PNI, Masyumi dan NU 	<ul style="list-style-type: none"> • Menghubungkan krisis ekonomi dan politik di Indonesia dengan perkembangan Partai Komunis Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi gejala sosial-ekonomi dan politik di Indonesia pada awal kemerdekaan. • Mendeskripsikan kebijakan-kebijakan D.N Aidit dalam bidang ekonomi dan politik • Mendeskripsikan perkembangan keragaman ideologi partai politik di Indonesia dengan kedudukan Partai Komunis Indonesia • Menjelaskan latar belakang D.N Aidit menjalin hubungan dengan partai-partai besar di Indonesia seperti PNI, NU dan Masyumi 	<p style="text-align: center;">Tes</p> <p style="text-align: center;">Tes</p> <p style="text-align: center;">Tugas</p> <p style="text-align: center;">Tugas</p>	<p style="text-align: center;">Lisan</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p> <p style="text-align: center;">Tertulis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasikanlah gejala sosial-ekonomi dan politik di Indonesia pada awal kemerdekaan? • Deskripsikanlah kebijakan-kebijakan D.N Aidit dalam bidang ekonomi dan politik? • Deskripsikanlah perkembangan keragaman ideologi partai politik di Indonesia dengan kedudukan Partai Komunis Indonesia? • Jelaskan latar belakang D.N Aidit menjalin hubungan dengan partai-partai besar di Indonesia seperti PNI, NU dan Masyumi? 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Subhan, Sd (1996). <i>Langkah Merah Gerakan PKI 1950-1955</i>. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, ➤ Wilopo, (1976). <i>Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya</i>. Jakarta: Yayasan Idayu ➤ Ricklefs, M.C 2005, <i>Sejarah Modern Indonesia 1200-2004</i>, Serambi, Jakarta <p>b. Media:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Buku Paket ▪ Timechart ▪ foto/gambar
---	---	---	---	--	---	--

Yogyakarta, Oktober 2006

Mengetahui,

Kepala Sekolah

Guru Mata Pelajaran

Supriyatin

Retno Anggraini
021314037

